



Sumber gambar: milindani / Freepik

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

TAHUN 2019



Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
KATA PENGANTAR	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB 1 PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Restrukturisasi Organisasi	13
1.3. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	15
1.3.1. Tugas	15
1.3.2. Fungsi	15
1.4. Struktur Organisasi	19
1.5. Program Teknis	19
1.6. Isu Strategis	20
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	23
2.1. Uraian Singkat Renstra	23
2.1.1. Visi	23
2.1.2. Misi	23
2.1.3. Tujuan	23
2.1.4. Sasaran Strategis	23
2.1.5. Arah Kebijakan	24
2.1.6. Strategi	24
2.1.7. Program Teknis	25
2.2. Perjanjian Kinerja	26
2.3. Metode Pengukuran	30
2.4. Target 2019	30
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI	33
3.1. Sumber daya Manusia	33
3.1.1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	39
3.2. Sarana dan prasarana	39
3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	40
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA	47
4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	47
4.2. Perbandingan kinerja Organisasi	78
4.3. Realisasi Anggaran	91
4.3.1. Realisasi Anggaran BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	91
4.3.2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2019	99
4.3.3. Kinerja Capaian Program Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	101
4.4. Efektivitas dan Efisiensi	105
4.5. Kendala dan Strategi	106
BAB 5 PENUTUP	113
5.1. Kesimpulan	113
5.2. Langkah Ke Depan	117
LAMPIRAN	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	19
Gambar 2. Perbandingan Kebutuhan dan Eksisting Jumlah ASN	33
Gambar 3. Perbandingan Jumlah PNS, Honorer, dan TAM/KI	33
Gambar 4. Perbandingan Jumlah Pria dan Wanita	34
Gambar 5. Perbandingan Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rentang usia	34
Gambar 6. Perbandingan Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan pendidikan.....	35
Gambar 7. Perbandingan Golongan ASN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	35
Gambar 8. Inventaris Sarana dan Prasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ..	40
Gambar 9. Proses Penyaluran Dana BP2BT	64
Gambar 10. Realiasi Anggaran masing - masing Indikator Kinerja.....	91
Gambar 11. Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2019	92
Gambar 12. Grafik Perbandingan Anggaran 2015 - 2019	100
Gambar 13. Perbandingan Relisasi FLPP Tahun 2010 - 2019.....	101
Gambar 14. Perbandingan Target dan Realisasi FLPP 2015 -2019	102
Gambar 15. Perbandingan Capaian Penyaluran KPR FLPP 2019 (dalam unit)	103
Gambar 16. Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Subsidi Bunga Kredit Januari - Desember 2019	104
Gambar 17. Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka Januari - Desember 2019	104
Gambar 18. Infografis Realisasi BP2BT	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Perjanjian Kinerja Pertama.....	26
Tabel 2. Target Kinerja Perjanjian Kinerja Kedua (Revisi ke-1)	27
Tabel 3. Target Kinerja Perjanjian Kinerja Ketiga (Revisi ke-2)	28
Tabel 4. Target Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Output Kegiatan	29
Tabel 5. Kategori dan Interpretasi Capaian Kinerja	30
Tabel 6. Perbandingan Target Renstra dan Target PK	30
Tabel 7. Target Output Kegiatan dalam Renstra	31
Tabel 8. Hubungan Target Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dalam Renstra, Output Kegiatan berdasarkan DIPA, dan Indikator Kinerja berdasarkan DIPA.....	42
Tabel 9. Hubungan Indikator Kinerja dan Paket Kegiatan.....	48
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja.....	51
Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1.....	52
Tabel 12. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 1	52
Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2.....	64
Tabel 14. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 2.....	65
Tabel 15. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3.....	68
Tabel 16. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 3.....	68
Tabel 17. Daya Angsur 5 (lima) Provinsi.....	69
Tabel 18. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4.....	70
Tabel 19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5.....	70
Tabel 20. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6.....	71
Tabel 39. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 6.....	72
Tabel 22. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7.....	73
Tabel 23. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 7	74
Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019	78
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2019.....	82
Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja 2015 -2019.....	86
Tabel 27. Kinerja Penyerapan Anggaran Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	93
Tabel 28. Rekapitulasi Interpretasi Capaian Kinerja.....	98
Tabel 29. Realisasi FLPP 2010 - 2019.....	101
Tabel 30. Capaian Realisasi FLPP Bulan Januari - Desember 2019.....	102
Tabel 31. Hasil Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	106
Tabel 32. Uraian Kendala dan Permasalahan BP2BT.....	110

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Dan atas izin-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIN merupakan amanah Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan LAKIN selain merupakan upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja, tetapi juga sebagai laporan pertanggungjawaban Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja berupa input, output, dan outcome yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan direalisasikan.

LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 disusun berdasarkan masukan dari seluruh sub bidang kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2019. Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2020

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Adang Sutara, S.E., M.Si.
NIP. 196008011990031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan disusun bertujuan untuk menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2020.

Restrukturisasi Organisasi

Terjadi perubahan organisasi atau restrukturisasi pada Bulan Februari 2019 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat tersebut dibentuklah beberapa unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, salah satunya adalah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang sebelumnya merupakan Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan yang berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 - 2019

Tujuan pembangunan perumahan 2015 - 2019 bidang pembiayaan perumahan adalah meningkatkan daya beli dan aksesibilitas MBR ke lembaga - lembaga pembiayaan perumahan yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Sasaran strategis pembiayaan perumahan 2015 - 2019 bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan dan diseminasi norma, peraturan, dan kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan-pilihan skema pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat, dan berkelanjutan;
3. Terlaksananya dukungan dan fasilitasi pengembangan pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PPSP, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
4. Terlaksananya operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);

5. Meningkatnya peran/partisipasi dan kapasitas LKB, LKBB, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembiayaan perumahan dengan tetap memperhatikan prinsip *good governance*;
6. Berkembangnya bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif; dan
7. Meningkatnya penempatan dana jangka panjang (dana haji, dana asuransi, dana pensiun, dana jaminan sosial, dan dana Tabungan Wajib Perumahan TNI/Polri) pada instrumen keuangan pembiayaan perumahan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perjanjian Kinerja pertama ditandatangani oleh Direktur Pola Pembiayaan Perumahan pada bulan Januari 2019, kemudian perubahan pertama dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Bulan Februari 2019 dan Bulan November 2019. Terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja yaitu Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta Terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang memiliki target terdiri dari 10 (sepuluh) materi teknis; 1 (satu) rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); 4 (empat) rancangan peraturan menteri (rapermen); 12 (dua belas) bulan layanan dan 312 (tiga ratus dua belas) rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan; 1 (satu) Kebijakan dan Strategi (Jakstra); 1 (satu) Paket Pembiayaan; 1 (satu) draf NSPK; 2 (dua) laporan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan; dan 12 (dua belas) bulan layanan perkantoran.

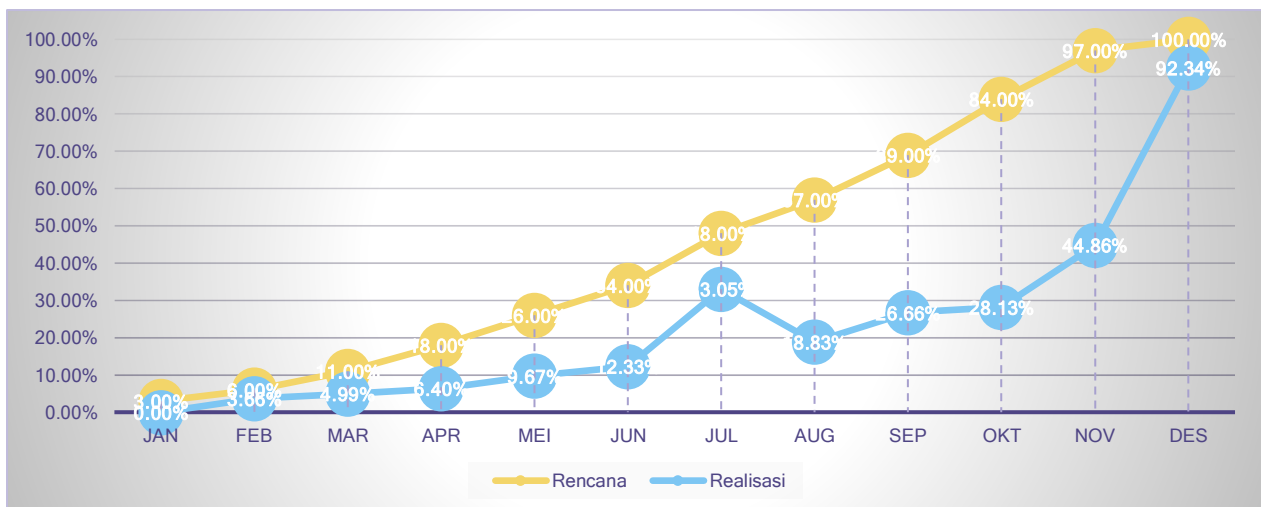
Kinerja dan Realisasi Anggaran

Capaian kinerja Sasaran Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 mencapai 100% dari target / rencana yang telah diperjanjikan. Indikator Kinerja 1, Tingkat Ketersediaan Skema Pembiayaan Perumahan serta Terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR, mencapai 490% atau sebesar 390% lebih dari target rencana sasaran sebesar 100%. Capaian Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), dan 7 (tujuh) sebesar 100%. Indikator 5 (lima) dan 6 (enam) tidak tercapai karena kegiatan mengalami realokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga mengalami penghematan anggaran sebesar 100% dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja 4 (empat) dan 5 (lima). Berikut adalah tabel perbandingan target dan capaian kinerja.

No	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Unit	Target Renstra	Target PK	Capaian	Presentase Capaian (%)
SK 4.3.4.1: Tersedianya skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR						

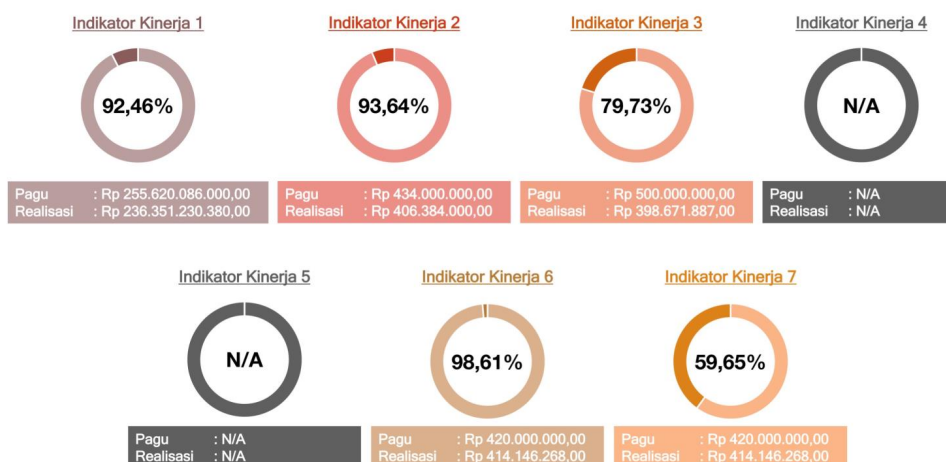
No	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Unit	Target Renstra	Target PK	Capaian	Presentase Capaian (%)
1)	Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	%	100%	100%	490%	490%
2)	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Jakstra	1	1	1	100%
3)	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Draft NSPK	1	1	1	100%
4)	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Dokumen	1	1	0	0%
5)	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	1	1	0	0%
6)	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	Paket Pembiayaan	1	1	1	100%
7)	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan Serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Laporan	2	2	2	100%

Anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar Rp 59.394.086.000.000 untuk BA.033, sedangkan untuk Subsidi Bunga Kredit (BA.999.07) sebesar Rp 3.452.654.265.000,00 dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (BA.999.07) sebesar Rp 948.000.000.000,00. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Nomor DIPA-033.08.1.400812/2019 mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali dengan anggaran pada revisi ke-4 sebesar Rp 257.814.086.000,00.

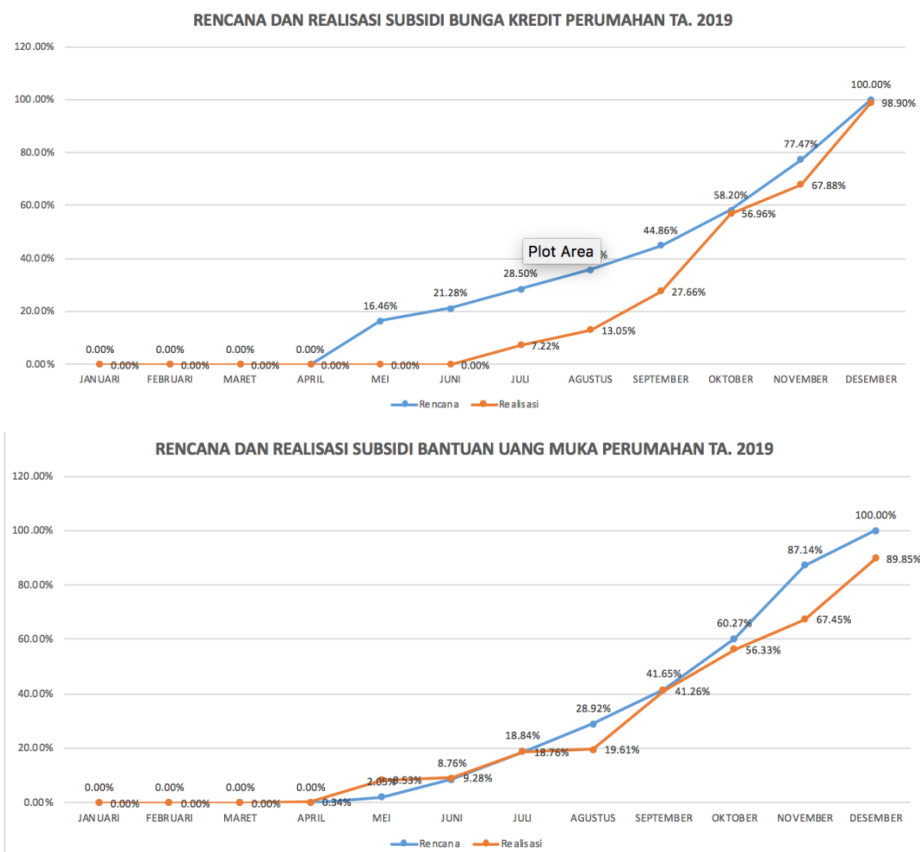


Realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 berdasarkan e-monitoring Kementerian PUPR adalah sebesar Rp 238.074.001.445,00 atau 92,34% dari total pagu bagi Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 257.814.086.000,00.

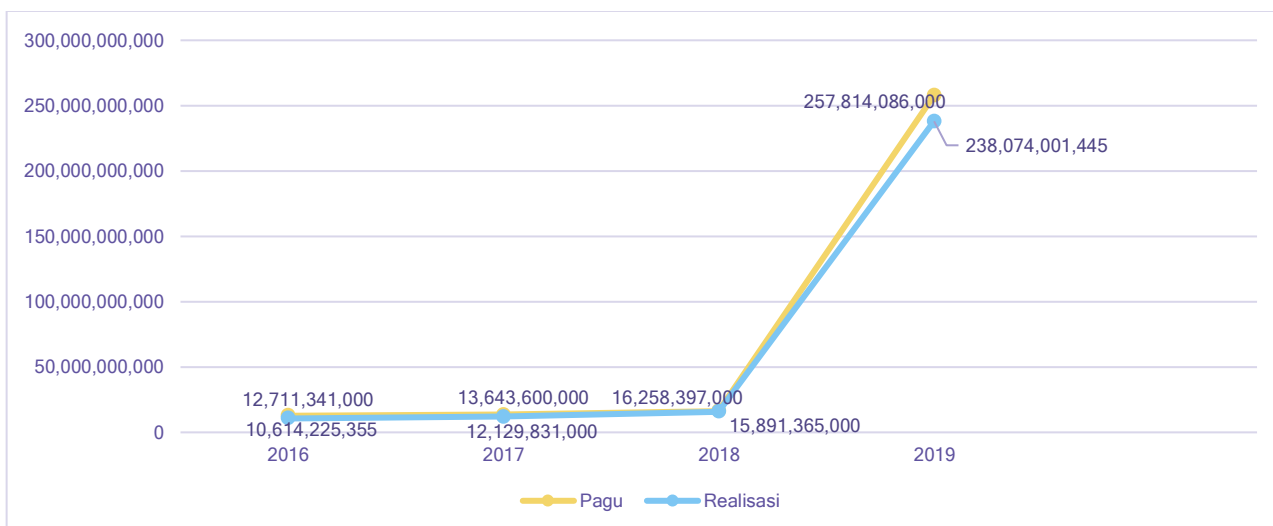
Sedangkan kinerja pencapaian fisik Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan sebesar 99,71%.



Kinerja anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan masing - masing Indikator Kinerja adalah sebesar 92,46% capaian Indikator Kinerja 1 (satu), 93,64% capaian Indikator Kinerja 2 (dua), 79,73% capaian Indikator Kinerja 3 (tiga), 96,61% capaian Indikator Kinerja 6 (enam), dan 59,65% Indikator Kinerja 7 (tujuh).



Target kinerja Subsidi Bunga Kredit pada bulan Desember adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar Rp 3.529.969.647.622,00 atau sebesar 98,90% sehingga terjadi deviasi negatif capaian kinerja sebesar -1,1%. Target kinerja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan TA. 2019 adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar 89,85% atau sebesar Rp 747.040.000.000,00. Terdapat deviasi negatif sebesar -10,15% antara target dan capaian.



Selama pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan 2015 - 2019, anggaran yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2019 merupakan kegiatan dengan pagu anggaran tertinggi dengan perbedaan sebesar Rp 9.555.689.000,00 dari pagu anggaran sebelumnya di tahun 2018. Komposisi terbesar dari anggaran di tahun 2019 adalah Output Kegiatan 5317.003 Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan pagu sebesar Rp 244.920.086.000,00 atau sekitar 94,50% dari seluruh anggaran BA.033 yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Sebanyak Rp 234.720.086.000,00 dari pagu anggaran untuk output kegiatan Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan merupakan jenis dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berasal dari *World Bank* (Bank Dunia) untuk program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang berhasil disalurkan kepada 5.178 penerima manfaat pada tahun 2019.

Kendala, Permasalahan, dan Langkah Ke Depan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan adalah berkaitan dengan tumpang tindih tugas dan fungsi antar subdirektorat, perubahan pagu anggaran yang semula sebesar Rp 30.200.000.000,00 menjadi Rp 257.814.086.000,00, serta kekurangan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pada keberjalanan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) juga mengalami kendala yang berkaitan dengan pemohon, Tenaga Pendamping Penyaluran (TPP), pemerintah daerah kota / kabupaten, bank pelaksana, dan pengembang.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Terkait dengan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Dit. PPP perlu menyusun Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024;
2. Penyusunan Panduan Pelaksanaan KPBU Perumahan atas Usulan Pemerintah Daerah;
3. Penyusunan Strategi Pengembangan Skema Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat (KPBUM) dalam Pembangunan Rumah Susun;

4. Penyelesaian penyusunan Rapermen terkait KPR ASN, TNI, dan POLRI;
5. Pedoman pelaksanaan dan ruang lingkup baru TPP BP2BT Tahun Anggaran 2020 dengan terbitnya Permen PUPR No. 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT;
6. Penyusunan *Service Level Agreement* (SLA) untuk Proyek KPBU Bidang Perumahan;
7. Penerapan penyusunan tarif sewa pada Rumah Susun yang akan dijalankan dengan KPBU;
8. Pengembangan inovasi skema KPR Mikro, penyaluran kemudahan dan bantuan melalui Lembaga keuangan non-bank.
9. Pengawasan dilakukan oleh Manajemen Konstruksi (MK) / pengawas bersertifikat setelah SLF dihilangkan dari syarat utama pengajuan BP2BT.

Serta strategi yang dapat dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan antara lain terkait dengan:

1. Identifikasi Proyek KPBU;
2. Alternatif Sumber Penganggaran untuk Penyiapan Proyek KPBU;
3. Koordinasi dan Fasilitasi Bank Pelaksana, Pembiayaan Sekunder, dan Tapera;
4. Koordinasi Pendataan Pembiayaan Perumahan

BAB

1

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dan isu strategis yang dihadapi.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada unit kerja yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung dan dapat mencapai *outcome* yang tertera pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2015 - 2019 yang kemudian akan diukur pelaksanaannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban dan sebagai upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja dilaporkan menggunakan Laporan Kinerja oleh masing-masing kementerian atau lembaga (K/L) yang telah diatur diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara rinci diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2020.

1.2. RESTRUKTURISASI ORGANISASI

Pada tahun 2015 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dibentuk dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. Pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembiayaan perumahan;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan;
- h. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pembiayaan perumahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima direktorat yaitu Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, dan Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Pada bulan Februari tahun 2019 terjadi restrukturisasi organisasi dan sesuai dengan amanat Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan diubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima direktorat yaitu Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Restrukturisasi organisasi mempengaruhi direktorat di bawahnya sehingga direktorat - direktorat di bawah nomenklatur Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan yang kemudian berganti menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan perlu melakukan transisi dengan melaksanakan tugas dan fungsi lama sesuai dengan Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 dan juga melaksanakan tugas dan fungsi baru sesuai dengan Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2019. Perubahan nomenklatur dan tugas direktorat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi dengan tugas semula yaitu melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar dan keterpaduan perencanaan, strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan, kemitraan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan menjadi melaksanakan perumusan kebijakan, sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan keterpaduan program, identifikasi dan seleksi proyek, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- b. Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan tugas semula melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan menjadi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan tugas semula melaksanakan penyiapan pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan menjadi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
- d. Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan tugas semula melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan menjadi memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- e. Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dengan tugas semula melaksanakan penyiapan pengendalian pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjalankan tugas dan fungsi, sebagai berikut:

Kedudukan

Unit kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

1.3.1. TUGAS

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.3.2. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2019 Pasal 922, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaporan pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;

- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan primer dan pembiayaan sekunder perumahan;
- d. Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan Lembaga Jasa Keuangan di bidang perumahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pelaksanaan kemudahan dan / atau bantuan pembiayaan perumahan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan badan usaha dan pelaksanaan kemudahan dan / atau bantuan pembiayaan perumahan;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, maka Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memerlukan manajemen struktur organisasi yang kuat dan saling mendukung sehingga pendistribusian tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Subdirektorat Kerja Sama dan Pembinaan

Tugas : melakukan perencanaan, penyiapan kerjasama, pembinaan, penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembiayaan perumahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan perencanaan di bidang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan / atau bantuan pembiayaan perumahan;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan / atau bantuan pembiayaan perumahan;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan primer dan pembiayaan sekunder perumahan;
- d. Pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan / atau bantuan pembiayaan perumahan melalui pembiayaan primer dan pembiayaan sekunder perumahan; dan
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan Lembaga Jasa Keuangan di bidang perumahan.

Subdirektorat Kerja Sama dan Pembinaan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, rumusan kebijakan, pelaksanaan, dan kemudahan dan / atau bantuan pembiayaan perumahan.
- b. Seksi Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan yang mmeounyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan / atau bantuan pembiayaan perumahan.

2) Subdirektorat Investasi Perumahan

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan investasi bidang perumahan dan pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang perumahan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan investasi bidang perumahan;
- b. Pelaksanaan penyiapan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang perumahan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan investasi bidang perumahan;
- d. Perumusan dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama investasi di bidang perumahan;
- e. Pelaksanaan tahapan penyiapan kerja sama investasi di bidang perumahan; dan
- f. Pelaksanaan tahapan transaksi kerja sama investasi di bidang perumahan.

Subdirektorat Kerja Sama dan Pembinaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Investasi yang memiliki tugas melakukan perumusan kebijakan investasi bidang perumahan, penyusunan studi pendahuluan, pra studi kelayakan awal dan akhir investasi bidang perumahan, perumusan dan evaluasi standard an pedoman perjanjian kerja sama investasi di bidang perumahan, dan pelaksanaan tahapan penyiapan investasi bidang perumahan.
- b. Seksi Pengembangan Investasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan tahapan transaksi kerja sama investasi di bidang perumahan, pelaksanaan manajemen pelaksanaan perjanjian kerja sama investasi di bidang perumahan, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan investasi bidang perumahan.

3) Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan

Tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, skema pembiayaan. Penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang bidang pembiayaan perumahan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk kepemilikan rumah melalui kredit perumahan rakyat;
- b. Perumusan kebijakan skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- c. Pelaksanaan skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk kepemilikan rumah melalui kredit perumahan rakyat;

- d. Pelaksanaan skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas atas prakarsa dan upaya masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan.

Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan terdiri atas:

- a. Seksi Kemudahan dan Bantuan Rumah Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan, skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk kepemilikan rumah melalui kredit perumahan rakyat, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan;
- b. Seksi Kemudahan dan Bantuan Rumah Swadaya mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan, skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas atas prakarsa dan upaya masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan.

4) Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Tugas : melaksanakan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembiayaan perumahan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise bidang pembiayaan perumahan di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, pelaporan pembiayaan sekunder perumahan, dan fasilitasi dan layanan investasi perumahan, serta pelaksanaan fasilitasi kebijakan tabungan perumahan.

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I yang mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise bidang pembiayaan perumahan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa, penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, serta fasilitasi dan layanan investasi perumahan.
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise bidang pembiayaan perumahan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan sekunder perumahan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan tabungan perumahan.

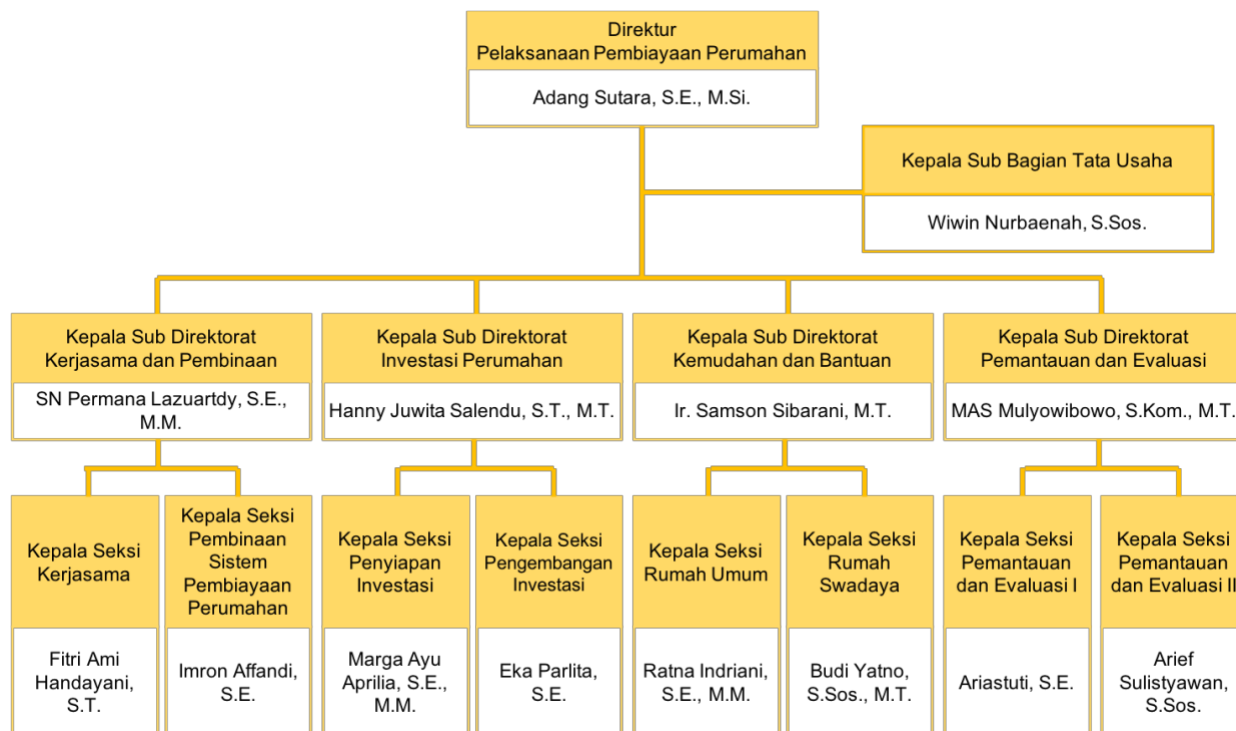
5) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah

dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan struktur organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

1.5. PROGRAM TEKNIS

Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai indikator untuk menilai keberhasilan dan ketercapaian dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Indikator Kinerja Program (IKP)

Indikator Kinerja Program terdapat di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 revisi ketiga yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. IKP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan MBR;
2. Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan;
3. Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan;
4. Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan;/
5. Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan
6. Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan

7. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan Serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan.

1.6. ISU STRATEGIS

①. Pemantapan Regulasi

- Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR.

②. Rancangan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan

- Penyempurnaan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- Dukungan penjaminan pembiayaan perumahan.
- Optimalisasi Dana Jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan.
- Kebijakan Pembiayaan Rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Penyelesaian pembayaran Subsidi Selisih Bunga (SSB).
- Kelanjutan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) setelah dana pinjaman Bank Dunia melalui *National Affordable Housing Program* berakhir.

③. Capaian Kemudahan dan/atau Bantuan

- Implementasi dan Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria MBR dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi MBR.

④. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

- Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tapera.
- Penyiapan konsep perangkat pendukung beroperasinya BP Tapera.
- Integrasi Program FLPP dan Tapera.

⑤. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

- Belum adanya praktik penyelenggaraan KPBU bidang Perumahan yang telah berjalan.
- Identifikasi potensi KPBU Perumahan pada aset milik Kementerian PUPR atau milik pemerintah daerah.
- Target pada Rencana Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 adalah penyediaan 55.000 unit hunian.

⑥. Dukungan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

- Sinergitas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
- Dukungan bank pelaksana dalam penyaluran bantuan dan kemudahan.
- Dukungan pengembang dalam penyediaan rumah bagi MBR.
- Kerja sama badan usaha perumahan dalam penyiapan KPBU.

⑦. Mitra Kerja Utama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

- Sinergitas dengan PPDPP, PT. SMF, dan BP Tapera sebagai mitra kerja utama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang dapat memberikan masukan terkait arah kebijakan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi MBR.

BAB

2

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini merupakan penjelasan mengenai Pagu, Rencana Anggaran, serta Capaian Realisasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

2.1.1. VISI

Visi dan misi penyelenggaraan pembiayaan perumahan didasarkan pada kondisi ideal dengan memperhatikan kondisi yang ada, potensi kapasitas yang dapat ditumbuhkembangkan, serta sistem nilai yang melandasi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Visi pembiayaan perumahan adalah

**“Mewujudkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang
berkelanjutan, efisien, dan akuntabel”**

2.1.2. MISI

Misi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi bidang pembiayaan perumahan adalah:

1. Mengembangkan skema - skema bantuan pembiayaan perumahan sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan MBR untuk menempati hunian yang layak;
2. Meningkatkan jumlah Lembaga keuangan yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan;
3. Mendorong pemanfaatan sumber - sumber pembiayaan, khususnya pembiayaan jangka panjang, sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan;
4. Mendorong dan meningkatkan investasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembiayaan perumahan.

2.1.3. TUJUAN

Tujuan pembangunan perumahan 2015 - 2019 bidang pembiayaan perumahan adalah meningkatkan daya beli dan aksesibilitas MBR ke lembaga - lembaga pembiayaan perumahan yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.

2.1.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembiayaan perumahan 2015 - 2019 bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

8. Terlaksananya penyusunan dan diseminasi norma, peraturan, dan kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
9. Meningkatnya jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan-pilihan skema pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat, dan berkelanjutan;

10. Terlaksananya dukungan dan fasilitasi pengembangan pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PPSP, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
11. Terlaksananya operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
12. Meningkatnya peran/partisipasi dan kapasitas LKB, LKBB, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembiayaan perumahan dengan tetap memperhatikan prinsip *good governance*;
13. Berkembangnya bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif; dan
14. Meningkatnya penempatan dana jangka panjang (dana haji, dana asuransi, dana pensiun, dana jaminan sosial, dan dana Tabungan Wajib Perumahan TNI/Polri) pada instrumen keuangan pembiayaan perumahan.

2.1.5. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembiayaan perumahan tahun 2015 - 2019, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
2. Terkait dengan KPR Rumah Umum yaitu:
 - a. Peningkatan penerbitan KPR-FLPP Rumah Umum untuk rumah tapak dan rumah susun;
 - b. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel.
3. Peningkatan peran Lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*financing*).
4. Operasionalisasi program Tapera, termasuk operasionalisasi BP Tapera, penerbitan peraturan pelaksana program, dan mendorong integrasi Tapera dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
5. Penempatan sumber dana, baik dana jangka panjang (dana haji, dana asuransi, dana jaminan sosial, dan dana TWP TNI/Polri) maupun dana KPBU pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan.
6. Peningkatan peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, khususnya melalui dorongan penerbitan obligasi daerah dan BLUD pembiayaan perumahan melalui sosialisasi, fasilitasi, advokasi, dan penyiapan kelembagaan.

2.1.6. STRATEGI

Strategi yang diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Sisi Permintaan (*Demand Side*)
 - a. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka mewujudkan pembiayaan perumahan yang murah, termasuk optimalisasi

- pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan dana jaminan sosial/pensiun;
- b. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
 - c. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumah secara swadaya;
2. Sisi Pasokan (*Supply Side*);
- a. Peningkatan keperluan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dengan sistem transportasi;
 - b. Peningkatan efisiensi lahan untuk penyediaan perumahan melalui *inclusive urban renewal* dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan;
 - c. Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman;
 - d. Pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan;
 - e. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR.
3. *Enabling Environment*;
- a. Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan;
 - b. Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan;
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - d. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

2.1.7. PROGRAM TEKNIS

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan ditetapkan **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** sebagai Program Teknis yang dilaksanakan.

Sasaran Program (*Outcome*) dari Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan adalah:

- I. Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 033)
- II. Menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07).

Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya *outcome* dari program tersebut. Penetapan indikator dilakukan

dengan kriteria - kriteria tertentu sehingga mudah diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. IKP program adalah sebagai berikut:

- I. Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR (indikator sasaran program I);
- II. Presentase perbandingan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (indikator sasaran program II).

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pertama dilakukan oleh Direktur Pola Pembiayaan Perumahan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani pada bulan Januari 2019 dengan sasaran, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Perjanjian Kinerja Pertama

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Materi teknis pengembangan pola pembiayaan perumahan	1) Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5 Materi Teknis
		2) Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	1 Materi Teknis 1 Rumusan NSPK
		3) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1 Materi Teknis
		4) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1 Materi Teknis
		5) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1 Materi Teknis
		6) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1 Materi Teknis
		7) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan
2	Rumusan rapermen pola pembiayaan perumahan	1) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1 Rapermen
		2) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1 Rapermen
		3) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1 Rapermen
		4) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1 Rapermen
3		1) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat	1 Laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat dan Layanan Perkantoran	2) Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan
4	Layanan Bantuan Pembiayaan	1) Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12 Bulan Layanan
		2) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Uang Muka (BA.999.07)	345.000 Rumah Tangga
		3) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Subsidi Selisih Bunga (SSB)	225.000 Rumah Tangga

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 kembali dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 12 Februari 2019 setelah terjadi restrukturisasi organisasi berdasarkan Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2019. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Perjanjian Kinerja Kedua (Revisi ke-1)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Materi teknis pengembangan pola pembiayaan perumahan	1) Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5 Materi Teknis / Dokumen
		2) Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2 NSPK
		3) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2 Materi Teknis
		4) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1 Materi Teknis
		5) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1 Materi Teknis
		6) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1 Materi Teknis
		7) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan
2	Rumusan rapermen pola pembiayaan perumahan	1) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1 Rapermen
		2) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1 Rapermen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		3) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1 Rapermen
		4) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1 Rapermen
3	Layanan bantuan pembiayaan perumahan	1) Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12 Bulan Layanan
		2) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312 Rumah Tangga
4	Layanan perkantoran	1) Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Pada Bulan November 2019, terdapat Revisi Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 karena adanya perubahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target Kinerja Perjanjian Kinerja Ketiga (Revisi ke-2)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1) Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	100%
		2) Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1 Jakstra
		3) Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Draft NSPK
		4) Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen
		5) Jumlah Penyiapan Investasi dan Duungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen
		6) Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1 Paket Pembiayaan
		7) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan Serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Laporan

Output Kegiatan pada Revisi Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-033.08.1.400812/2019 Revisi ke-4 tanggal 12 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Output Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Output Kegiatan	Target
Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan		
Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1) Tingkat Ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	100%
	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13 Materi Teknis
	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	4 Rapermen
	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.718 Rumah Tangga
	Layanan Perkantoran	1 Layanan (12 bulan)
	2) Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1 Jakstra
	Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan	1 Jakstra
	3) Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Draft NSPK
	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan dan Pembangunan Rumah Umum dan Swadaya	1 Draft NSPK
	4) Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen
	Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	0 Dokumen
	5) Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen
	Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Bidang Pembiayaan Perumahan	0 Dokumen
	6) Jumlah Paket Pembiayaan	1 Paket Pembiayaan
	Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Paket Pembiayaan
	7) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Laporan
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1 Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1 Laporan	

2.3. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yaitu dengan membandingkan target dengan realisasi pada masing - masing indikator kinerja untuk mendapatkan presentase capaian kinerja. Untuk mengidentifikasi dan intepretasi capaian kinerja, digunakan pengelompokan capaian kinerja yang dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 5. Kategori dan Interpretasi Capaian Kinerja

Warna	Nilai Angka	Intepretasi
	0 - 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan, dan perubahan yang sangat mendasar
	31 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
	51 - 65	Cukup (memadai), perlu perbaikan yang tidak mendasar
	66 - 75	Baik, perlu sedikit perbaik
	76 - 85	Sangat baik
	86 - 100	Memuaskan

2.4. TARGET 2019

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2019 menurut berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Target Renstra dan Target PK

No.	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Target Renstra	Target PK
SK 4.3.4.1: Tersedianya skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR			
1	Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	100%	100%
2	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1 Jakstra	1 Jakstra
3	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Draft NSPK	1 Draft NSPK
4	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen

No.	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Target Renstra	Target PK
6	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1 Paket Pembiayaan	1 Paket Pembiayaan
7	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan Serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Laporan	2 Laporan

Target output kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Target Output Kegiatan dalam Renstra

No	Output Kegiatan dalam Renstra	Target Renstra
1	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	10 Materi Teknis dan 1 Rumusan NSPK
2	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	4 Rapermen
3	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	12 Bulan Layanan, 312 Rumah Tangga
4	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	1 Jakstra
5	Pelaksanaan Investasi Perumahan	1 Paket Pembiayaan
6	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Draft NSPK
7	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Laporan
8	Layanan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	-
9	Layanan Perkantoran	12 Layanan

BAB

3

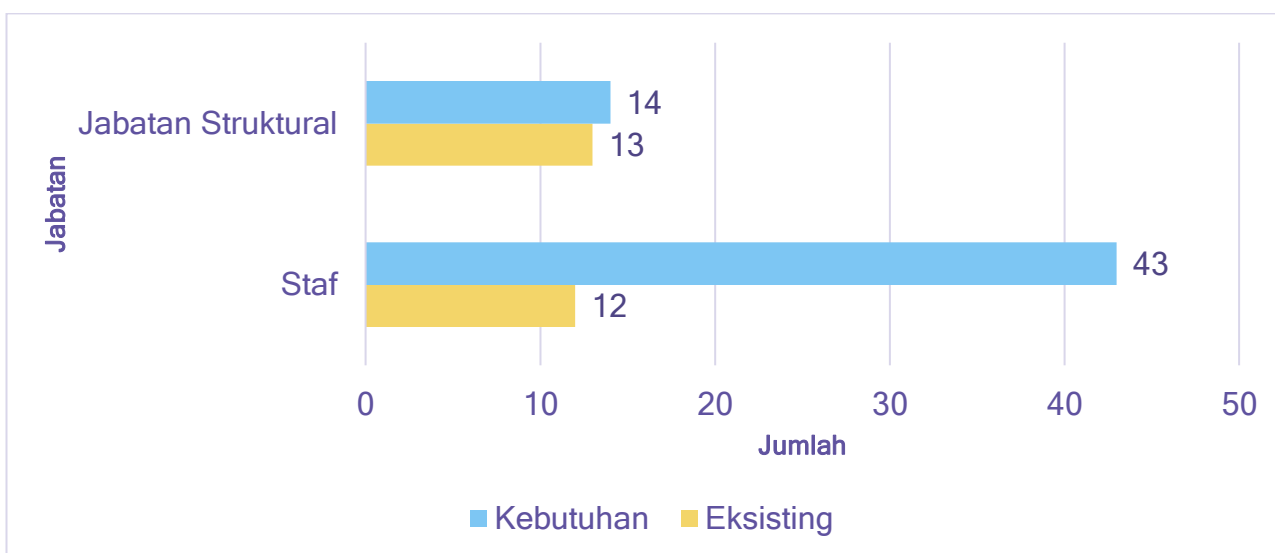
KAPASITAS ORGANISASI

Bab ini menguraikan pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bab ini juga menjelaskan potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

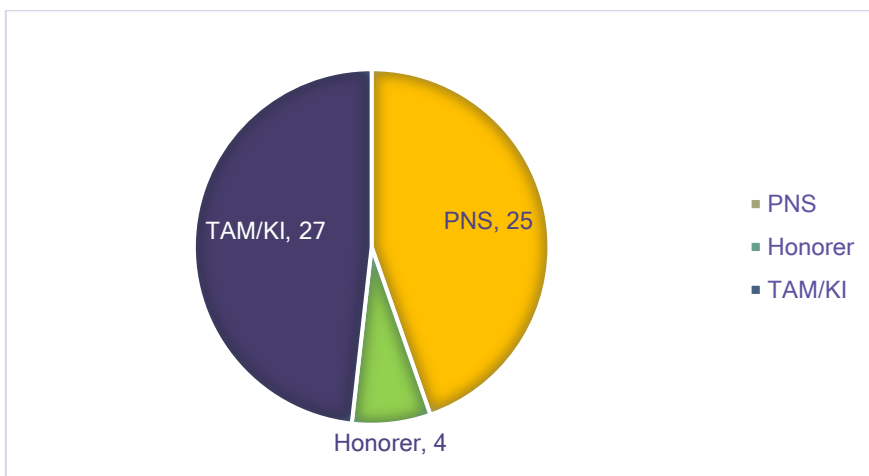
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

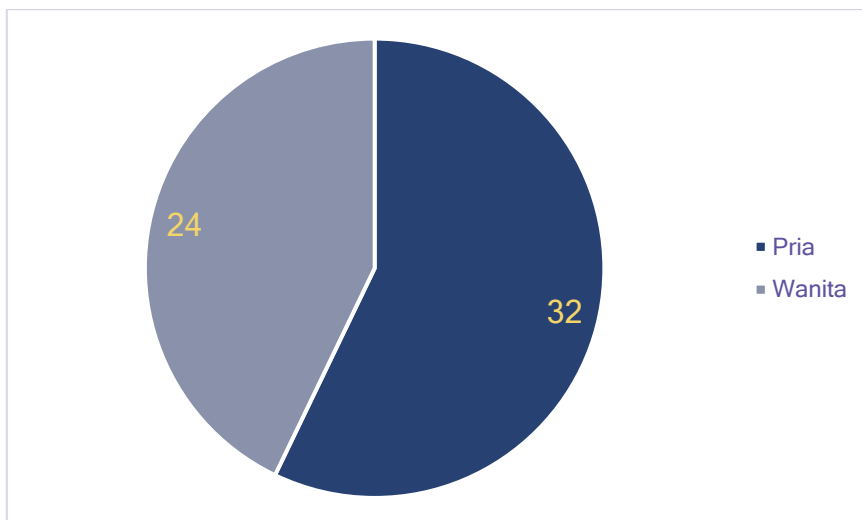
Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jumlah SDM turut mempengaruhi tercapainya kinerja yang telah direncanakan. Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 57 orang dengan komposisi 14 jabatan struktural dan 43 staf, saat ini hanya terisi 13 jabatan struktural, 6 staf PNS, dan 6 staf CPNS, sehingga kekurangan 1 orang untuk mengisi jabatan struktural dan 31 orang untuk mengisi kekurangan staf di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Kekosongan 1 (satu) pejabat struktural dikarenakan masa purnabakti yang bersangkutan pada Bulan Oktober 2019.



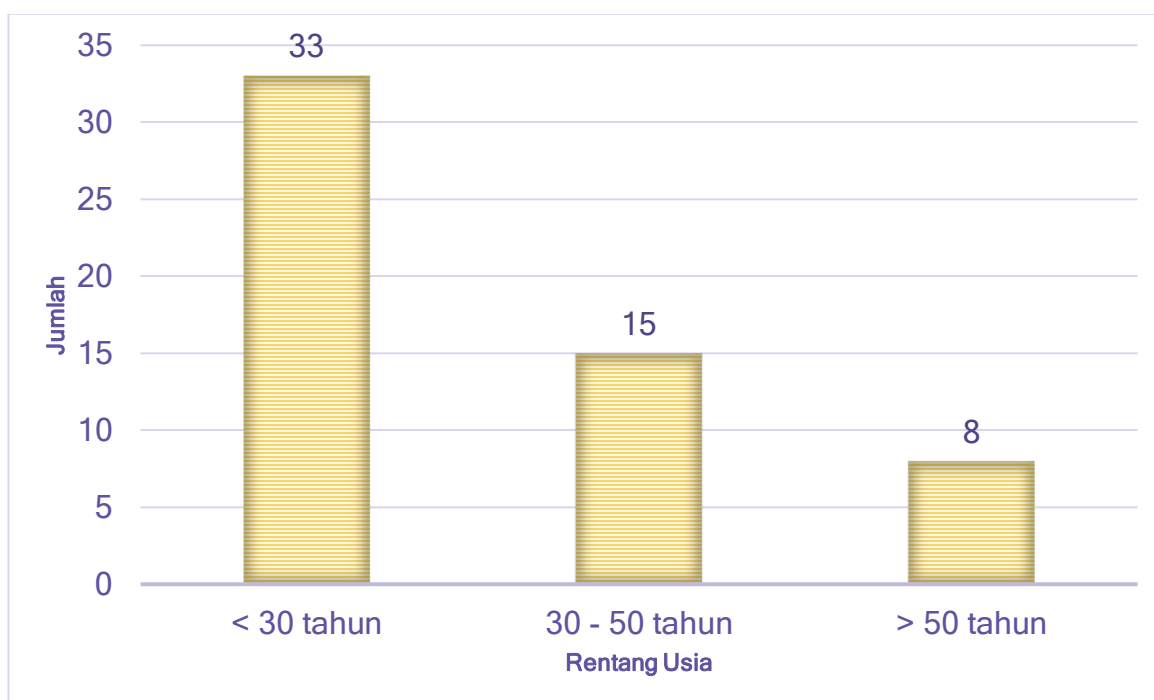
Gambar 2. Perbandingan Kebutuhan dan Eksisting Jumlah ASN



Gambar 3. Perbandingan Jumlah PNS, Honorer, dan TAM/KI

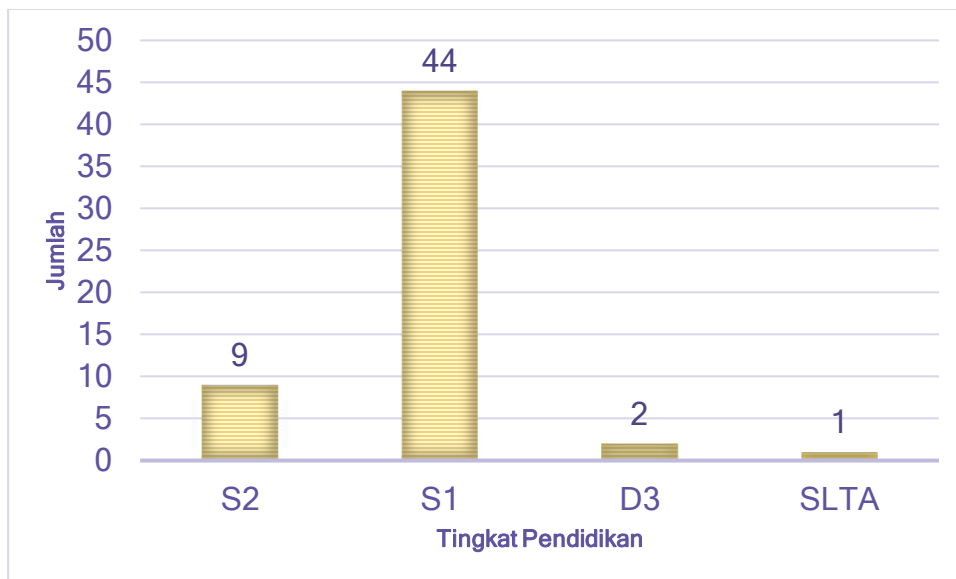


Gambar 4. Perbandingan Jumlah Pria dan Wanita



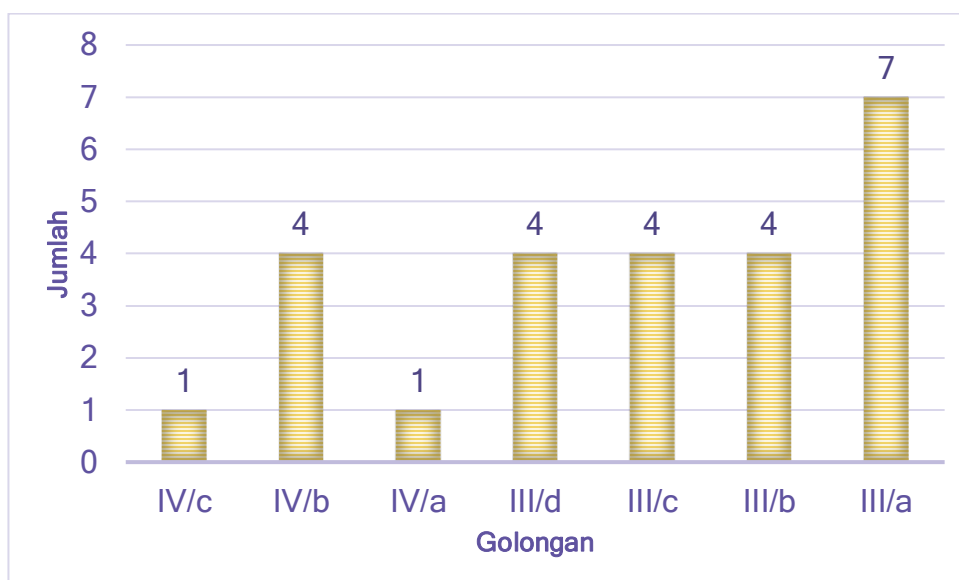
Gambar 5. Perbandingan Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rentang usia

Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan saat ini sebanyak 56 orang dengan komposisi 19 orang PNS, 6 orang CPNS, 4 orang Honorer, dan 27 orang Tenaga Ahli Muda / Konsultan Individual (TAM/KI). Sebanyak 24 orang adalah wanita dan 32 orang adalah pria dengan rentang usia <30 tahun sebanyak 33 orang, 30 - 50 tahun sebanyak 15 orang, dan >50 tahun sebanyak 8 orang.



Gambar 6. Perbandingan Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari SMA sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 44 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang.



Gambar 7. Perbandingan Golongan ASN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Komposisi golongan ASN di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebanyak 7 orang memiliki golongan III/a, sebanyak 4 orang dengan golongan III/b, dengan golongan III/c dan III/d masing - masing sebanyak 4 orang, sebanyak 1 orang dengan golongan IV/a, sebanyak 4 orang dengan golongan IV/b, dan 1 orang dengan golongan IV/c.

Tabel berikut adalah daftar nama pegawai PNS dan CPNS Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan:

Tabel 8. Daftar Nama Pegawai PNS dan CPNS

No	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Adang Sutara, S.E., M.Si.	196008011990031000	IV/c (Pembina Utama Muda)	Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
2	SN Permana Lazuardy, SE.,MM	197207052001121001	IV/b (Pembina Tingkat I)	Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
3	Hanny Junita Salendu,ST.,MT	196506121998022001	IV/b (Pembina Tingkat I)	Kepala Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan
4	Ir. Samson Sibarani,MT	196610181995031002	IV/b (Pembina Tingkat I)	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi
5	MAS Mulyowibowo, S.Kom, MT	196207281987021001	IV/b (Pembina Tingkat I)	Kepala Subbagian Tata Usaha
6	Wiwin Nurbaenah Amd., S.Sos	197409142009112001	III/c (Penata)	Kepala Seksi Kerja Sama
7	Fitri Ami Handayani, ST	198405142008022005	III/d (Penata Tingkat I)	Kepala Seksi Pembinaan Sistem
8	Imron Affandi, SE	198103022010121001	III/c (Penata)	Kepala Seksi Penyiapan Investasi
9	Marga Ayu Aprillia, SE.,MM	198404062008022004	III/d (Penata Tingkat I)	Kepala Seksi Pengembangan Investasi
10	Eka Parlita Dewi, SE	197602202009122001	III/c (Penata)	Kepala Seksi Kemudahan dan Bantuan Rumah Umum
11	Ratna Indriani, SE, MM	198409062009122002	III/d (Penata Tingkat I)	Kepala Seksi Kemudahan dan Bantuan Rumah Swadaya
12	Ariastuti, SE	198407182008022004	III/d (Penata Tingkat I)	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi I
13	Arief Sulistyawan, S. Sos	198504092010121003	III/c (Penata)	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi II
14	Johan Subekti, SH	198701132015021001	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Analisis Hukum
15	Retno Pudjiastuti, ST, M.Si	196310231985032003	IV/a (Pembina)	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

No	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
16	Tri Wahyuningsih, S.Kom	197803212014082001	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
17	Hariyadi Saputra, SE	198107312014021001	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Analisis Perbankan
18	Martha Samosir, SAP	197003262008122001	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Analisis Perbankan
19	Reina Rivenska Dissa, S.T.	199112012018022001	III/a (Penata Muda)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
20	Dody Kurnia Lumban Gaol, S.M	199511092019031005	III/a (Penata Muda)	Analisis Strategi Pembiayaan
21	Husni Muhammad Fakhruddin, S.H	199610162019301003	III/a (Penata Muda)	Analisis Investasi Pemerintah
22	Vanny Achyani, SE	199410162019302013	III/a (Penata Muda)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
23	Verawati, S.Tr.M	199502172019031006	III/a (Penata Muda)	Analisis Strategi Pembiayaan
24	Devi Setya Ardani, S.Tr.M	199609122019032001	III/a (Penata Muda)	Analisis Strategi Pembiayaan
25	Karina Apriani, SE	199504292019032013	III/a (Penata Muda)	Analisis Perencanaan dan Kerjasama

Tabel berikut adalah daftar nama pegawai Honorer dan TAM/KI Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tabel 9. Daftar Nama Pegawai Honorer dan TAM/KI

No	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	HONORER / TAM/KI
1	Raymond Panggabean, S.H.	Pria	Analisis Pembiayaan	Honorer
2	Almah Dani, S.Kom.	Pria	Penyusun Program dan Rencana Anggaran	Honorer
3	Agus Kurniawan, Amd.	Pria	Pengolah Data dan Informasi	Honorer
4	Taufik Saeful Aziz	Pria	Pramubakti	Honorer
5	Budiarti, B.Sc.	Wanita	Tenaga Ahli Dukungan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Lainnya melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam Pembiayaan Perumahan	TAM/KI
6	Taufiq Ardhan, S.T.	Pria	Tenaga Ahli Riviur Pendayagunaan Dana Jangka Panjang Investor Institusional dalam Pembiayaan Perumahan	TAM/KI

No	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	HONORER / TAM/KI
7	Tirsa Christina Maharani, S.T.	Wanita	Tenaga Ahli Penyusunan Alternatif Sumber Pembiayaan untuk Kredit Lahan dan Kredit Konstruksi bagi Bank Pelaksana KPR Sejahtera	TAM/KI
8	Hafidz Indra Pratama, S.H.	Pria	Ahli Muda Bidang Hukum	TAM/KI
9	Husni Tsaqib, S.H.	Pria	Tenaga Ahli Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Tabungan Perumahan	TAM/KI
10	Elma Aulia, S.H.	Wanita	Tenaga Ahli Penyusunan Perangkat Operasionalisasi Penyelenggaraan Tabungan Perumahan	TAM/KI
11	Anjar Resmala	Wanita	Ahli Muda Bidang Perencanaan	TAM/KI
12	Alfa Nehemia Chrisnes	Pria	Ahli Muda Bidang Ekonomi	TAM/KI
13	Yoggi Rizal	Pria	Ahli Muda Bidang Pembiayaan	TAM/KI
14	Faisal Aziz Ramadhan	Pria	Ahli Muda Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	TAM/KI
15	Marwan	Pria	Ahli Muda Bidang Hukum	TAM/KI
16	Reza Iman Kaustar	Pria	Ahli Muda Bidang Perumahan dan Permukiman	TAM/KI
17	Teguh Prayugo Kuserdian	Pria	Ahli Muda Bidang Perumahan dan Permukiman	TAM/KI
18	Dara Gustiani Purnama	Wanita	Ahli Muda Bidang Perencanaan	TAM/KI
19	M. Fiqri Fachreza	Pria	Ahli Muda Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	TAM/KI
20	Mohammad Anwar	Pria	Ahli Muda Bidang Ekonomi	TAM/KI
21	Hendi Hendarmin	Pria	Ahli Muda Bidang Ekonomi	TAM/KI
22	Jan Triawan Mohammad	Pria	Ahli Muda Bidang Informatika	TAM/KI
23	Adityo Hendratmo	Pria	Ahli Muda Bidang Informatika	TAM/KI
24	Alvika Rachma Putri	Wanita	Ahli Muda Bidang Ekonomi	TAM/KI
25	Ade Freegian Iryanata	Pria	Ahli Muda Bidang Manajemen	TAM/KI
26	Alfien Adrian Candra	Pria	Ahli Muda Bidang Statistika	TAM/KI
27	Fibrian Fajar Utomo	Pria	Ahli Muda Bidang Bangunan	TAM/KI
28	Hendrik Barita Saragih	Pria	Ahli Muda Bidang Hukum	TAM/KI
29	Stephanie Alfiah	Wanita	Ahli Muda Bidang Bangunan	TAM/KI
30	Asmida Laila Sari	Wanita	Ahli Muda Bidang Komputer	TAM/KI
31	Dea Priscilla Artdiani Rejeki	Wanita	Ahli Muda Bidang Perencanaan	TAM/KI

3.1.1. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SDM

Pada tahun 2019, sebanyak 27 ASN (PNS dan CPNS) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti selama 2019 oleh pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

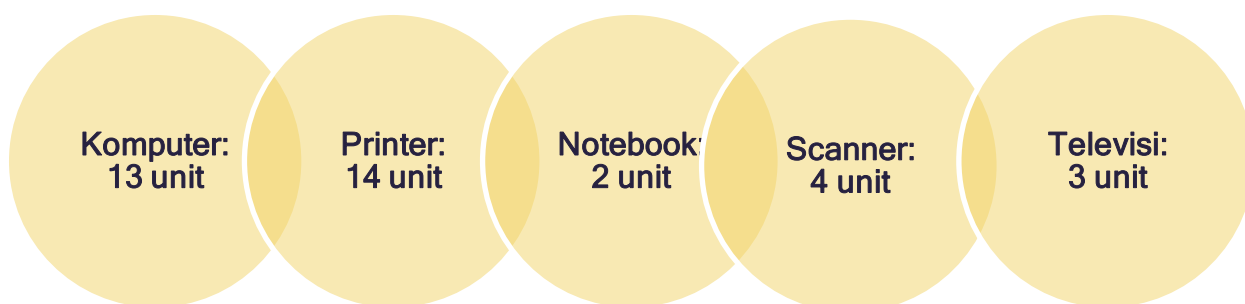
1. Diklat Kepemimpinan II;
2. Diklat Kepemimpinan IV;
3. Diklat Pelaksanaan Anggaran;
4. Diklat Sertifikasi APMG;
5. Diklat Pengelolaan BMN;
6. Diklat KPBU;
7. Diklat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
8. Magang Pelaksanaan KPBU di Bappenas.

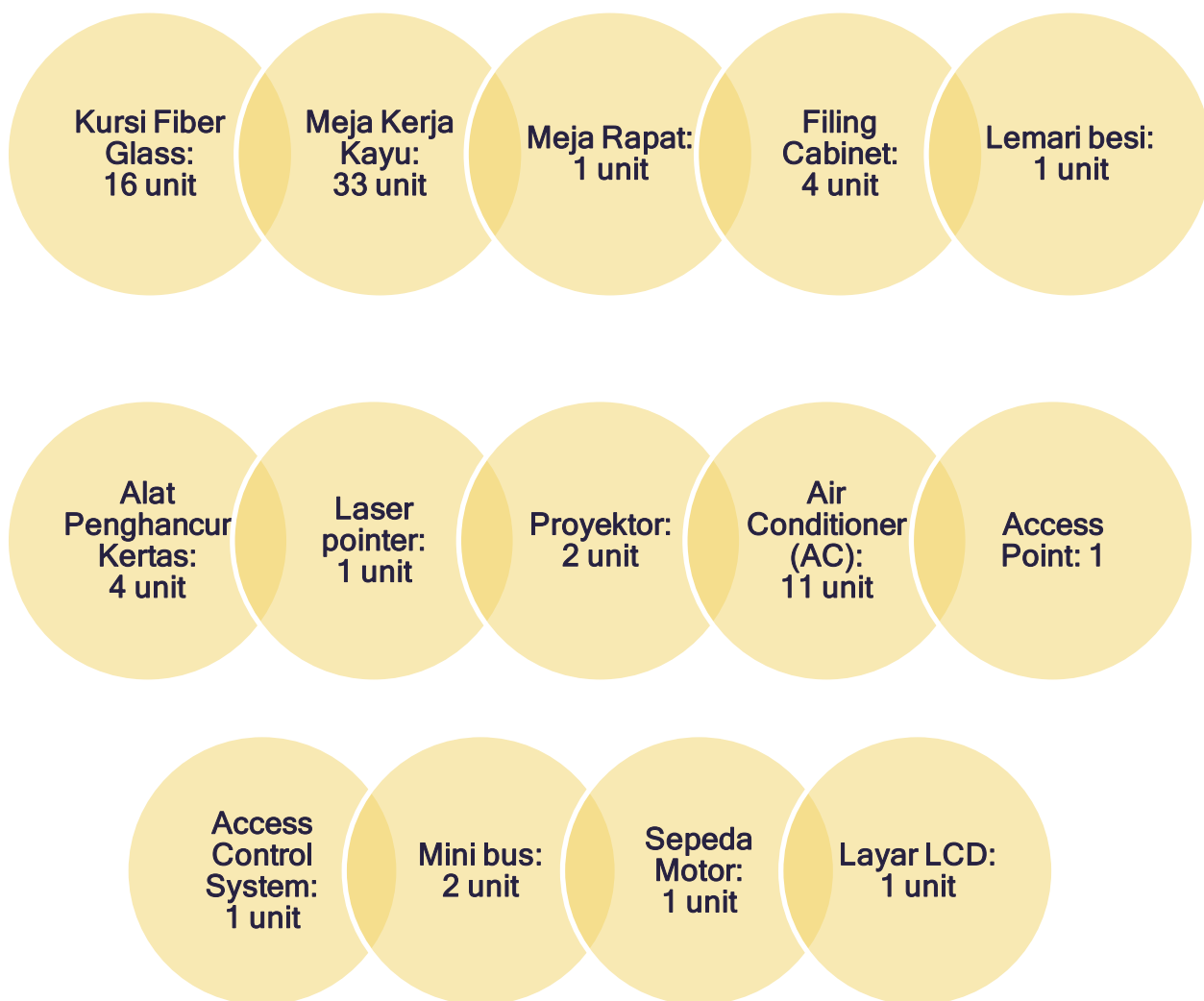
Sebanyak 6 (enam) CPNS mengikuti rangkaian Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan khusus kepada CPNS agar memiliki kapasitas dasar sebagai ASN dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Bela Negara;
2. Pelatihan Dasar;
3. Pengenalan Kelitbangan.

3.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Apa bila sarana dan prasarana tidak tersedia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan. Data berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Direktorat Pembiayaan Perumahan selama tahun 2019.





Gambar 8. Inventaris Sarana dan Prasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 dan BA.999.07. DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Nomor DIPA-033.08.1.400812/2019 mengalami revisi sebanyak 4 kali. Penerbitan pertama diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan anggaran sebesar **Rp 30.200.000.000,00** dan Rp 15.000.000.000,00 dari anggaran tersebut merupakan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Revisi ke-2 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan penambahan anggaran sebesar Rp 30.379.286.000,00 dan anggaran dengan sumber dana PHLN menjadi sebesar Rp 36.300.086.000,00 sehingga DIPA BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada revisi ke-2 menjadi **Rp 60.579.086.000,00**. Revisi ke-3 dilakukan pada tanggal 4 November 2019 dengan besar anggaran menjadi **Rp 59.394.086.000,00**. Revisi ke-4 dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat penambahan anggaran dengan sumber dana PHLN sebesar Rp 198.420.000.000,00 sehingga dana PHLN menjadi sebesar Rp 234.720.086.000,00 dan total anggaran BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2019 menjadi sebesar **Rp 257.814.086.000,00**.

BA.999.07 terdiri dari Subsidi Bunga Kredit Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 3.452.654.265.000,00 dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp 948.000.000.000,00.

Indikator Kinerja Kegiatan di dalam DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berbeda dengan Indikator Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang tertera di dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR. Indikator Kinerja yang tertera di dalam Rencana Strategis berorientasi *outcome* sedangkan pada DIPA berorientasi *Output Kegiatan*. Sehingga hubungan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam DIPA adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hubungan Target Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dalam Renstra, Output Kegiatan berdasarkan DIPA, dan Indikator Kinerja berdasarkan DIPA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Renstra)	Target	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Kinerja (DIPA) / Indikator Output Kegiatan (DIPA)	Target
Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1) Tingkat Ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	100%	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	01. Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5 Materi Teknis
				02. Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2 NSPK
				03. Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	3 Materi Teknis
				04. Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1 Materi Teknis
				05. Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1 Materi Teknis

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Renstra)	Target	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Kinerja (DIPA) / Indikator Output Kegiatan (DIPA)	Target
				06. Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1 Materi Teknis
				07. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan
			Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	08. Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1 Rapermen
				09. Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1 Rapermen
				10. Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1 Rapermen
				11. Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1 Rapermen
			Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	12. Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12 Bulan Layanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Renstra)	Target	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Kinerja (DIPA) / Indikator Output Kegiatan (DIPA)	Target
				13. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312 Rumah Tangga
			Layanan Perkantoran	14. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan
	2) Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1 Jakstra	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	01. Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1 Jakstra
	3) Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Draft NSPK	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	01. Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Draft NSPK
	4) Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	01. Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	0 Dokumen
	5) Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen	Pelaksanaan Investasi Perumahan	01. Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	0 Dokumen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Renstra)	Target	Output Kegiatan (DIPA)	Indikator Kinerja (DIPA) / Indikator Output Kegiatan (DIPA)	Target
	6) Jumlah Paket Pembiayaan	1 Paket Pembiayaan	Pelaksanaan Investasi Perumahan	01. Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1 Paket Pembiayaan
	7) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Laporan	Pemantuan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	01. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Inveasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Laporan

BAB

4

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2019.

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan kegiatan yang akuntabel memanfaatkan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah. Akuntabilitas diharapkan dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 - 2019. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan yaitu:

Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang tertera di dalam Renstra Kementerian PUPR 2015 - 2019 dan Perjanjian Kinerja, yaitu:

- ① Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
- ② Jumlah Perumahan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan;
- ③ Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan;
- ④ Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan;
- ⑤ Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan;
- ⑥ Jumlah Paket pembiayaan Perumahan;
- ⑦ Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

Tabel 11. Hubungan Indikator Kinerja dan Paket Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Kegiatan	Sub-output Kegiatan	Paket Kegiatan
Tersedinya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1) Tingkat Ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	Materi Teknis Pengembangan Pola pembiayaan Perumahan	NSPK Pola Pembiayaan Perumahan	1. Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat dan Penyaluran Subsidi Perumahan
				2. Penyusunan Tata Kelola Penilaian Kelayakan Bank
			Materi Teknis dan Laporan Kinerja Pengembangan Pola Pembiayaan	3. Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan
				4. Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
				5. Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi perumahan
				6. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Kegiatan	Sub-output Kegiatan	Paket Kegiatan
		Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan dan Investasi perumahan	1. Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan
				2. Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan
		Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	(Tanpa Sub-output)	1. Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan
				2. Penyaluran Bantuan Uang Muka yang Bersumber dari Pinjaman dan Hibah
		Layanan Perkantoran	(Tanpa Sub-Output)	1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
	2) Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	(Tanpa Sub-Output)	1. Perumusan Kebijakan dan Progran Pengembangan Pembiayaan
	3) Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau	(Tanpa Sub-Output)	1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Kegiatan	Sub-output Kegiatan	Paket Kegiatan
	Pembiayaan Perumahan	Bantuan Pembiayaan Perumahan		dan Pembangunan Rumah Umum dan Swadaya
	4) Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Investasi Perumahan	(Tanpa Sub-Output)	<i>Tidak ada Paket Kegiatan</i>
	5) Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	(Tanpa Sub-Output)	<i>Tidak ada Paket Kegiatan</i>
	6) Jumlah Paket Pembiayaan	Pelaksanaan Investasi Perumahan	(Tanpa Sub-Output)	1. Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan
	7) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	(Tanpa Sub-Output)	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan
				2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tingkat capaian kinerja Sasaran Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 mencapai 100% dari target / rencana yang telah diperjanjikan. Sasaran 1, Tingkat Ketersediaan Skema Pembiayaan Perumahan serta Terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR, mencapai 490% atau sebesar 390% lebih dari target rencana sasaran sebesar 100%.

Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja

No	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Unit	Target Renstra	Target PK	Capaian	Presentase Capaian (%)
SK 4.3.4.1: Tersedianya skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR						
1)	Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	%	100%	100%	490%	490%
2)	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Jakstra	1	1	1	100%
3)	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Draft NSPK	1	1	1	100%
4)	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Dokumen	1	1	0	0%
5)	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	1	1	0	0%
6)	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	Paket Pembiayaan	1	1	1	100%
7)	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan Serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Laporan	2	2	2	100%

Berikut ini akan diuraikan sasaran program / indikator kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang tertera di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja:

1) Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR

Sasaran Program / Indikator Kinerja tersebut mencakup Output Kegiatan berupa:

1. Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan;
2. Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan dan Investasi;
3. Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan, yang didalamnya mencakup:
 - i. Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan

- ii. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan uang muka yang bersumber dari Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);

4. Layanan Perkantoran.

Capaian masing - masing Output Kegiatan pada Sasaran Program / Indikator Kinerja “Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR” adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1

Sasaran Program (Outcome) / Indikator Kinerja 1					
Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR					
Target		Realisasi		Capaian (%)	
100 %		100%		490%	
No	Output Kegiatan	Unit	Target	Capaian	
				(unit)	(%)
1	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis	13	13	100%
2	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan dan Investasi	Rapermen	4	4	100%
3	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rumah Tangga	312	5,178	1659,62%
4	Layanan Perkantoran	Layanan (12 bulan)	1	1	100%

Output - output kegiatan di atas terdiri dari paket kegiatan sebagai berikut:

Tabel 14. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 1

No	Kode	Output Kegiatan / Paket kegiatan	Pagu (Rp ,00)
	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	6,800,000,000
	5317.001.001	NSPK Pola Pembiayaan Perumahan	1,300,000,000
1	051	Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat dalam Penyaluran Subsidi Perumahan	700,000,000
2	052	Penyusunan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Perumahan	600,000,000

No	Kode	Output Kegiatan / Paket kegiatan	Pagu (Rp ,00)
	5317.001.002	Masukan Teknis dan Laporan Kinerja Pengembangan Pola Pembiayaan	5,500,000,000
3	053	Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan	2,350,000,000
4	054	Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	2,300,000,000
5	055	Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	700,000,000
6	056	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja	150,000,000
	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	2,800,000,000
	5317.002.001	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan dan Investasi Perumahan	2,800,000,000
7	051	Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	2,100,000,000
8	052	Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	700,000,000
	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	244,920,086,000
	5317.003.001	Tanpa Sub Output	244,920,086,000
9	051	Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	15,200,000,000
10	052	Penyaluran Bantuan Uang Muka yang Bersumber dari Pinjaman dan Hibah	229,720,086,000
	5317.994	Layanan Perkantoran	1,100,000,000
	5317.994.001	Tanpa Sub Output	1,100,000,000
19	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,100,000,000

1.1. Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat

Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat merupakan kegiatan untuk melakukan Pengembangan Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Perumahan Dalam Mendukung Pemerataan Dan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan untuk memberikan masukan bagi perumusan Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020-2025. Masukan yang dimaksud adalah berupa satu perangkat arahan kebijakan dan gambaran program maupun kegiatan yang dipandang strategis untuk dicantumkan dalam Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2025, berdasarkan hasil analisis terhadap isu- isu, permasalahan, dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

1.2. Penyusunan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Perumahan

Kegiatan Penyusunan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Perumahan merupakan kegiatan untuk menyusun Tata Kelola Penilaian Kelayakan Bank Pelaksana dan Verifikasi Teknis Penyaluran KPR Bersubsidi agar mendapatkan tata laksana atau standar operasional pelaksanaan penyaluran KPR bersubsidi dengan tujuan tersedianya sistem operasional atau Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan penyaluran KPR Bersubsidi agar dalam pelaksanaan penyaluran KPR bersubsidi dapat terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis, tertib, transparan, dan akuntabel.

SOP yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. SOP Penyusunan Konsep Perjanjian Kerja Sama KPR Bersubsidi
2. SOP Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka KPR Sejahtera
3. SOP Pemabayaran Subsidi Bantuan Uang Muka KPR SSB/SSM
4. SOP Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan Bulan Pertama
5. SOP Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan Bulan Kedua dan Selanjutnya
6. SOP Pengelolaan Rekening SBUM Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
7. SOP Rekonsiliasi Data Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
8. SOP Pelaporan Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
9. SOP Pengecekan Dokumen, Fisik Bangunan Rumah dan PSU
10. SOP Pengembalian Subsidi

1.3. Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan

Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan meliputi:

- a) Pemetaan Kegiatan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Sektor Pembiayaan Perumahan
- b) Analisa Resisko Skema - Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi MBR
- c) Pengembangan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR
- d) Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Investasi Perumahan Tahun Anggaran 2020 - 2025

a) Pemetaan Kegiatan Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Sektor Pembiayaan Perumahan

Kegiatan Pemetaan Kegiatan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Sektor Pembiayaan Perumahan memiliki tujuan untuk menyusun agenda dan kerangka kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam rangka mencapai sasaran Rencana dan Strategi. Kegiatan

tersebut memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berjalan secara optimal dan menjamin seluruh kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat.

Ruang lingkup pelaksanaan paket kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Menyusun keterkaitan antara seluruh dokumen perencanaan dari tingkat nasional (RPJPN dan RPJMN), Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015 - 2019, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.
2. Menganalisis peraturan dan regulasi terkait pola pembiayaan perumahan serta menganalisis alokasi anggaran yang ada.
3. Melakukan analisis peran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.
4. Mengklasifikasikan dan mendeskripsikan seluruh kegiatan (kontraktual / swakelola) beserta kebutuhan anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.
5. Memberikan kesimpulan dan analisis sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

b) Analisa Resiko Skema - Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi MBR

Dalam rangka menganalisis skema - skema bantuan pembiayaan perumahan terhadap resiko yang akan dihadapi dalam perspektif fiskal sebagai langkah penyempurnaan yang berkelanjutan, maka paket kegiatan Analisis Resiko Skema - Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi MBR yang bertujuan untuk mendorong efektivitas program rumah terjangkau dari perspektif risiko fiskal.

Rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak lanjut penyelesaian pembayaran SSB sebesar Rp 3,7 T
2. Penyesuaian harga satuan SBUM sebagai subsidi tunggal dalam rangka meningkatkan volume bantuan kemudahan
3. Pengalokasian dana pendampingan *loan* untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebagaimana tercantum dalam *loan agreement* sebesar USD50.000.000 atau sebesar Rp 70 Milyar.

c) Pengembangan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR

Kegiatan Pengembangan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR dimaksudkan untuk memformulasikan suatu dukungan instrument pengembangan skema dan mekanisme kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi MBR yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menyediakan dukungan instrument pembiayaan dengan skema dan mekanisme kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi MBR.

Untuk meningkatkan efektivitas program bantuan pembiayaan perumahan terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan produk pembiayaan perumahan, baik yang eksisting dan usulan dengan segmentasi penerima berdasarkan penghasilan;
2. Mengurangi tumpang tindih produk bantuan pembiayaan perumahan dalam 1 (satu) segmentasi MBR;
3. Memperbesar nilai manfaat subsidi dalam 1 (satu) segmentasi MBR;
4. Menyesuaikan jangka waktu tenor bantuan pembiayaan perumahan sesuai dengan rekam jejak pengembalian kredit di lapangan yaitu sekitar \pm 10 tahun

d) Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Investasi Perumahan Tahun Anggaran 2020 - 2025

Kegiatan Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Investasi Perumahan Tahun 2020 - 2025 bertujuan untuk menyusun rencana dan strategi serta program dan kegiatan untuk pengembangan pola investasi perumahan tahun 2020 - 2024. Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan inovasi dalam pengembangan investasi perumahan
2. Mengidentifikasi tantangan dan isu terkait pengembangan investasi perumahan
3. Menyusun kerangka logis kebijakan pengembangan investasi perumahan
4. Menyusun indikasi program dan kerangka Evaluasi Pengembangan Investasi Perumahan

Tujuan dari kegiatan “Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Investasi Perumahan Tahun 2020 - 2025” ialah rencana dan strategi serta program dan kegiatan untuk pengembangan pola investasi perumahan tahun 2020-2025. Berdasarkan hasil analisis dan rumusan peta jalan (roadmap) yang telah dilakukan, didapatkan beberapa poin rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Program-program yang perlu ditindaklanjuti sebagai perwujudan rencana dan strategi pengembangan pola investasi perumahan ialah sebagai berikut :
 - Program Fasilitasi KPBU Perumahan dalam Pembangunan Rusunawa
 - Program Pengembangan skema investasi pembangunan rumah susun sewa selain APBN dan KPBU
 - Program pengembangan investasi rumah susun sewa bagi MBR yang terintegrasi dengan pengembangan TOD
 - Program Perumusan Pengelolaan Basis Data untuk pengembangan investasi perumahan (Lintas Unor)
 - Program Perumusan Segmentasi MBR untuk Skema Investasi Perumahan (KPBU dan Non-KPBU)
 - Program Pemetaan potensi lahan untuk investasi perumahan di kawasan/lokasi program prioritas nasional

- Program Fasilitas KPBU Perumahan di Kawasan/Lokasi Program Prioritas Nasional
 - Program Pengembangan konsep pengelolaan perumahan berbasis komunitas (Lintas Unor)
 - Program Pengembangan konsep Public-Private-People-Partnership (KPBUM) dalam investasi perumahan
 - Program Perumusan regulasi teknis pelaksanaan KPBU di sektor perumahan
 - Program Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan KPBU perumahan
 - Program Peningkatan Inisiatif Badan Usaha dalam KPBU Perumahan
 - Program Perumusan Kebijakan Insentif bagi Badan Usaha Pelaksana KPBU Perumahan
2. Inovasi yang dapat dilakukan dalam pengembangan investasi perumahan :
- Rumah umum sewa (rental public housing) dengan konsep pemindahan penghuni berdasarkan pengembangan keluarga/pendapatan
 - Pengembangan konsep Public Private People Partnership (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha-Masyarakat)
 - Locus investasi perumahan lebih baik ditargetkan pada lokasi-lokasi prioritas seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

1.4. Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan

Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan meliputi:

- a) Kajian Alternatif Penyesuaian Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan
- b) Penyusunan Materi Teknis Peningkatan Akses MBR Informal terhadap Pembiayaan Perumahan Berbasis Ekonomi Digital
- c) Penyusunan Pedoman Pengadaan Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Penyiapan Kelompok Sasaran

a) Kajian Alternatif Penyesuaian Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan

Kegiatan Kajian Alternatif Penyesuaian Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan adalah memberikan alternatif kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan kepemilikan satuan rumah susun yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam rangka bantuan kepemilikan rumah bagi MBR.

Dari kegiatan Kajian Alternatif Penyesuaian dan Penyelesaian Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan didapati:

1. Kinerja penyaluran KPR SSB/SSM sudah baik dalam hal memberikan kemudahan dan/ bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

2. Kelemahan dalam skema subsidi bunga kredit perumahan yang saat ini dijalankan adalah subsidi bunga yang di tanggung APBN sepanjang tenor KPR yaitu selama 20 Tahun sehingga berpotensi menjadi beban fiskal pemerintah kedepannya.
3. Terdapat beberapa alternatif penyelesaian pembayaran subsidi bunga kredit perumahan yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan cara mengkonversikan ke dalam Present Value, melanjutkan skema yang sedang berjalan dengan melakukan pembayaran tahunan selama 20 Tahun atau melakukan konversi ke dalam Present Value dengan tenor 5 tahun;
4. Keputusan untuk melakukan pelunasan pembayaran subsidi bunga kredit perumahan dengan nilai present value memiliki peluang yang sangat kecil karena akan memberatkan APBN satu tahun.

b) Penyusunan Materi Teknis Peningkatan Akses MBR Informal terhadap Pembiayaan Perumahan Berbasis Ekonomi Digital

Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Peningkatan Akses MBR Informal terhadap Pembiayaan Perumahan Berbasis Ekonomi Digital bertujuan untuk memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR yang memiliki pekerjaan informal melalui ekonomi digital agar dapat mempermudah dalam memiliki rumah yang layak huni.

Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Peningkatan Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah Informal Terhadap Pembiayaan Perumahan Berbasis Ekonomi Digital didapatkan hasil sebagai berikut:

1. BukaLapak telah melakukan beberapa kolaborasi dengan pemerintah melalui “Bersama Pemerintah Membangun Indonesia” membuat menu seperti BukaKota, BukaBike, BukaPublik, Cashless Payment, BukaPengadaan, Penggerak Pelapak, Komunitas Bukalapak, Mitra Bukalapak, BukaGlobal, dan BukaPajak. Dengan menu-menu tersebut pemerintah dapat mengakses dan memudahkan masyarakat serta memanfaatkan peluang yang disediakan oleh perusahaan Startup maupun pemerintah;
2. Bukalapak akan memberikan Database dan mitra-mitra/pelapak sehingga pemerintah mendapatkan informasi untuk menysasar ke Masyarakat Sektor Informal dalam memenuhi penyaluran pembiayaan perumahan;
3. Bukalapak telah menawarkan skema kerjasama antara KemenPUPR, Bukalapak dan Bank untuk Pelaksanaan Melalui “BukaRumah”.

c) Penyusunan Pedoman Pengadaan Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Penyiapan Kelompok Sasaran

Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengadaan Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Penyiapan Kelompok Sasaran bertujuan untuk menyiapkan panduan untuk mendampingi masyarakat memiliki rumah layak huni yang menysasar untuk dapat merumuskan peran, fungsi, dan kompetensi Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Penyiapan Kelompok Sasaran Pembiayaan Perumahan, menyiapkan bahan/data/informasi sebagai rujukan penyusunan pedoman,

menyusun panduan pelatihan/pembekalan kepada Tenaga Penggerak Masyarakat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelajaran.

Hasil dari kegiatan Penyusunan Pedoman Pengadaan Tenaga Penggerak Swadaya Masyarakat dalam Penyiapan Kelompok Sasaran Pembiayaan Perumahan perlu diujicobakan sebelum pedoman tersebut disahkan menjadi sebuah peraturan.

1.5. Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan

Kegiatan Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan merupakan kegiatan untuk membuat Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomi dalam Penyelenggaraan KPBU Perumahan yang dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan panduan dalam mengkaji kelayakan ekonomi proyek KPBU di bidang perumahan yang bertujuan untuk memberikan panduan atau *toolkit* dalam perhitungan kuantitatif Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) pada proyek KPBU di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan pada Permen PPN Nomor 4 tahun 2015.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membuat Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomi dalam Penyelenggaraan KPBU Perumahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Infrastruktur perumahan yang dapat dilaksanakan secara KPBU meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa.
2. Kelayakan ekonomi untuk proyek KPBU yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan KPBU (Permen PPN 4/2015 dan Permen PUPR 21/2018) merupakan bagian dari Kajian Ekonomi dan Komersial yang kelayakannya dikaji dengan menggunakan metode Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS). ABMS adalah metode untuk mengukur nilai kontribusi sosial dan ekonomi dari proyek terhadap masyarakat dan Negara secara keseluruhan.
3. Tahapan ABMS yang digunakan untuk menghitung kelayakan ekonomi dari rencana penyediaan infrastruktur secara sederhana dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu sebagai berikut:
 - Identifikasi manfaat;
 - Identifikasi biaya;
 - Konversi dari nilai finansial menjadi nilai ekonomi;
 - Evaluasi kelayakan;
 - Analisis sensitivitas.
4. Dampak manfaat ekonomi sosial yang diperhitungkan dalam model ABMS ini adalah sebagai berikut:
 - Selisih biaya tempat tinggal;
 - Selisih biaya transportasi;
 - *Land consolidation value*;

- Penyerapan tenaga kerja;
 - Penerimaan negara;
 - Nilai residu tempat tinggal eksisting.
5. Biaya yang diperhitungkan terdiri dari biaya penyiapan, biaya modal, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya-biaya lain yang mungkin ditimbulkan dari adanya proyek.
 6. Faktor konversi digunakan untuk mengkonversi nilai finansial menjadi nilai ekonomi yang dimaksudkan untuk merefleksikan nilai ekonomi sesungguhnya dari barang dan jasa setelah penyesuaian atas efek intervensi pemerintah dan distorsi struktur pasar.
 7. Kelayakan ekonomi dievaluasi dengan menggunakan parameter sebagai berikut:
 - *Economic Internal Rate of Return* (EIRR);
 - *Economic Net Present Value* (ENPV);
 - *Benefit Cost Ratio* (BCR)
 8. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan KPBU terhadap tingkat kelayakan ekonomi.

1.6. Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan

Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan terdiri dari paket pekerjaan:

- a) Penyempurnaan Skema Pembiayaan Mikrot Perumahan Berbasis Tabungan
- b) Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya secara Berkelompok

a) Penyempurnaan Skema Pembiayaan Mikro Perumahan Berbasis Tabungan

Pekerjaan Penyempurnaan Skema Pembiayaan Mikro Perumahan Berbasis Tabungan untuk menyempurnakan skema bantuan pembiayaan mikro perumahan berbasis tabungan untuk memberikan kemudahan bagi MBR memperoleh rumah layak huni. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi aspek - aspek yang terkait dengan implementasi penyempurnaan skema bantuan pembiayaan mikro perumahan berbasis tabungan baik dari sisi pemerintah (pusat dan daerah), Lembaga Keuangan, dan MBR sebagai penerima manfaat (*beneficiary*).

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyempurnaan Skema Pembiayaan Mikro Perumahan Berbasis Tabungan mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Bantuan pembiayaan mikro adalah sistem pembiayaan perumahan yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah menyelenggarakan perumahan secara swadaya, baik untuk pembangunan rumah baru maupun untuk perbaikan rumah.
2. Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk rumah swadaya meliputi pembiayaan untuk perbaikan rumah swadaya dan pembangunan baru di atas tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas.
3. Dalam hal meningkatkan keterjangkauan, MBR dapat memberikan kontribusi yang diperhittingkan sebagai modal sendiri berupa kredit/pembiayaan Rumah Swadaya. Kontribusi MBR dapat berupa uang, tenaga kerja, dan/atau bahan bangunan serta berupa

tanah yang dapat diperhitungkan sebagai modal sendiri untuk memperoleh kredit / pembiayaan Rumah Swadaya.

4. Beberapa tantangan di dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan mikro di antaranya:
 - Pendefinisian target kelompok sasaran yang spesifik dan tepat
 - Ketersediaan dan Kualitas fasilitator untuk memberikan pendampingan dalam pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan peruntukan;
 - Sistem pengawasan dari lembaga keuangan yang menyalurkan dana bantuan
 - Ketepatan waktu untuk membayar angsuran serta kemampuan mengangsur debitor
 - Harus membentuk ekosistem penyaluran KPR mikro yang sehat terlebih dahulu dengan identifikasi kelembagaan institusi yang akan menyalurkan dana bantuan yang sehat (Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank) sesuai yang ditetapkan oleh OJK
 - Ketersediaan sistem TIK yang handal dan real time serta penguatan monitoring dan evaluasi yang berkala
 - Debitur harus berada di dalam komunitas yang saling mengenal karakter satu sama lain dan memiliki hubungan yang akrab

b) Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya secara Berkelompok

Kegiatan Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya secara Berkelompok merupakan kegiatan menciptakan program bantuan pembiayaan untuk pembangunan rumah secara swadaya yang tepat guna sesuai kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan rumusan kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan rumah swadaya dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan akses kemudahan pembiayaan yang terjangkau bagi MBR sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan program pembiayaan rumah swadaya. Berdasarkan analisis dan kajian Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya secara Berkelompok maka dapat disimpulkan bahwa:

- A. Berdasarkan inventarisasi kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan rumah swadaya dalam BP2BT, didapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sementara dalam BP2BT yang merupakan program baru masih dibutuhkan penyempurnaan kebijakan untuk relisasi program yang lebih baik
- B. Permasalahan yang sering muncul terkait kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan rumah swadaya BP2BT adalah sebagai berikut:
 - a. Penyaluran dana bantuan yang masih terfokus pada MBR pekerja sektor formal yang berpenghasilan tetap;
 - b. Masih lemahnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di lingkungan pemerintahan;

- c. Tidak adanya pembiayaan atau pendanaan alternatif yang berpeluang dapat mendukung program pembiayaan rumah swadaya;
- d. Keterbatasan akses terhadap informasi (perijinan, persyaratan, dan perencanaan), bahan bangunan, dan teknologi;
- e. Kurang optimalnya pendampingan masyarakat oleh Tenaga Pendukung Penyaluran (TPP);
- f. Masih terbatasnya kepemilikan tanah dengan status alas hak yang sah yang menghambat penyaluran bantuan pembiayaan rumah swadaya;
- g. Budaya masyarakat untuk menabung masih rendah; dan
- h. Kurangnya peran kelompok masyarakat/ komunitas dalam mendukung program.

1.7. Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan

Kegiatan Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan merupakan kegiatan Penyusunan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, pelaku pembangunan, dan badan usaha dalam pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun.

Rumusan Rapermen SPM Pengelolaan Rumah Susun bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan rumah susun dapat memenuhi pelayanan dasar yang sesuai dengan fungsi persyaratan Keselamatan, Kenyamanan, Kemudahan dan Kesehatan.

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun adalah

- a. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun;
- b. Tersusunnya Naskah Akademik untuk Rumusan Rancangan Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun; dan
- c. Tersusunnya Rancangan Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun.

Urgensi penyusunan standar pelayanan minimal pada pengelolaan rumah susun Berdasarkan Pasal 80 huruf f Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yaitu menyebutkan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam hal ini difokuskan pada pelayanan publik bidang perumahan khususnya dalam pengelolaan Rumah Susun. Selain itu, Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, belum mengatur Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat khususnya Rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang diatur hanya

Standar pelayanan minimal Perumahan Rakyat untuk Daerah (Provinsi, Kab/Kota) sesuai amanat dari Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu berfokus pada Standar pelayanan minimal perumahan rakyat untuk rehabilitasi rumah korban bencana dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bidang Perumahan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan bahwa dalam proses Penyiapan Kajian Pra Studi Kelayakan perlu memuat kajian teknis yang berisi Standar Pelayanan Minimal. Sehingga, Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun memiliki urgensi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun secara umum maupun dalam proyek KPBU. Dengan begitu, penyusunan peraturan ini dalam konteks proyek KPBU adalah menjadi acuan dan penentuan kriteria pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*) dalam penyelenggaraan rumah susun dengan menggunakan skema KPBU yang selanjutnya disebut dengan *Service Level Agreement* (SLA). SLA adalah Perjanjian kerjasama/kontrak jasa layanan umum (sektor pemerintah) kepada pihak mitra/badan usaha.

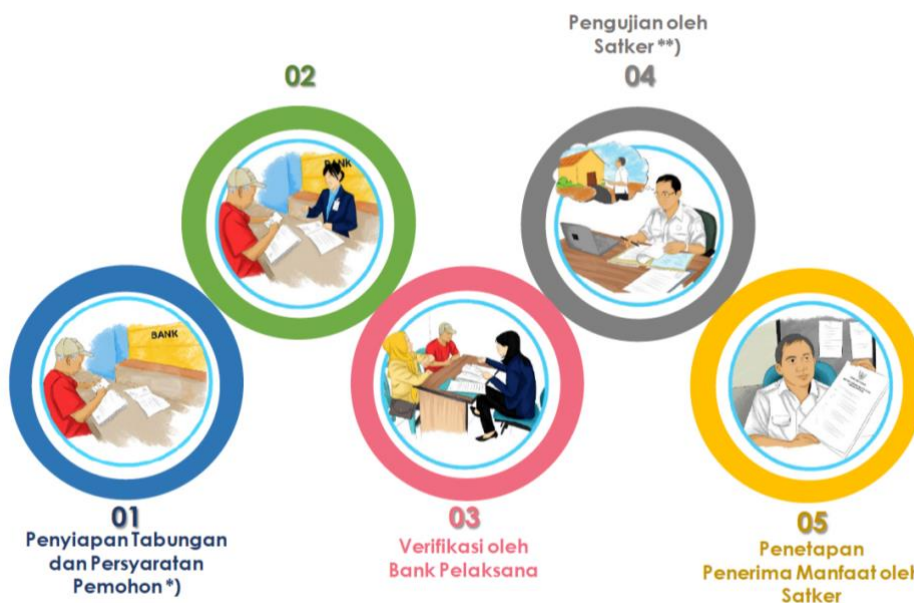
Penyusunan rumusan rapermen standar pelayanan minimal pada pengelolaan rumah susun ini meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan bagian bersama dan tanah bersama. Materi muatan SPM ini terdiri dari subtansi pelayanan, indikator, cakupan/lingkup, tolok ukur dan sasaran pelayanan. Dengan subtansi yang terdiri dari Bangunan rumah susun, prasarana, sarana, utilitas, dan pelayanan non fisik. Pelayanan non fisik meliputi pelayanan penghunian, pelayanan keamanan, pelayanan kebersihan, dan pelayanan perawatan, pemeliharaan dan perbaiki.

1.8. Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah memiliki tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana berupa potongan harga rumah hingga Rp 40.000.000,00. BP2BT merupakan program pembiayaan perumahan yang termasuk di dalam *National Affordable Housing Program* (NAHP) yang merupakan program inisiasi Kementerian PUPR yang bekerja sama dengan Bank Dunia. BP2BT berfokus pada pembangunan hunian di wilayah perkotaan dengan anggaran sebesar US\$ 205.000.000 atau sekitar Rp 2.800.000.000,00 untuk pembangunan 73.835 unit.

Komponen utama BP2BT adalah Dana Masyarakat dengan jumlah minimal 5% dari nilai rumah atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan saldo minimal Rp 2.000.000,00 hingga Rp

5.000.000,00, dana BP2BT sebesar 45% dari nilai rumah dengan batasan maksimal bantuan Rp 40.000.000,00, dan KPR dengan kredit / pembiayaan bank \geq 50% dan suku bunga pasar dengan batasan maksimal sebesar SUN 10 tahun + Marjin.



Gambar 9. Proses Penyaluran Dana BP2BT

Proses penyaluran Dana BP2BT dimulai dari masyarakat yang berminat mengajukan BP2BT menyiapkan tabungan dan persyaratan pemohon, kemudian peminat BP2BT diverifikasi oleh Bank Pelaksana dan daftar peminat yang lulus verifikasi ditetapkan oleh bank dan dikirimkan kepada Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja (Satker) BP2BT. Kemudian Satker melakukan pengujian BP2BT dan menetapkan penerima manfaat.

2) Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Sasaran Program / Indikator Kinerja tersebut terdapat di dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan output kegiatan berupa Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Tabel 15. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2

Sasaran Program (Outcome) / Indikator Kinerja 2					
Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan					
Target		Realisasi		Capaian (%)	
1 Jakstra		1 Jakstra		100%	
No	Output Kegiatan	Unit	Target	Capaian	
				(unit)	(%)

1	Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Jakstra	1	1	100%

Tabel 16. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 2

No	Kode	Output Kegiatan / Sub-Output / Paket kegiatan	Pagu (Rp ,00)
	5317.004	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	434,000,000
	5317.004.001	Tanpa Sub Output	434,000,000
1	053	Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan	434,000,000

Output kegiatan tersebut merupakan paket kegiatan Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dengan pagu sebesar Rp 434.000.000,00 yang mencakup kegiatan Penyusunan Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan yang dimaksudkan adanya identifikasi proyek KPBU Bidang Perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Kerjasama Pemerintah dengan swasta sebenarnya telah dikenal sejak masa Orde Baru seperti pada jalan tol dan ketenagalistrikan, namun mulai dikembangkan tahun 1998 pasca krisis moneter. Setelah didahului dengan beberapa peraturan pendukung KPBU, maka untuk menyesuaikan PPP terkini dunia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU.

KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, persiapan, dan transaksi. Pada tahap perencanaan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD menyusun rencana anggaran dana, Identifikasi, pengambilan keputusan, penyusunan Daftar Rencana KPBU. Output tahap perencanaan adalah daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang

disampaikan pada Kementerian PPN/BAPPENAS untuk disusun sebagai Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Selanjutnya dalam tahap penyiapan KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD selaku PJPK dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU. Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK dan terdiri atas peninjauan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya.

Berikut analisis dari kegiatan Subdirektorat Kerjasama dan Pembinaan dalam perwujudan KPBU:

1. Identifikasi dengan pendekatan Pengembang TOD BUMN 2020 - 2024

Strategi penyediaan *landbank* dengan potensi pengembangan:

- WIKA, Perumnas dan PP memiliki sekitar 2.200 ha *landbank*, yang akan di konsolidasi ke Holding
- Jumlah tersebut cukup untuk kebutuhan sampai dengan 2020, namun untuk kedepannya, Holding hatuus mengakuisisi tanah baru atau kerjasama dengan BUMN / Agen Pemerintah
- Kebanyakan lokasi berdekatan dengan jalur perkeret a apian, sehingga menciptakan potensi pengembangan TOD
- Kondisi saat ini, KAI berkolaborasi dengan Perumnas dan BUMN Karya dalam penyediaan TOD MBR di Jakarta
- Mayoritas berada di area pelabuhan Gresik, yang tidak cocok untuk perumahan. Namun, masih terdapat potensi kerjasama, dimana Polri sudah membentuk beberapa *joint venture* dan menyewakan lahan ke pihak swasta.
- PT Bumi Serpong Damai, dimiliki oleh Sinarmas Group, memiliki *land bank* terbesar untuk semua pemain swasta
- Tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan yang tersebar diseluruh Indonesia
- Tanah ini dapat diakuisisi apabila seluruh proses hukum terselenggara
- Group PTPN memiliki lahan di Kawasan suburban dengan potensi perkebunan
- Beberapa lokasi lahan cocok untuk di kembangkan Kawasan dan WIKA sudah bekerjasama untuk pengembangan dengan PTPN

Rencana Pembentukan Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan, proyeksi ekuitas balance sheet capacity) akan bertumbuh (CAGR) sebesar 19,5% apabila masing-masing BUMN berjalan "as is" tanpa adanya Holding, namun setelah adanya Holding pertumbuhan (CAGR) ekuitas diperoyeksikan sebesar 24,8%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Holding mampu meningkatkan kemampuan BUMN-BUMN sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan dalam penyediaan MBR dengan melakukan pengembangan daerah *Transit-Oriented Development*.

- Rencana Pengembangan TOD Stasiun Kereta Api
 - Rencana Pengembangan TOD MRT dan Transjakarta
 - Rencana Pengembangan TOD LRT
 - Rencana Pengembangan TOD Jalan Tol Trans Sumatera
2. Identifikasi dengan Potensi Perumahan Pendukung KEK

Potensi perumahan pendukung KEK dapat dilakukan baik didalam lingkungan KEK maupun dilokasi sekitar KEK. Di beberapa Masterplan KEK, sudah tersedia zonasi yang diperuntukkan bagi perumahan pekerja. BUPP KEK Sei menginformasikan saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyediakan lahan sekitar 2 Ha berjarak 1 km dari kawasan KEK di Kabupaten Simalungun untuk dibangun rusunawa guna mendukung KEK Sei Mangkei.

3. Strategi Penyediaan Perumahan Pembangunan Ibukota Negara Baru

Kebutuhan hunian Ibukota Negara Baru meliputi:

- VVIP : Istana kepresidenan
- VIP : 352 unit rumah tapak untuk Paspampres, Lembaga Tinggi Negara (MPR/DPR/DPD/MA/MK), Lembaga Tertentu (Kapolri/Panglima/BIN, dll) dan Menteri/Kepala Lembaga setingkat Menteri.
- ASN/TNI/POLRI : 220.858 unit terdiri dari rumah tapak 2 lantai untuk pejabat eselon I dan II serta rumah susun untuk Eselon III, IV dan Staf.
- Pelaku ekonomi : 86.669 unit rumah susun.

Kebutuhan biaya dalam pembangunan perumahan di Ibukota Negara baru adalah sebesar Rp 215 Triliun dengan skema pembiayaan perumahan sebagai berikut:

- Melalui APBN sebesar Rp 38 Triliun atau sebanyak 17,7% dari biaya keseluruhan
- Melalui KPBU sebesar Rp 92 Triliun atau sebanyak 42,8%
- Melalui KSP sebesar Rp 85 Triliun atau sebesar 39,5%

4. Arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam pelaksanaan KPBU Bidang Perumahan yang dikelola oleh KemenPUPR harus lebih fokus kepada lahan yang merupakan pengelolaan BMN KemenPUPR bukan lahan milik daerah. Berdasarkan identifikasi awal, terdapat 35 lokasi tanah yang dikelola oleh Bagian Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk KPBU Bidang Perumahan;

Tanah Negara yang dikembangkan menjadi lahan KPBU Bidang Perumahan perlu memperhatikan lokasi lahan yang strategis, sehingga dapat menjadi prioritas sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah. Dalam hal menindaklanjuti 35 lokasi tanah yang akan dimanfaatkan menjadi KPBU perlu dikoordinasikan terlebih dahulu

kepada bagian BMN SEKJEN PUPR sebelum ditetapkan dan dilaporkan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai tambahan informasi, lahan yang disampaikan oleh bagian pengelolaan BMN masih akan bertambah dengan adanya penyerahan asset dari Badan Usaha.

3) Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Tabel 17. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 3

Sasaran Program (Outcome) / Indikator Kinerja 3					
Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan					
Target		Realisasi		Capaian (%)	
1 Draft NPSK		1 Draft NSPK		100%	
No	Output Kegiatan	Unit	Target	Capaian	
				(unit)	(%)
1	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Umum dan Pembangunan Rumah Swadaya.	Draft NSPK	1	1	100%

Tabel 18. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 3

No	Kode	Output Kegiatan / Sub-Output / Paket kegiatan	Pagu (Rp ,00)
	5317.006	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	500,000,000
	5317.006.001	Tanpa Sub Output	500,000,000
1	051	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan	500,000,000

Sasaran Program / Indikator Kinerja Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan tertera di dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan output kegiatan berupa Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Umum dan Pembangunan Rumah Swadaya. Output kegiatan

tersebut merupakan paket kegiatan dengan pagu sebesar Rp 500.000.000,00 yang mencakup Pemetaan Pola Subsidi Perolehan dan Pembangunan Rumah bagi MBR.

Pekerjaan Pemetaan Pola Subsidi Perolehan dan Pembangunan Rumah bagi MBR adalah untuk tersedianya pemetaan atau runutan kebijakan terkait subsidi perolehan dan pembanguna rumah. Metodologi pelaksanaan kegiatan Pemetaan Pola Subsidi Perolehan dan Pembangunan Rumah bagi MBR dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan termasuk penyusunan rencana kerja;
2. Identifikasi kebutuhan dan pengumpulan data baik melalui kunjungan lapangan maupun melalui *internet*;
3. Pelaksanaan rapat kerja untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pembiayaan perumahan;
4. Studi literatur dan tinjauan kebijakan terkait kegiatan Pemetaan Pola Subsidi Perolehan dan Pembangunan Rumah bagi MBR; dan
5. Menyusun laporan hasil kegiatan.

Berdasarkan simulasi hasil perhitungan daya angsur MBR terhadap angsuran KPR dan harga jual rumah bersubsidi dengan menggunakan asumsi penghasilan pemohon menjadi rumah tangga dengan bunga 5% (lima persen), dan 6% (enam persen), serta 7% (tujuh persen) diketahui bahwa:

- 1) Untuk bunga 5% (lima persen) secara keseluruhan MBR mampu mengangsur dengan harga jual rumah bersubsidi di 34 (tiga puluh empat) provinsi.
- 2) Untuk bunga 6% (enam persen) ada 1 (satu) provinsi dimana MBR tidak mampu mengangsur yaitu di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu daya angsur sebesar **Rp1.022.765** sedangkan besaran angsuran untuk bunga 6% (enam persen) adalah **Rp1.038.789**.
- 3) Untuk bunga 7% (tujuh persen) ada 5 (lima) provinsi dimana MBR tidak mampu mengangsur yaitu:

Tabel 19. Daya Angsur 5 (lima) Provinsi

No	Provinsi	Daya Angsur	Angsuran (Bunga 7%)
1	Jawa Barat	Rp1.086.210	Rp1.124.145
2	Jawa Timur	Rp1.061.266	Rp1.124.145
3	Jawa Tengah	Rp1.045.209	Rp1.124.145
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp1.022.765	Rp1.124.145
5	Nusa Tenggara Timur	Rp1.167.541	Rp1.258.465

Kebijakan perbedaan bunga KPR berdasarkan hasil simulasi perhitungan pada FLPP dapat mengoptimalkan komposisi pendanaan pemerintah dimana untuk bunga 5% (lima persen) komposisi pendanaan pemerintah sebesar 75,00% (tujuh puluh lima persen), bunga 6% (enam persen) komposisi pendanaan pemerintah sebesar 51,40% (lima puluh satu koma empat puluh persen), dan bunga 7% (tujuh persen) komposisi pendanaan pemerintah sebesar 27,60% (dua puluh tujuh koma enam puluh persen).

Pada tahun 2020 total dana FLPP sejumlah Rp9.500.000.000.000 (tiga belas triliun rupiah) berdasarkan hasil analisa perhitungan dengan 3 (tiga) kelompok sasaran berdasarkan penghasilan rumah tangga dan perbedaan 3 (tiga) bunga KPR Bersubsidi didapatkan daya ungkit dana FLPP tahun 2020 sebesar 108.641 unit rumah.

Hasil simulasi alternatif lain dengan proporsi pendanaan PT SMF dan komposisi penggunaan dana tersebut yang dibedakan berdasarkan bunga dapat diketahui total unit rumah yang dapat dibiayai sebanyak 106.646 unit rumah dengan total anggaran PT SMF sebesar Rp3.196.029.140.366 (tiga triliun seratus sembilan puluh enam miliar dua puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

4) Indikator Kinerja 4 dan Indikator 5: Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan dan Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

Tabel 20. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 4

Sasaran Program (Outcome) / Indikator Kinerja 4		
Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan		
Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Dokumen	0 Dokumen	-

Tabel 21. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 5

Sasaran Program (Outcome) / Indikator Kinerja 5		
Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan		
Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Dokumen	0 Dokumen	-

Berdasarkan Surat Tindak Lanjut Rencana Revisi Anggaran Nomor KU0408-Ps/433 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Persiapan Rencana Revisi Anggaran ke-3 TA 2019 yang

dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019. Rencana kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp 5.541.839.000,00 di luar Belanja Pegawai sebesar Rp 3.771.453.469,00 yang dipenuhi dari realokasi antar kegiatan dari masing - masing unit kerja dengan besaran tentatif dana sebesar:

- a. Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi sebesar Rp 1.700.000.000,00 - Rp 2.000.000.000,00;
- b. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar Rp 925.000.000,00 - Rp 1.000.000.000,00;
- c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar Rp 2.000.000.000,00 - Rp 5.000.000.000,00;
- d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 950.000.000,00 - Rp 1.000.000.000,00;
- e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebesar Rp 1.000.000.000,00 - Rp 2.000.000.000,00.

Sehingga, berdasarkan Surat Penyampaian Rencana Realokasi Anggaran dalam rangka Revisi DIPA Ke-3 Dit. PPP TA. 2019 nomor UM02.01.Pp/696, Output Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan yang terdiri dari Paket Kegiatan 5317.004.051 A "Penyiapan Tata Keloka Pengusulan dan Perencanaan KPBU Bidang Perumahan" yang terkait dengan Indikator Output Kegiatan Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan mengalami penghematan sebesar Rp 425.000.000,00 menjadi Rp 0,00. Kemudian, Output Kegiatan Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Bidang Pembiayaan Perumahan yang terdiri dari Paket Kegiatan dengan kode 5317.005.001.051 A "Penyusunan Tata Cara Penghunian Rumah Susun Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha" mengalami penghematan sebesar Rp 420.000.000,00 menjadi Rp 0,00. Terjadinya realokasi anggaran pada Paket Kegiatan 5317.004.051 A dan 5317.005.001.051 A mengakibatkan Indikator Kinerja 4 dan 5 tidak tercapai sehingga capaian indikator kinerja tersebut sebesar 0

5) Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan

Tabel 22. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 6

Sasaran Program (Outcome) / Indikator Kinerja 6					
Jumlah Paket Pembiayaan					
Target		Realisasi		Capaian (%)	
1 Paket Pembiayaan		1 Paket Pembiayaan		100%	
No	Output Kegiatan	Unit	Target	Capaian	
				(unit)	(%)
1	Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	Paket Pembiayaan	1	1	100%

Tabel 23. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 6

No	Kode	Output Kegiatan / Sub-Output / Paket kegiatan	Pagu (Rp ,00)
	5317.005	Pelaksanaan Investasi Perumahan	420,000,000
	5317.005.001	Tanpa Sub Output	420,000,000
1	052	Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	420,000,000

Sasaran Program / Indikator Kinerja tersebut terdapat di dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan output kegiatan berupa Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan yang terdiri dari Paket Kegiatan Penyusunan Sistem Tata Cara Penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan pagu sebesar Rp 420.000.000,00.

Pekerjaan Penyusunan Sistem Tata Cara Penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun pada Proyek KPBU bertujuan sebagai pendukung Pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha bidang Perumahan khususnya dalam penyelenggaraan Rumah Susun dan agar dapat menjadi bahan masukan serta informasi terkait penyusunan terkait penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah memiliki peluang untuk melakukan kerjasama dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perumahan dengan Pembiayaan tidak hanya bersumber pada APBN/APBD. Rumah susun sewa yang nantinya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif pembiayaan dalam proyek dibidang perumahan. Penetapan tarif sewa pada rumah susun KPBU harus dihitung secara spesifik setiap komponennya agar memperoleh keuntungan bagi pihak pemerintah, begitu juga dengan pihak badan usaha yang berinvestasi. Dalam proses Pelaksanaan Penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun KPBU terdiri atas dasar perhitungan tarif yang dilihat berdasarkan kriteria lokasi lahan; komponen perhitungan tarif; dan struktur perhitungan tarif.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, kesimpulan dari penyusunan tarif sewa rumah susun pada proyek KPBU adalah:

- a. Dasar perhitungan tarif sewa rumah susun berdasarkan pemilihan lokasi lahan terdapat tiga kriteria, yaitu kriteria fisik, legalitas dan ekonomi. Dalam kriteria ekonomi terdapat sub kriteria penting yaitu nilai pasar sebagai salah satu penentu harga sewa dari satuan rumah susun.
- b. Terdapat tiga komponen perhitungan sewa sebagai pembebanan tarif sewa yang nantinya akan dibebankan kepada penghuni rumah susun sewa KPBU. Tiga komponen tersebut adalah komponen pemeliharaan, komponen perhitungan sewa dan komponen iuran pemeliharaan lingkungan. Dalam setiap komponen tersebut terdapat rincian perbaikan/ perawatan/pemeliharaan yang biayanya akan dibebankan kepada penghuni rumah susun. Dalam penyusunannya diperlukan desain struktur perhitungan tarif sewa yang mencakup komponen-komponennya. Sehingga dapat direalisasikan untuk mempermudah pengelola dalam hal perhitungan tarif sewa yang akan dibebankan kepada penghuni rumah susun. Berdasarkan analisis struktur perhitungan tarif sewa, terdapat 7 (tujuh) desain struktur perhitungan tarif sewa.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, tata cara penyusunan tarif sewa rumah susun pada proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha, maka rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu dasar perhitungan sewa, komponen perhitungan dan struktur perhitungan sewa pada laporan penyusunan tarif sewa rumah susun pada proyek KPBU dapat menjadi masukan dalam perhitungan sewa rumah susun KPBU yang nantinya akan direalisasikan.

6) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan Serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan

Tabel 24. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 7

Sasaran Program (Outcome) / Indikator Kinerja 7					
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan					
Target		Realisasi		Capaian (%)	
2 Laporan		2 Laporan		100%	
No	Output Kegiatan	Unit	Target	Capaian	
				(unit)	(%)
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%
2	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	100%

Tabel 25. Paket Kegiatan Indikator Kinerja 7

No	Kode	Output Kegiatan / Sub-Output / Paket kegiatan	Pagu (Rp ,00)
	5317.007	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	840,000,000
	5317.007.001	Tanpa Sub Output	840,000,000
1	051	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan	340,000,000
	052	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500,000,000

Sasaran Program / Indikator Kinerja tersebut terdapat di dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan output kegiatan terdiri dari:

- a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan yang mencakup Pengembangan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Berbasis Geo-enables Evaluation and Monitoring System (GEMS) dengan pagu Rp 340.000.000,00,
- b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan pagu sebesar Rp 500.000.000,00.

a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan yang mencakup Pengembangan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Berbasis Geo-enables Evaluation and Monitoring System (GEMS)

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan yang mencakup Pengembangan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Berbasis Geo-enables Evaluation and Monitoring System (GEMS) dilaksanakan agar kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan dapat dilakukan secara baik dan tepat kepada kelompok sasaran yang bertujuan agar tersusun mekanisme Pengembangan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Berbasis Geo-Enables Monitoring dan Supervision (GEMS) agar terciptanya kemudahan koordinasi dan percepatan penanganan kendala di lapangan sehingga dapat memperlancar proses penyaluran bantuan pembiayaan perumahan secara lebih tepat sasaran, tepat mutu dan tepat manfaat.

Dalam membantu proses pemantauan serta pendampingan BP2BT di lapangan maka dibutuhkan sebuah alat bantu yang terintegrasi secara terpusat. Aplikasi Pemantauan Pendampingan Masyarakat dalam Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan berbasis

Sistem Informasi Geo-enable dirancang sebagai alat yang akan mempermudah pemantauan terhadap proses pendampingan penerima manfaat mulai dari tahap penyiapan, pengajuan, konstruksi dan pemanfaatan bantuan pembiayaan perumahan, khususnya pada Program BP2BT. Sistem ini juga sekaligus melaporkan kinerja pendampingan yang dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping yang berada di lapangan secara real time. Manfaat yang diharapkan adalah kemudahan koordinasi dan percepatan penanganan kendala di lapangan sehingga dapat memperlancar proses penyaluran bantuan pembiayaan lebih tepat sasaran, tepat mutu dan tepat manfaat. Melalui sistem Geo-enable, informasi sebaran penerima manfaat juga dapat diperoleh lebih cepat dan akurat sebagai bahan penyusunan database, profil dan best practice program BP2BT.

Adapun pemanfaatan aplikasi berbasis *Geo-enable* yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi program BP2BT tahun 2019 adalah Pantau Bung Umah. Pantau Bung Umah terdiri dari Perangkat Pengumpulan Data Pendampingan dan *Dashboard* Pengelolaan Data Pendampingan. Aplikasi Pantau Bung Umah ini terintegrasi dengan aplikasi Kobo Toolbox. Kobo Toolbox sendiri adalah sebuah tools yang berbasis *Open Data Kit* (ODK) yang dikembangkan oleh Harvard Humanitarian Initiative untuk memudahkan pekerjaan monitoring dan evaluasi secara real time dan sistematis. Sistem ini memungkinkan pengolektifan data secara online maupun offline sehingga memudahkan user yang berada di daerah yang tidak memiliki akses terhadap sinyal telpon seluler. Selain itu pengguna juga dapat menyesuaikan formulir dengan kebutuhan di lapangan. Sistem ini memiliki *user interface* yang cukup mudah dipahami, sehingga siapa saja dapat menggunakan dan mengajarkan GEMS kepada orang lain meskipun tidak memiliki latar belakang dalam teknologi informasi atau sistem informasi geografis.

b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Kegiatan Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan evaluasi program pembiayaan perumahan agar keberjalanan program pada tahun berikutnya lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan pelaksanaan pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Kendala dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan adalah:
 1. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar subdit di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.
 2. Dit. PPP memiliki pagu awal sebesar 30,2 miliar rupiah, namun dalam pelaksanaannya terjadi revisi anggaran menjadi 60,5 miliar rupiah. Sehingga penyerapan saat itu menjadi hanya sekitar 28%.
 3. Dit. PPP kekurangan SDM, saat ini sudah terisi 12 namun kebutuhan Ditt. PPP adalah sebanyak 43 orang.

- Realisasi penyerapan keuangan pada Bulan Desember 2019 sebesar Rp 234.562.838.352,00 atau 90,98% dari target rencana sebesar Rp 257.814.096.000,00 atau 100%. Realisasi fisik pada bulan Desember 2019 sebesar 91,45% dari target rencana sebesar 100%. Terjadi deviasi negatif antara target dan capaian penyerapan keuangan sebesar -9,02%.
- Realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan 27 Desember 2019 adalah sebesar Rp 7.545.288.389.506,00 atau sebesar 99,28% dari target dan realisasi unit sebanyak 77.835 unit atau sebesar 105,38% dari target.
- Target kinerja Subsidi Bunga Kredit pada bulan Desember adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar Rp 3.529.969.647.622,00 atau sebesar 98,90% sehingga terjadi deviasi negatif capaian kinerja sebesar -1.1%. Target kinerja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan TA. 2019 adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar 89,85% atau sebesar Rp 747.040.000.000,00. Terdapat deviasi negatif sebesar -10,15% antara target dan capaian.
- Kendala penyaluran FLPP adalah bank pelaksana yang melakukan pembayaran lebih dari tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PPDPP melakukan teguran dan pengenaan denda terhadap bank pelaksana atas keterlambatan pengembalian pokok dan pembayaran tarif sesuai yang diatur di dalam PKO.
- Kendala yang dihadapi dalam upaya penyaluran KPR Bersubsidi (SSB/SSM dan SBUM) di tahun 2019 adalah:
 - Kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang dikhususkan bagi MBR ternyata masih memiliki peluang penyalahgunaan, sehingga masih banyak MBR yang belum memiliki hunian pribadi.
 - Belum tersedianya data - data MBR secara rinci dengan konsep MBR *by name, by address* di setiap daerah. Data tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui jumlah MBR yang belum memiliki rumah di suatu daerah.
 - Proses pengujian yang berhubungan dengan eKTP pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta waktu hasil lelang suku bunga BI yang tidak pasti.
 - Pelaksanaan kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang dikhususkan bagi MBR ternyata masih mengalami banyak kendala. Salah satu yang menjadi tantangan besar adalah proses penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran dengan contoh kasus rumah tidak dihuni oleh debitur/nasabah, rumah kosong, dan banyak rumah subsidi yang dikontrakan / disewakan.
 - Program BP2BT pada Tahun Anggaran 2019 sudah mencairkan dana kepada 5.178 pemohon atau sebesar Rp 205.748.000.000,00.
- Permasalahan Program BP2BT adalah sebagai berikut:
 1. Rendahnya penyerapan anggaran/bantuan stimulan hingga bulan November 2019. Permasalahan tersebut timbul disebabkan oleh:
 - i. BP2BT belum dikenal luas oleh masyarakat dan perbankan

- ii. SLF menjadi syarat utama dalam pencairan dana sebelum dikeluarkannya relaksasi persyaratan yang tertera di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019
2. Kualitas Rumah Subsidi yang disebabkan oleh belum adanya mekanisme pengawasan terhadap kualitas rumah, setelah SLF tidak lagi dipersyaratkan

4.2. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebelum terjadi restrukturisasi organisasi pada bulan Februari 2019 merupakan Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan. Di dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pola Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2018 memiliki 4 (empat) Sasaran Program/Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan pada tahun 2018 dan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Output Kegiatan dan Indikator Output Kegiatan yang terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan 2019

No	Sasaran Kegiatan (Perjanjian Kinerja 2019)	Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja 2019)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2018			Perjanjian Kinerja 2019				
						Target	Capaian	Presentase Capaian (%)	Target	Capaian	Capaian Indikator Output Kegiatan (%)	Capaian Indikator Kinerja (%)	
1	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1) Tingkat Ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	1	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis / NSPK	4	4	100.00%	5	5	100.00%	490%
				2	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola	Materi Teknis / Rumusan NSPK	2	2	100.00%	2	2	100.00%	

No	Sasaran Kegiatan (Perjanjian Kinerja 2019)	Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja 2019)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2018			Perjanjian Kinerja 2019			
						Target	Capaian	Presentase Capaian (%)	Target	Capaian	Capaian Indikator Output Kegiatan (%)	Capaian Indikator Kinerja (%)
				Pembiayaan Perumahan								
				3 Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	Materi Teknis	2	2	100.00%	2	2	100.00%	
				4 Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	Materi Teknis	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
				5 Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro	Materi Teknis	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
				6 Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan	Materi Teknis	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
				7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
			Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan dan Investasi perumahan	1 Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun	Rapermen	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
				2 Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya	Rapermen	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
				3 Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro	Rapermen	1	1	100.00%	1	1	100.00%	

No	Sasaran Kegiatan (Perjanjian Kinerja 2019)	Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja 2019)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2018			Perjanjian Kinerja 2019				
						Target	Capaian	Presentase Capaian (%)	Target	Capaian	Capaian Indikator Output Kegiatan (%)	Capaian Indikator Kinerja (%)	
				4	Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan	Rapermen	1	1	100.00%	1	1	100.00%	
			Layanan Bantuan Pembiayaan perumahan	1	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	Bulan Layanan	12	12	100.00%	12	12	100.00%	
				2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan uang muka yang bersumber dari PHLN	Rumah Tangga	5	3	60.00%	312	5178	1659.62%	
			Layanan Perkantoran	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	100.00%	12	12	100.00%	
		2)	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Jakstra	-	-	-	1	1	100.00%	100.00%
		3)	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan dan Pembangunan Rumah Umum dan Swadaya	Draft NSPK	-	-	-	1	1	100.00%	100.00%

No	Sasaran Kegiatan (Perjanjian Kinerja 2019)	Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja 2019)		Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2018			Perjanjian Kinerja 2019			
							Target	Capaian	Presentase Capaian (%)	Target	Capaian	Capaian Indikator Output Kegiatan (%)	Capaian Indikator Kinerja (%)
		4)	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Investasi Perumahan	(Tidak ada kegiatan di Tahun 2019)	(N/A)	-	-	-	1	0	0.00%	0.00%
		5)	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	(Tidak ada kegiatan di Tahun 2019)	(N/A)	-	-	-	1	0	0.00%	0.00%
		6)	Jumlah Paket Pembiayaan	Pelaksanaan Investasi Perumahan	1 Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	Paket Pembiayaan	-	-	-	1	1	100.00%	100.00%
		7)	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Laporan	-	-	-	1	1	100.00%	100.00%
						2 Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	-	-	-	1	1	

Perbandingan kinerja target dan capaian anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019 dengan 2019 berdasar sistem e-monitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2019

	Sasaran Kegiatan (Perjanjian Kinerja 2019)	Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja 2019)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2018			Perjanjian Kinerja 2019			
						Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Kinerja (%)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Kinerja (%)	
1	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1) Tingkat Ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	1	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis / NSPK	1,500,000,000	1,498,828,000	99.92%	6,800,000,000	6,182,326,450	90.92%
				2	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis / Rumusan NSPK	1,200,000,000	1,198,784,000	99.90%			
				3	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	Materi Teknis	962,987,000	945,774,000	98.21%			

Sasaran Kegiatan (Perjanjian Kinerja 2019)	Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja 2019)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2018			Perjanjian Kinerja 2019			
					Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Kinerja (%)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Kinerja (%)	
			4	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	Materi Teknis	637,013,000	636,450,000	99.91%			
			5	Jumlah materi teknis pengembangan pola pembiayaan mikro	Materi Teknis	749,397,000	749,397,000	100.00%			
			6	Jumlah materi teknis pengembangan pola investasi perumahan	Materi Teknis	694,710,000	694,470,000	99.97%			
			7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	155,290,000	154,890,000	99.74%			
		Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan dan Investasi perumahan	1	Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah tapak dan rumah susun	Rapermen	750,000,000	733,398,000	97.79%			
			2	Jumlah rumusan rapermen pola pembiayaan rumah swadaya	Rapermen	500,000,000	499,747,000	99.95%	2,800,000,000	2,503,639,930	89.42%
			3	Jumlah rumusan Rapermen pola pembiayaan mikro	Rapermen	500,000,000	499,617,000	99.92%			
			4	Jumlah rumusan rapermen pola investasi perumahan	Rapermen	500,000,000	499,353,000	99.87%			
		Layanan Bantuan	1	Jumlah Layanan Operasional Bantuan	Bulan Layanan	6,950,000,000	6,608,379,000	95.08%			

Sasaran Kegiatan (Perjanjian Kinerja 2019)	Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja 2019)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2018			Perjanjian Kinerja 2019				
					Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Kinerja (%)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Kinerja (%)		
		Pembiayaan perumahan	Pembiayaan Perumahan									
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan uang muka yang bersumber dari PHLN	Rumah Tangga	150,000,000	89,400,000	59.60%	229,720,086,000	214,504,835,000	93.38%		
		Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	1,009,000,000	966,917,000	95.83%	1,100,000,000	1,075,396,000	97.76%		
	2)	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	1	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Jakstra	-	-	-	434,000,000	406,384,800	93.64%
	3)	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan dan Pembangunan Rumah Umum dan Swadaya	Draft NSPK	-	-	-	500,000,000	398,671,887	79.73%
	4)	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Investasi Perumahan		(Tidak ada kegiatan di Tahun 2019)	(N/A)	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan (Perjanjian Kinerja 2019)	Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja 2019)	Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Perjanjian Kinerja 2018			Perjanjian Kinerja 2019				
					Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Kinerja (%)	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Kinerja (%)		
	5)	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan		(Tidak ada kegiatan di Tahun 2019)	(N/A)	-	-	-	-	-	
	6)	Jumlah Paket Pembiayaan	Pelaksanaan Investasi Perumahan	1	Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	Paket Pembiayaan	-	-	-	420,000,000	414,146,268	98.61%
	7)	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Laporan	-	-	-	340,000,000	168,155,000	49.46%
				2	Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	-	-	-	500,000,000	335,413,110	67.08%

Capaian kinerja tahun 2015 - 2019 berdasarkan Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2015 -2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja 2015 -2019

	Output Kegiatan / Indikator Output Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja (berdasarkan Rencana Strategis 2015 - 2019)													Capaian (%)
			2015		2016		2017		2018		2019		Total			
			Tar get	Real isasi	Tar get	Real isasi	Tar get	Real isasi	Tar get	Real isasi	Tar get	Realisasi	Target	Realisasi		
	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis / Rumusan NSPK	10	13	11	10	11	11	11	11	11	13	54	56	103,7%	
1	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	20	20	100%	
2	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	Materi Teknis / Rumusan NSPK	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	10	8	80%	
3	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	Materi Teknis	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	10	11	110%	
4	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	Materi Teknis	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	120%	

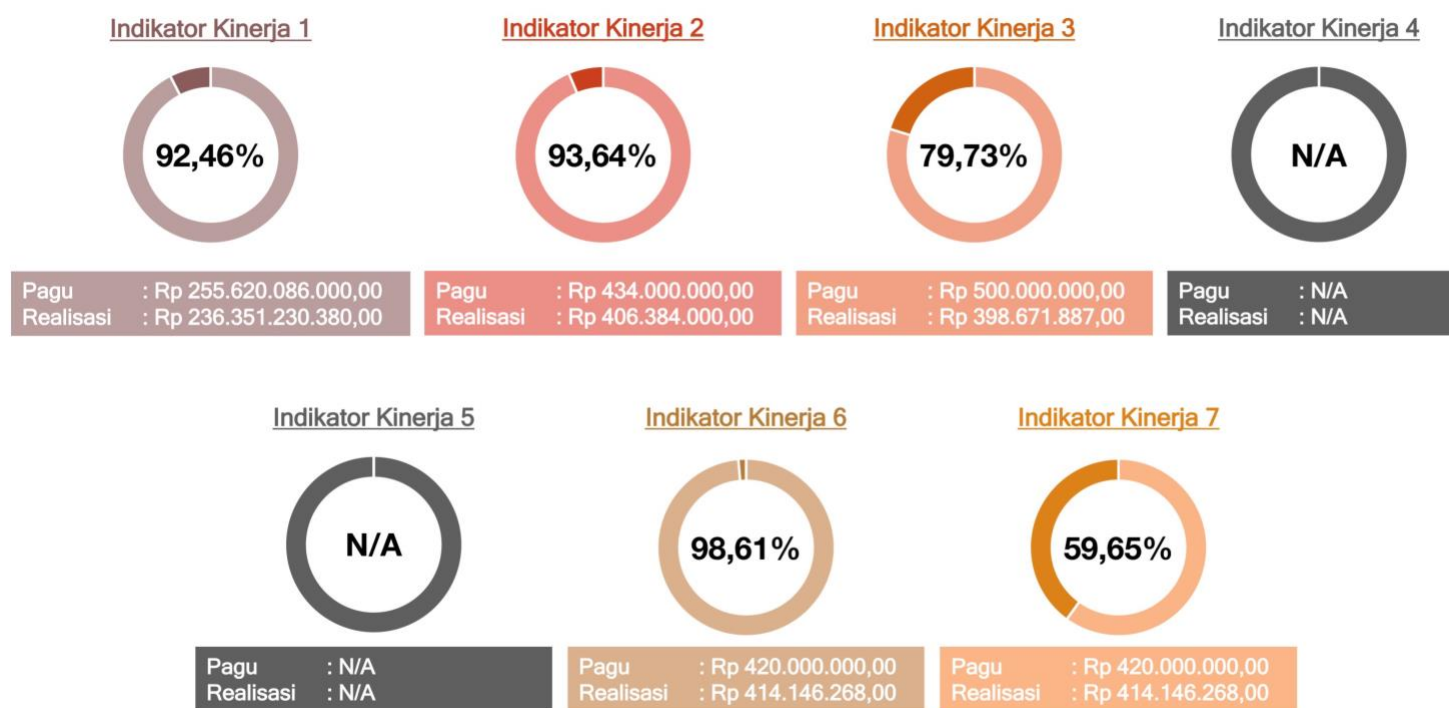
	Output Kegiatan / Indikator Output Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja (berdasarkan Rencana Strategis 2015 - 2019)													Capaian (%)
			2015		2016		2017		2018		2019		Total			
			Tar get	Real isasi	Tar get	Real isasi	Tar get	Real isasi	Tar get	Real isasi	Tar get	Realisasi	Target	Realisasi		
	-Dana operasional untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%
	-Dana operasionall untuk mendukung pelaksanaa PHLN	Bulan Layanan	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan uang muka yang bersumber dari PHLN	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	3	312	5.178	315	5.181	1.645%		
	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	Jakstra	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100%	
4	1 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	
	2 Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	-	
	3 Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Jakstra	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100%	
5	Pelaksanaan Investasi Perumahan	Paket Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100%	

	Output Kegiatan / Indikator Output Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja (berdasarkan Rencana Strategis 2015 - 2019)												
			2015		2016		2017		2018		2019		Total		Capaian (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Bidang Pembiayaan Perumahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	-
2	Jumlah Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	Paket Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100%
Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan		Draft NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100%
6	1 Jumlah Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan dan Pembangunan Rumah Umum dan Swadaya	Draft NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	100%
	2 Jumlah Pemberdayaan pemangku kepentingan pelaksana kemudahan dan/atau bantuan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
	3 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembiayaan Perumahan		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
7	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	100%

4.3. REALISASI ANGGARAN

4.3.1. REALISASI ANGGARAN BA.033 DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

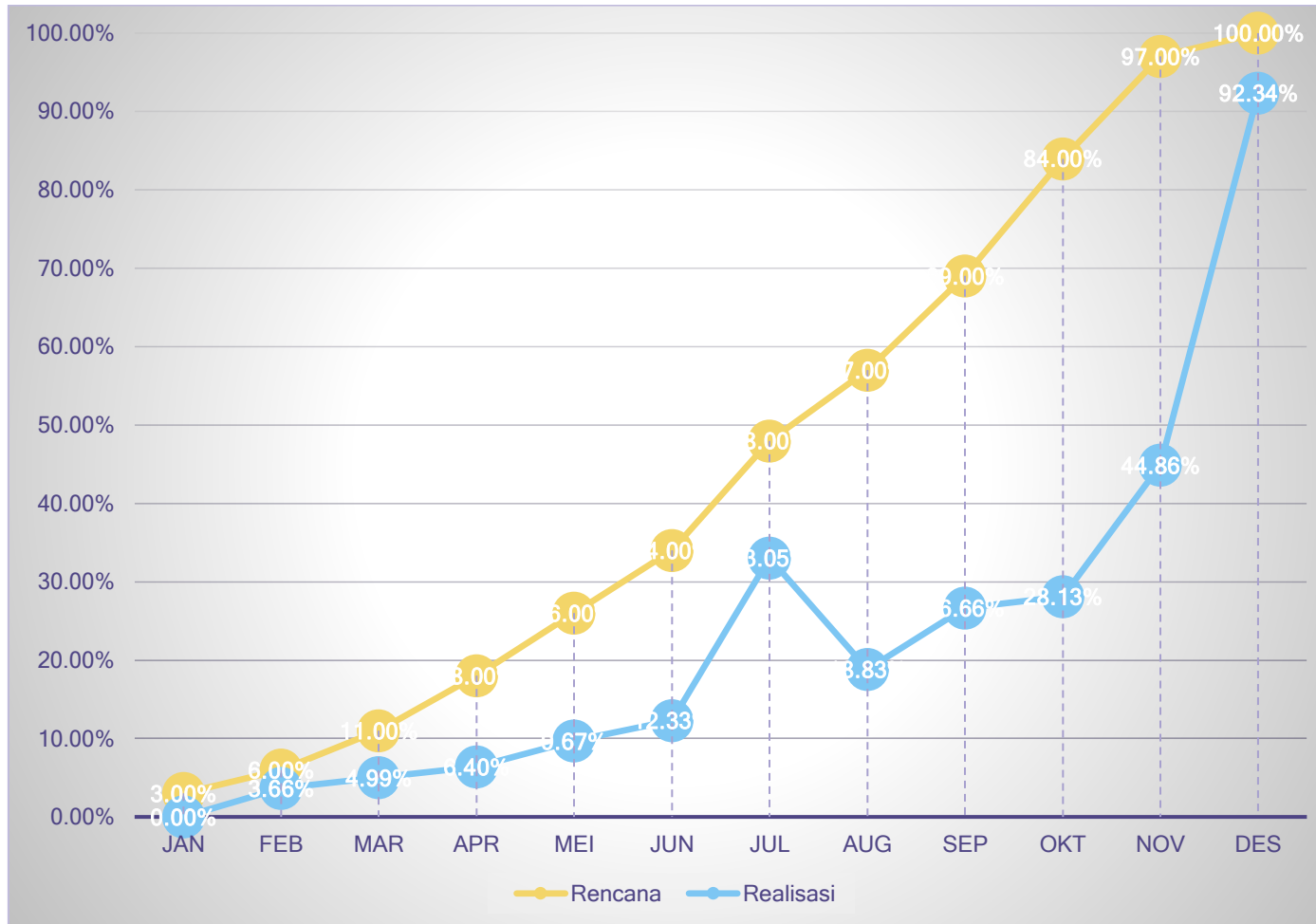
Realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2019 berdasarkan e-monitoring Kementerian PUPR adalah sebesar Rp 238.074.001.445,00 atau 92,34% dari total pagu bagi Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 257.814.086.000,00. Sedangkan kinerja pencapaian fisik Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan sebesar 99,71%.



Gambar 10. Realiasi Anggaran masing - masing Indikator Kinerja

Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan masing - masing Indikator Kinerja adalah sebesar 92,46% capaian Indikator Kinerja 1 (satu), 93,64% capaian Indikator Kinerja 2 (dua), 79,73% capaian Indikator Kinerja 3 (tiga), 96,61% capaian Indikator Kinerja 6 (enam), dan 59,65% Indikator Kinerja 7 (tujuh), sedangkan capaian Indikator Kinerja 4 (empat) dan 5 (lima) tidak dapat diukur karena kegiatan mengalami realokasi anggaran Direktorat

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga mengalami penghematan anggaran sebesar 100% dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja 4 (empat) dan 5 (lima).



Gambar 11. Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Secara keseluruhan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2019 adalah sebesar 92,34% atau Rp 238.074.001.445,00 dari total pagu sebesar Rp 257.814.086.000,00 berdasarkan status e-Monitoring Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 31 Desember 2019.

Kinerja penyerapan anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada bulan Agustus menurun 14.22%, semula 33,05% menjadi 18,83% karena terjadi penambahan pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada DIPA semula sebesar Rp 30.200.000.000,00 menjadi Rp 60.579.086.000,00 atau terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 30.379.086.000,00.

Tabel 29. Kinerja Penyerapan Anggaran Dit. Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja / Output Kegiatan / Sub-Output Kegiatan / Paket Kegiatan	Pagu (Rp ,00)	Keuangan			Fisik		Kinerja Anggaran	Keterangan
			Realisasi (Rp ,00)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)		
	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	257,814,086,000	238,074,001,445	100.00%	92.34%	100.00%	99.71%	99.71%	
1)	Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	255,620,086,000	236,351,230,380	100.00%	92.46%	100.00%	99.71%	92.46%	
A	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	6,800,000,000	6,182,326,450	100.00%	90.92%	100.00%	100.00%	90.92%	
1	NSPK Pola Pembiayaan Perumahan	1,300,000,000	1,226,528,950	100.00%	94.35%	100.00%	100.00%	94.35%	
001	Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat dalam Penyaluran Subsidi Perumahan	700,000,000	665,013,950	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	95.00%	
002	Penyusunan Tata Kelola Penilaian Kelayakan Bank	600,000,000	561,515,000	100.00%	93.59%	100.00%	100.00%	93.59%	

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja / Output Kegiatan / Sub-Output Kegiatan / Paket Kegiatan	Pagu (Rp ,00)	Keuangan			Fisik		Kinerja Anggaran	Keterangan
			Realisasi (Rp ,00)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)		
2	Masukan Teknis dan Laporan Kinerja Pengembangan Pola Pembiayaan	5,500,000,000	4,955,797,500	100.00%	90.11%	100.00%	100.00%	90.11%	
001	Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan	2,350,000,000	1,964,317,500	100.00%	83.59%	100.00%	100.00%	83.59%	
002	Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	2,300,000,000	2,198,105,000	100.00%	95.57%	100.00%	100.00%	95.57%	
003	Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	700,000,000	656,949,000	100.00%	93.85%	100.00%	100.00%	93.85%	
004	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja	150,000,000	136,426,000	100.00%	90.95%	100.00%	100.00%	90.95%	
B	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	2,800,000,000	2,503,639,930	100.00%	89.42%	100.00%	100.00%	89.42%	
1	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan dan Investasi Perumahan	2,800,000,000	2,503,639,930	100.00%	89.42%	100.00%	100.00%	89.42%	
001	Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	2,100,000,000	1,836,025,000	100.00%	87.43%	100.00%	100.00%	87.43%	
002	Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	700,000,000	667,614,930	100.00%	95.37%	100.00%	100.00%	95.37%	
C	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	244,920,086,000	226,589,868,000	100.00%	92.52%	100.00%	99.69%	92.52%	

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja / Output Kegiatan / Sub-Output Kegiatan / Paket Kegiatan	Pagu (Rp ,00)	Keuangan			Fisik		Kinerja Anggaran	Keterangan
			Realisasi (Rp ,00)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)		
1	Tanpa Sub Output	244,920,086,000	226,589,868,000	100.00%	92.52%	100.00%	99.69%	92.52%	
001	Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	15,200,000,000	12,085,033,000	100.00%	79.51%	100.00%	100.00%	79.51%	
002	Penyaluran Bantuan Uang Muka yang Bersumber dari Pinjaman dan Hibah	229,720,086,000	214,504,835,000	100.00%	93.38%	100.00%	99.67%	93.38%	
D	Layanan Perkantoran	1,100,000,000	1,075,396,000	100.00%	97.76%	100.00%	100.00%	97.76%	
1	Tanpa Sub Output	1,100,000,000	1,075,396,000	100.00%	97.76%	100.00%	100.00%	97.76%	
001	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,100,000,000	1,075,396,000	100.00%	97.76%	100.00%	100.00%	97.76%	
2)	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	434,000,000	406,384,800	100.00%	93.64%	100.00%	100.00%	93.64%	
E	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	434,000,000	406,384,800	100.00%	93.64%	100.00%	100.00%	93.64%	
1	Tanpa Sub Output	434,000,000	406,384,800	100.00%	93.64%	100.00%	100.00%	93.64%	
001	Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan	434,000,000	406,384,800	100.00%	93.64%	100.00%	100.00%	93.64%	
3)	jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	500,000,000	398,671,887	100.00%	79.73%	100.00%	100.00%	79.73%	

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja / Output Kegiatan / Sub-Output Kegiatan / Paket Kegiatan	Pagu (Rp ,00)	Keuangan			Fisik		Kinerja Anggaran	Keterangan
			Realisasi (Rp ,00)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)		
5)	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Capaian tidak dapat diukur karena kegiatan terkena dampak realokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
6)	Jumlah Paket Pembiayaan	420,000,000	414,146,268	100.00%	98.61%	100.00%	100.00%	98.61%	
A	Pelaksanaan Investasi Perumahan	420,000,000	414,146,268	100.00%	98.61%	100.00%	100.00%	98.61%	
1	Tanpa Sub Output	420,000,000	414,146,268	100.00%	98.61%	100.00%	100.00%	98.61%	
001	Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	420,000,000	414,146,268	100.00%	98.61%	100.00%	100.00%	98.61%	
7)	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	840,000,000	503,568,110	100.00%	59.95%	100.00%	100.00%	59.95%	

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja / Output Kegiatan / Sub-Output Kegiatan / Paket Kegiatan	Pagu (Rp ,00)	Keuangan			Fisik		Kinerja Anggaran	Keterangan
			Realisasi (Rp ,00)	Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)		
A	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	840,000,000	503,568,110	100.00%	59.95%	100.00%	100.00%	59.95%	
1	Tanpa Sub Output	840,000,000	503,568,110	100.00%	59.95%	100.00%	100.00%	59.95%	
001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan	340,000,000	168,155,000	100.00%	49.46%	100.00%	100.00%	49.46%	
002	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	500,000,000	335,413,110	100.00%	67.08%	100.00%	100.00%	67.08%	

Dari tabel di atas sebagian besar paket kegiatan memiliki kinerja yang “Memuaskan” (86% - 100%) dan “Sangat Baik” (76% - 85%), namun 1 (satu) paket kegiatan berada di dalam kategori “Baik, perlu sedikit perbaikan” (66% - 75%) yaitu “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan” dan 1 (satu) paket kegiatan berada dalam kategori “Kurang” yaitu “Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan” sehingga perlu banyak perbaikan dan perubahan mendasar.

Berikut rekapitulasi pengelompokan capaian kinerja kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan hingga Bulan Desember 2019:

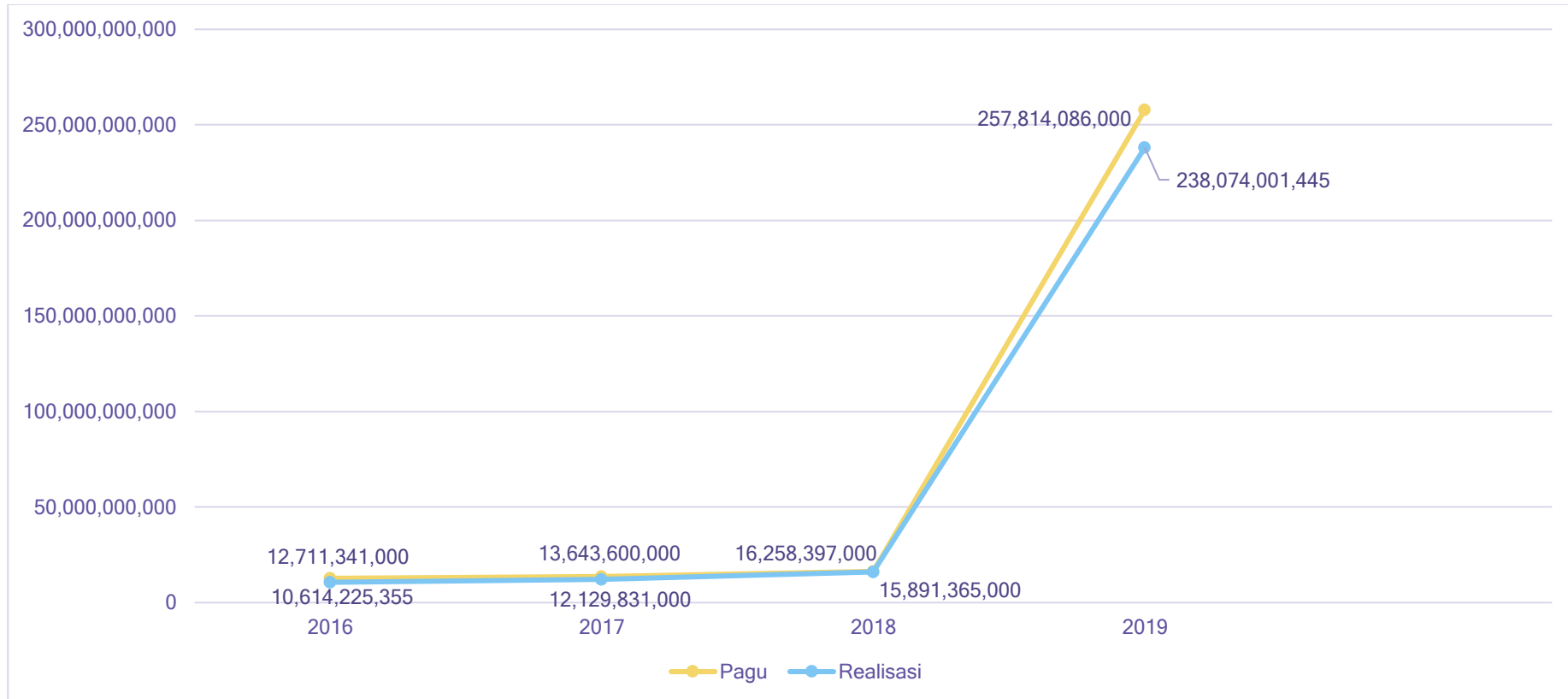
Tabel 30. Rekapitulasi Interpretasi Capaian Kinerja

No	Pengelompokan Capaian Kinerja	Paket Kegiatan	
1.	Kurang; Perlu banyak perbaikan dan perubahan mendasar	1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan
2.	Baik; Perlu sedikit perubahan	1.	Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Pengelompokkan Capaian Kinerja	Paket Kegiatan	
3.	Sangat Baik	1.	Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan
		2.	Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan
		3.	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan
4.	Memuaskan	1.	Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat dalam Penyaluran Subsidi Perumahan
		2.	Penyusunan Tata Kelola Penilaian Kelayakan Bank
		3.	Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
		4.	Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan
		5.	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja
		6.	Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan
		7.	Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan
		8.	Penyaluran Bantuan Uang Muka yang Bersumber dari Pinjaman dan Hibah
		9.	Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan
		10.	Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan

4.3.2. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 - 2019

Berikut adalah perbandingan target dan realiasi anggaran Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan yang berubah menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2015 - 2019:



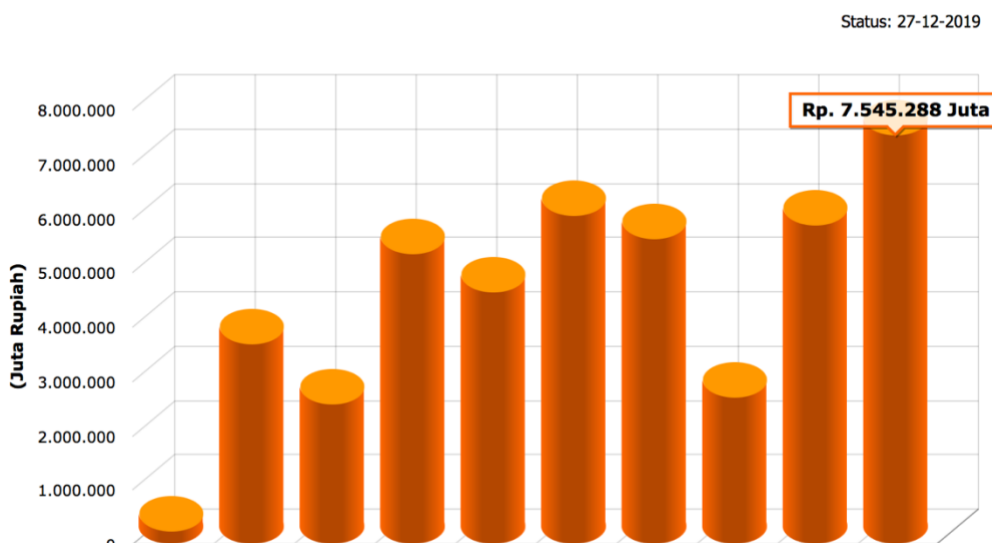
Gambar 12. Grafik Perbandingan Anggaran 2015 - 2019

Selama pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan 2015 - 2019, anggaran yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada tahun 2019 merupakan kegiatan dengan pagu anggaran tertinggi dengan perbedaan sebesar Rp 9.555.689.000,00 dari pagu anggaran sebelumnya di tahun 2018. Komposisi terbesar dari anggaran di tahun 2019 adalah Output Kegiatan 5317.003 Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan pagu sebesar Rp 244.920.086.000,00 atau sekitar 94,50% dari seluruh anggaran BA.033 yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Sebanyak Rp 234.720.086.000,00 dari pagu anggaran untuk output kegiatan Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan merupakan jenis dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berasal dari *World Bank* (Bank Dunia) untuk program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

4.3.3. KINERJA CAPAIAN PROGRAM KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, anggaran FLPP adalah sejumlah Rp 5.200.000.000.000,00, selain itu telah dilakukan penyesuaian proyeksi pengembalian pokok yang semua sebesar Rp 1,9 triliun menjadi Rp 2,4 triliun. Dengan demikian target anggaran dana FLPP yang tersedia pada tahun 2019 adalah semula Rp 7,1 triliun menjadi Rp 7,6 triliun dan target penyaluran bantuan perumahan semula sebanyak 68.858 unit menjadi 73.858 unit KPR Sejahtera FLPP.



Gambar 13. Perbandingan Relisasi FLPP Tahun 2010 - 2019

Tabel 31. Realisasi FLPP 2010 - 2019

NO	TAHUN	TOTAL REALISASI FLPP (RP)	REALISASI (UNIT)
1	2010	242.656.944.516	7.959
2	2011	3.688.272.535.411	109.592
3	2012	2.587.256.538.729	64.785
4	2013	5.363.161.269.150	102.714
5	2014	4.655.625.834.824	76.057
6	2015	6.055.243.293.208	76.489
7	2016	5.627.538.999.307	58.469
8	2017	2.706.624.492.776	23.763
9	2018	5.895.206.726.677	57.939
10	2019	7.545.288.389.506	77.835
TOTAL		44.366.875.024.104	655.602



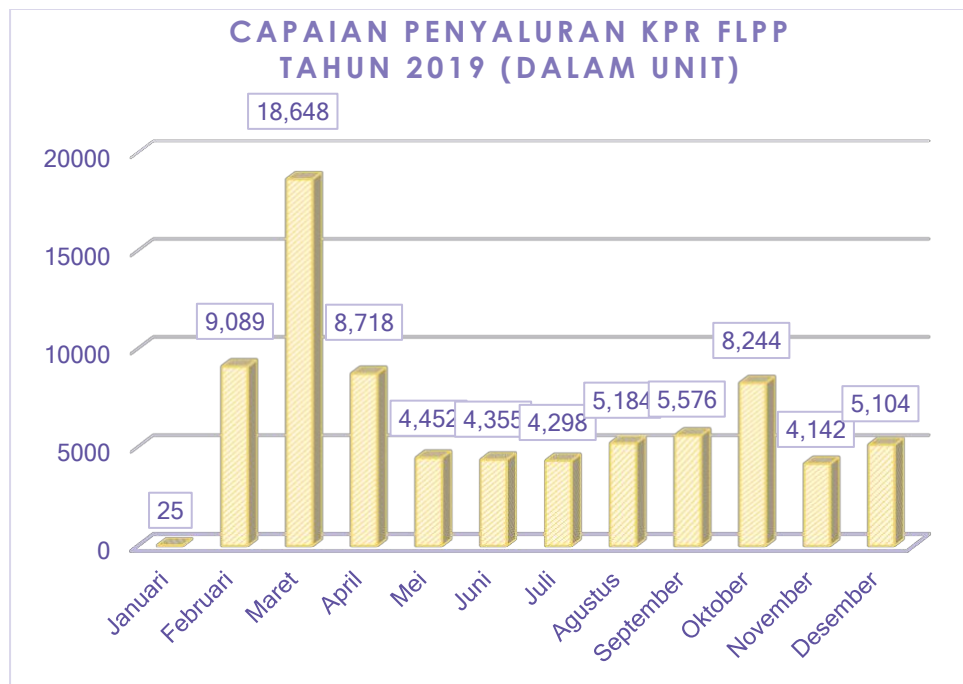
Gambar 14. Perbandingan Target dan Realisasi FLPP 2015 -2019

Realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 7.545.288.389.506,00 atau sebesar 99,28% dari target dan realisasi unit sebanyak 77.835 unit atau sebesar 113,03% dari target yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Rincian capaian realisasi FLPP Tahun Anggaran 2019 setiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 32. Capaian Realisasi FLPP Bulan Januari - Desember 2019

No	BULAN	REALISASI	
		UNIT	KEUANGAN
1	JANUARI	25	2.383.486.500
2	FEBRUARI	9.089	865.906.166.917
3	MARET	18.648	1.795.487.622.540
4	APRIL	8.718	838.181.181.697
5	MEI	4.452	426.956.227.218
6	JUNI	4.355	422.907.181.645
7	JULI	4.298	411.296.362.575
8	AGUSTUS	5.184	500.353.651.315
9	SEPTEMBER	5.576	544.207.607.994
10	OKTOBER	8.244	811.889.634.979
11	NOVEMBER	4.142	414.065.806.326
12	DESEMBER	5.104	511.653.459.800
TOTAL		77.835	7.545.288.389.506

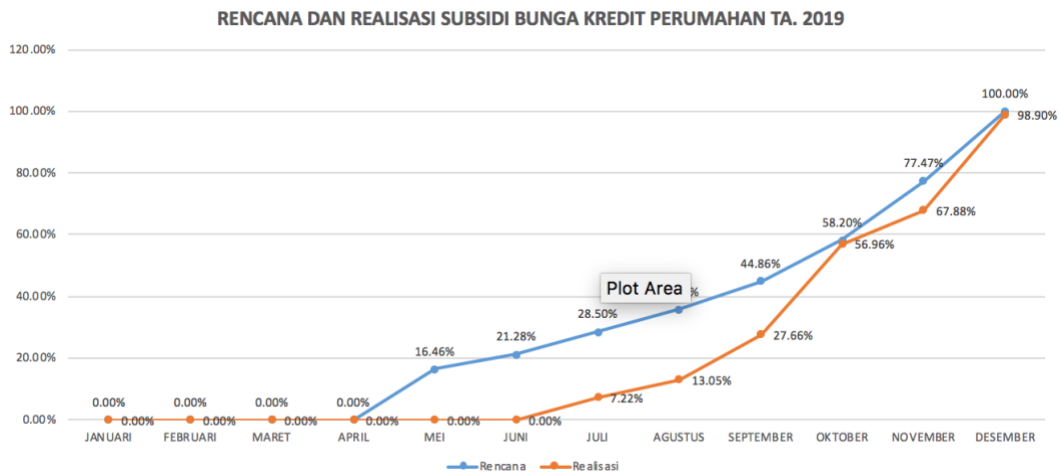


Gambar 15. Perbandingan Capaian Penyaluran KPR FLPP 2019 (dalam unit)

Walaupun realisasi FLPP tergolong baik dan memuaskan, namun tetap ditemukan kendala. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasional antara PPDPP dengan Bank Pelaksana pada tanggal 14 Agustus 2018, pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa bank pelaksana memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pengembalian pokok dan tarif Dana FLPP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak bank pelaksana yang melakukan pembayaran lebih dari tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PPDPP melakukan teguran dan pengenaan denda terhadap bank pelaksana atas keterlambatan pengembalian pokok dan pembayaran tarif sesuai yang diatur di dalam PKO.

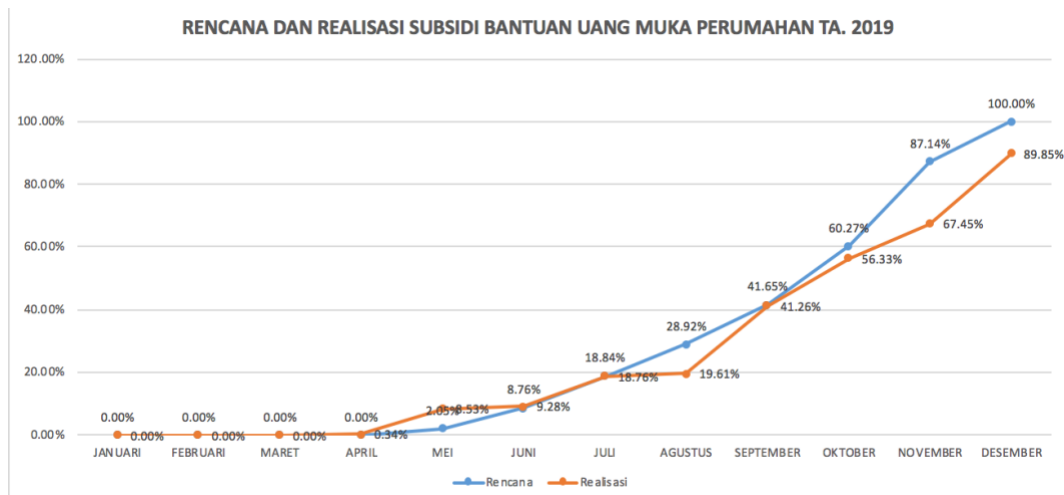
Subsidi Selisih Bunga / Subsidi Selisih Margin (SSB/SSM) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)

Target kinerja Subsidi Bunga Kredit pada bulan Desember adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar Rp 3.529.969.647.622,00 atau sebesar 98,90% sehingga terjadi deviasi negatif capaian kinerja sebesar -1.1%. Jumlah unit yang tersalurkan adalah sebanyak 143.149 unit.



Gambar 16. Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Subsidi Bunga Kredit Januari - Desember 2019

Target kinerja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan TA. 2019 adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan December adalah sebesar 89,85% atau sebesar Rp 747.040.000.000,00. Terdapat deviasi negatif sebesar -10,15% antara target dan capaian. Jumlah unit yang tersalurkan adalah sebanyak 186.760 unit.



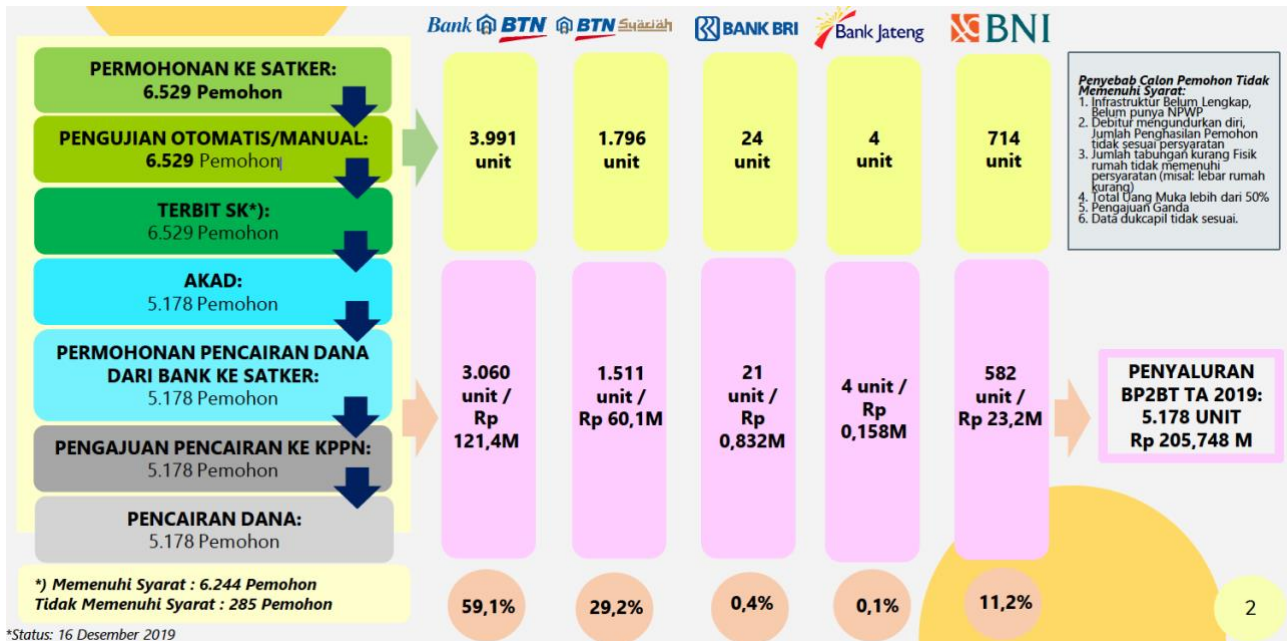
Gambar 17. Grafik Perbandingan Rencana dan Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka Januari - Desember 2019

Kendala yang dihadapi dalam upaya penyaluran KPR Bersubsidi (SSB/SSM dan SBUM) di tahun 2019 adalah:

1. Kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang dikhususkan bagi MBR ternyata masih memiliki peluang penyalahgunaan, sehingga masih banyak MBR yang belum memiliki hunian pribadi.
2. Belum tersedianya data - data MBR secara rinci dengan konsep MBR *by name, by address* di setiap daerah. Data tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui jumlah MBR yang belum memiliki rumah di suatu daerah.
3. Proses pengujian yang berhubungan dengan eKTP pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta waktu hasil lelang suku bunga BI yang tidak pasti.
4. Pelaksanaan kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang dikhususkan bagi MBR ternyata masih mengalami banyak kendala. Salah satu yang menjadi

tantangan besar adalah proses penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran dengan contoh kasus rumah tidak dihuni oleh debitur/nasabah, rumah kosong, dan banyak rumah subsidi yang dikontrakan / disewakan.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)



Gambar 18. Infografis Realisasi BP2BT

Berdasarkan status kinerja BP2BT tanggal 16 Desember 2019, permohonan BP2BT yang masuk sebanyak 6.529 pemohon yang terdiri dari 3.991 unit merupakan pemohon dari Bank BTN, 1.796 unit dari Bank BTN Syariah, 24 unit dari Bank BRI, 4 unit dari Bank Jateng, dan 714 unit dari Bank BNI. Dari 6.529 pengajuan, sejumlah 6.244 pemohon yang memenuhi syarat, namun hanya 5.178 pemohon yang lolos sampai dengan akad dan ditetapkan sebagai penerima BP2BT. Penerima manfaat dana BP2BT tersebut terdiri dari 3.060 unit merupakan dari Bank BTN, 1.511 unit dari Bank BTN Syariah, 21 unit dari Bank BRI, 4 unit dari Bank Jateng, dan 582 unit dari Bank BNI. Pencairan dana sudah dilakukan kepada 5.178 pemohon atau sebesar Rp 205.748.000.000,00 yang tersebar di 32 provinsi dan 215 kota / kabupaten.

4.4. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 257.814.086.000,00 (BA.033) dan Rp 4.400.654.265.000,00 (BA.999.07). Dengan anggaran yang tersedia, telah dilakukan upaya pencapaian kinerja secara optimal, efektif, dan efisien. Capaian Indikator Kinerja 7 (tujuh) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah 100%, namun kinerja anggaran tahun 2019 hanya mencapai 59,95% hal ini dikarenakan Output Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan merupakan output baru pada DIPA Revisi ke-02 pada bulan Agustus 2019

sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal. Untuk dapat memenuhi target capaian kinerja yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja, maka dalam pelaksanaan Paket Kegiatan “Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan Yang mencakup Pengembangan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Berbasis *Geo-Enables Evaluation and Monitoring System (GEMS)*” dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan BP2BT dan pada acara pelaksanaan BP2BT yang juga menghadirkan Tim Pendamping Penyaluran. Aplikasi GEMS terintegrasi dengan aplikasi Kobo Toolbox. Sedangkan pada pelaksanaan paket kegiatan “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan” untuk dapat memaksimalkan Pemantauan dan Evaluasi menggunakan data dari pelaksanaan Kemudahan/Bantuan Pembiayaan Perumahan yang diperoleh dari satuan kerja terkait.

4.5. KENDALA DAN STRATEGI

Selama pelaksanaan Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdapat beberapa kendala dan strategi tindak lanjut sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. Berikut adalah hasil pelaksanaan dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2020:

Tabel 33. Hasil Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan

No	Kegiatan	Hasil Pelaksanaan	Tindak Lanjut
1	Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat dalam Penyaluran Subsidi Perumahan	Draf Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Pembahasan Roadmap KPBU Bidang Perumahan Pembahasan Sasaran dan Strategi Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024	Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024
2	Penyusunan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Perumahan	Surat Edaran No. 01/SE/Dp/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran KPR Bersubsidi	Penyempurnaan dan Penyesuaian Tata Kelola apabila ada perubahan
3	Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan	Materi Teknis Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Investasi Perumahan	Penyusunan Panduan Pelaksanaan KPBU Perumahan atas Usulan Pemerintah Daerah Penyusunan Strategi Pengembangan Skema Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat (KPBUM) dalam

No	Kegiatan	Hasil Pelaksanaan	Tindak Lanjut
			Pembangunan Rumah Susun Penyusunan Strategi Pengembangan Pola Investasi di Kawasan Berbasis Transit (TOD)
		Pengembangan Skema KPR ASN, TNI, dan POLRI Penyempurnaan Skema KPR Bersubsidi	Penyelesaian penyusunan Rapermen terkait KPR ASN, TNI, dan POLRI
4	Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Kajian Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Sistem Informasi Kredit Program	Integrasi SBKP ke SIKP
		Rumusan perhitungan premi asuransi bencana dan kebutuhan pendataan yang dibutuhkan	Usulan permintaan perhitungan <i>fragility curve</i> rumah bersubsidi dengan Maipark dan Puslitbang Perumahan dan Permukiman; dan Perhitungan premi asuransi bencana KPR bersubsidi
		Skema awal keterlibatan digital e-commerce dalam mendukung akses pembiayaan perumahan	Skema Pembiayaan Perumahan Berbasis Ekonomi Digital untuk meningkatkan akses MBR Infomal
		Pedoman rekrutmen Tenaga Pendamping Penyaluran (TPP) BP2BT di 83 Kabupaten/Kota Evaluasi Hasil TPP BP2BT Tahun 2019 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan TPP BP2BT Tahun Anggaran 2019	Pedoman pelaksanaan dan ruang lingkup baru TPP BP2BT Tahun Anggaran 2020 dengan terbitnya Permen PUPR No. 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT
5	Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	Pedoman Penyusunan Analisa Biaya Manfaat Sosial untuk Proyek KPBU Bidang Perumahan	Uji Coba penerapan pedoman pada penyiapan proyek KPBU Bidang perumahan

No	Kegiatan	Hasil Pelaksanaan	Tindak Lanjut
6	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2020
7	Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	Permen PUPR No. 13/PRT/M/2017; Kepmen PUPR No. 587/KPTS/M/2019; Kepmen PUPR No. 535/KPTS/M/2019; Kepmen PUPR No. 1013/KPTS/M/2019.	Penyempurnaan Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri
		Rapermen PUPR terkait Skema Pembiayaan Mikro Berbasis Tabungan	Konsultasi publik dan pengesahan rapermen
		Studi skema awal Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya secara Berkelompok	Penyusunan masukan teknis Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya secara Berkelompok
8	Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun	Penyusunan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) untuk Proyek KPBU Bidang Perumahan
9	Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan	Identifikasi Potensi KPBU Perumahan di Palembang Identifikasi Potensi KPBU di Kawasan Plumpang Pertamina Identifikasi KPBU Perumahan pada kawasan TOD	Penyusunan identifikasi potensi Proyek KPBU di bidang Perumahan Studi Pendahuluan Proyek Rumah Susun KPBU di Jawa Barat dan Banten Studi Pendahuluan Proyek Rusun KPBU di DKI Jakarta
10	Pengembangan dan Pendampingan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan Tata Cara Penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun pada Proyek KPBU	Penerapan penyusunan tarif sewa pada Rumah Susun yang akan dijalan dengan KPBU

No	Kegiatan	Hasil Pelaksanaan	Tindak Lanjut
11	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan	Penyesuaian batasan penghasilan KPR bersubsidi, Rakepmen batasan penghasilan	Pengembangan inovasi skema KPR Mikro, penyaluran kemudahan dan bantuan melalui Lembaga keuangan non-bank.
12	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Kerja Sama Pembiayaan	Uji coba pelaksanaan <i>Geo-Enables Monitoring and Supervision</i> (GEMS) untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TPP BP2BT di daerah	Penatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan dengan GEMS
13	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan perumahan tahun 2019 dengan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan perumahan untuk tahun 2019

Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan yang dialami oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah:

1. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar subdit di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.
2. Dit. PPP memiliki pagu awal sebesar 30,2 miliar rupiah, namun dalam pelaksanaannya terjadi revisi anggaran menjadi 60,5 miliar rupiah. Sehingga penyerapan saat itu menjadi hanya sekitar 28%.
3. Dit. PPP saat ini mengalami kekurangan SDM, saat ini sudah terisi 6 staf PNS dan dibantu oleh 6 staf CPNS, namun kebutuhan ASN Dit. PPP adalah sebanyak 43 orang. Saat ini kekurangan tersebut diperkuat dengan merekrut Tenaga Ahli Muda / Konsultan Individual / Tenaga Pendukung Individual dan Tenaga Profesional, serta honorer dengan jumlah 29 orang.

Kendala dan permasalahan dalam melaksanakan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada tahun 2019 dikelompokkan berdasarkan *stakeholders* (pemangku kepentingan), yaitu:

Tabel 34. Uraian Kendala dan Permasalahan BP2BT

NO	STAKEHOLDERS	URAIAN KENDALA DAN PERMASALAHAN
1	Pemohon	Pemohon Rumah Swadaya masih memiliki status kepemilikan lahan letter C, Petok, AJB, Surat Warisan, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk pengurusannya
2	TPP	<p>Dari 151 kuota formasi hanya 84 orang (55%) yang aktif bekerja. 14 orang Tenaga Penguji Permohonan (TPB) tidak dapat bekerja hingga akhir tahun.</p> <p>Dengan terbitnya Permen PUPR NO 13/2019 menyebabkan lingkup/output penugasan TPP tidak maksimal.</p> <p>KP Provinsi Lampung, TPM Kabupaten Bone dan TPM Kabupaten Wajo dihentikan pembayaran gaji 3 bulan terakhir karena tidak berkinerja dengan baik.</p>
3	Pemda Kota/Kab	<p>Belum terlibat dalam pengawasan kualitas fisik rumah.</p> <p>Koordinasi yang belum berjalan maksimal antara TPP, Pemohon, Pengembang dan Bank karena tidak ada biaya rapat sosialisasi dan belum disediakan media promosi BP2BT yang lengkap.</p>
4	Perbankan	<p>Pemahaman BP2BT antara Bank Pusat hingga ke tingkat Cabang tidak berjalan dengan baik.</p> <p>Bank masih belum dapat menerima Pemohon BP2BT untuk rumah swadaya karena terkendala dengan sertifikat kepemilikan lahan.</p> <p>Bank Jatim dan Bank Artha Graha belum dapat mengajukan permohonan BP2BT kepada Satker</p> <p>Besar suku bunga antar Bank dirasa masih besar sehingga Pemohon tidak mampu mengangsur.</p> <p>Lebih memprioritaskan pada Pemohon dengan penghasilan dan pekerjaan yang tetap.</p>
5	Pengembang	<p>Pengembang lebih mengutamakan FLPP dibandingkan BP2BT karena merasa persyaratan lebih mudah.</p> <p>Memiliki kekhawatiran terhadap jumlah pencairan bantuan dana BP2BT yang dinilai besar dapat cair dengan waktu yang cepat.</p> <p>Beberapa pengembang masih belum terdaftar di ARSAP.</p>

Permasalahan BP2BT di atas diusulkan dengan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Sosialisasi ke dinas PKP, Perbankan, dan pengembang
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PUPR dengan perbankan
3. Sosialisasi ke masyarakat oleh pihak perbankan
4. Pengawasan dilakukan oleh Manajemen Konstruksi (MK) / pengawas bersertifikat.

BAB

5

PENUTUP

Bab ini menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2019 dan rekomendasi dan langkah tindak lanjut ke depan.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

(Pada bulan Februari tahun 2019 terjadi restrukturisasi organisasi sesuai dengan amanat Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan diubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan lima direktorat yaitu Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan tugas semula melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan menjadi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Isu strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan antara lain:

1. Pemantapan Regulasi;
2. Rancangan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan;
3. Capaian Kemudahan dan/atau Bantuan;
4. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
5. Dukungan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*);
6. Mitra Kerja Utama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Visi pembiayaan perumahan adalah mewujudkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel dan misi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi bidang pembiayaan perumahan adalah:

1. Mengembangkan skema - skema bantuan pembiayaan perumahan sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan MBR untuk menempati hunian yang layak;
2. Meningkatkan jumlah Lembaga keuangan yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan;
3. Mendorong pemanfaatan sumber - sumber pembiayaan, khususnya pembiayaan jangka panjang, sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan;
4. Mendorong dan meningkatkan investasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembiayaan perumahan.

Tujuan pembangunan perumahan 2015 - 2019 bidang pembiayaan perumahan adalah meningkatkan daya beli dan aksesibilitas MBR ke lembaga - lembaga pembiayaan perumahan yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Sasaran strategis pembiayaan perumahan 2015 - 2019 untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan dan diseminasi norma, peraturan, dan kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan-pilihan skema pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat, dan berkelanjutan;
3. Terlaksananya dukungan dan fasilitasi pengembangan pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PPSP, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
4. Terlaksananya operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
5. Meningkatnya peran/partisipasi dan kapasitas LKB, LKBB, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembiayaan perumahan dengan tetap memperhatikan prinsip *good governance*;
6. Berkembangnya bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif; dan
7. Meningkatnya penempatan dana jangka panjang (dana haji, dana asuransi, dana pensiun, dana jaminan sosial, dan dana Tabungan Wajib Perumahan TNI/Polri) pada instrumen keuangan pembiayaan perumahan.

Arah kebijakan pembiayaan perumahan tahun 2015 - 2019, adalah sebagai berikut:

7. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
8. Terkait dengan KPR Rumah Umum yaitu:
 - c. Peningkatan penerbitan KPR-FLPP Rumah Umum untuk rumah tapak dan rumah susun;
 - d. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel.
9. Peningkatan peran Lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*financing*).
10. Operasionalisasi program Tapera, termasuk operasionalisasi BP Tapera, penerbitan peraturan pelaksana program, dan mendorong integrasi Tapera dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

11. Penempatan sumber dana, baik dana jangka panjang (dana haji, dana asuransi, dana jaminan sosial, dan dana TWP TNI/Polri) maupun dana KPBU pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan.
12. Peningkatan peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, khususnya melalui dorongan penerbitan obligasi daerah dan BLUD pembiayaan perumahan melalui sosialisasi, fasilitasi, advokasi, dan penyiapan kelembagaan.

Strategi kebijakan pembangunan perumahan 2015 - 2019 bidang pembiayaan dibagi menjadi tiga sisi yaitu sisi permintaan (*demand side*), sisi pasokan (*supply side*), dan *enabling environment*.

Pada tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mengalami 2 (dua) kali revisi. Perjanjian Kinerja pertama dilakukan pada bulan Januari 2019 yang dilakukan oleh Direktur Pola Pembiayaan Perumahan, kemudian revisi pertama pada tanggal 12 Februari 2019 Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan revisi kedua dilakukan pada bulan November 2019 oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta Terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu:

- 1) Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
- 2) Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan;
- 3) Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan;
- 4) Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan;
- 5) Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan;
- 6) Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan;
- 7) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jumlah SDM turut mempengaruhi tercapainya kinerja yang telah direncanakan. Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebanyak 57 orang dengan komposisi 14 jabatan struktural dan 43 staf, saat ini baru hanya terisi 13 jabatan struktural dan 12 staf PNS dan CPNS. Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan saat ini sebanyak 56 orang dengan komposisi 19 orang PNS, 6 orang CPNS, 4 orang Honorer, dan 27 orang Tenaga Ahli Muda / Konsultan Individual (TAM/KI). Sebanyak 24 orang adalah wanita dan 32 orang adalah pria dengan rentang usia <30 tahun sebanyak 33 orang, 30 - 50 tahun sebanyak 15 orang, dan >50 tahun sebanyak 8 orang.

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 dan BA.999.07. DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Nomor DIPA-033.08.1.400812/2019

mengalami revisi sebanyak 4 kali. Penerbitan pertama diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan anggaran sebesar Rp 30.200.000.000,00 dan Rp 15.000.000.000,00 dari anggaran tersebut merupakan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Revisi ke-2 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan penambahan anggaran sebesar Rp 30.379.286.000,00 dan anggaran dengan sumber dana PHLN menjadi sebesar Rp 36.300.086.000,00 sehingga DIPA BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada revisi ke-2 menjadi Rp 60.579.086.000,00. Revisi ke-3 dilakukan pada tanggal 4 November 2019 dengan besar anggaran menjadi Rp 59.394.086.000,00. Revisi ke-4 dilakukan pada tanggal 12 Desember 2019 terdapat penambahan anggaran dengan sumber dana PHLN sebesar Rp 198.420.000.000,00 sehingga dana PHLN menjadi sebesar Rp 234.7220.086.000,00 dan total anggaran BA.033 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tahun 2019 menjadi sebesar Rp 257.814.086.000,00. Sedangkan BA.999.07 terdiri dari Subsidi Bunga Kredit Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 3.452.654.265.000,00 dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp 948.000.000.000,00.

Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan berdasarkan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja nomor 1 (satu) adalah sebesar 490% dari target sebesar 100%, Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), dan 7 (tujuh) sebesar 100%. Sedangkan capaian realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar Rp 238.074.001.445,00 atau 92,34% dari total pagu bagi Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan sebesar Rp 257.814.086.000,00. Sedangkan kinerja pencapaian fisik Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan sebesar 99,71%. Kinerja anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan masing - masing Indikator Kinerja adalah sebesar 92,46% capaian Indikator Kinerja 1 (satu), 93,64% capaian Indikator Kinerja 2 (dua), 79,73% capaian Indikator Kinerja 3 (tiga), 96,61% capaian Indikator Kinerja 6 (enam), dan 59,65% Indikator Kinerja 7 (tujuh), sedangkan capaian Indikator Kinerja 4 (empat) dan 5 (lima) tidak dapat diukur karena kegiatan mengalami realokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga mengalami penghematan anggaran sebesar 100% dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja 4 (empat) dan 5 (lima). Untuk target kinerja Subsidi Bunga Kredit pada bulan Desember adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar Rp 3.529.969.647.622,00 atau sebesar 98,90% sehingga terjadi deviasi negatif capaian kinerja sebesar -1.1%. Target kinerja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan TA. 2019 adalah 100% dan capaian kinerja pada bulan Desember adalah sebesar 89,85% atau sebesar Rp 747.040.000.000,00. Terdapat deviasi negatif sebesar -10,15% antara target dan capaian. Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan berdasarkan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja nomor 1 (satu) adalah sebesar 490% dari target sebesar 100%, Indikator Kinerja nomor 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), dan 7 (tujuh) sebesar 100%.

Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan yang dialami oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah:

1. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar subdit di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.
2. Dit. PPP memiliki pagu awal sebesar 30,2 miliar rupiah, namun dalam pelaksanaannya terjadi revisi anggaran menjadi 60,5 miliar rupiah. Sehingga penyerapan bulan Agustus 2019 menjadi hanya sekitar 18,83%.
3. Dit. PPP kekurangan SDM, saat ini sudah terisi 12 namun kebutuhan Ditt. PPP adalah sebanyak 43 orang.

Kendala dan permasalahan dalam melaksanakan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada tahun 2019 dikelompokkan berdasarkan *stakeholders* (pemangku kepentingan), antara lain:

1. Pemohon;
2. Tenaga Pendamping Penyaluran;
3. Pemerintah daerah kota/kabupaten;
4. Perbankan;
5. Pengembang.

5.2. LANGKAH KE DEPAN

Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 adalah:

10. Terkait dengan Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Dit. PPP perlu menyusun Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024;
11. Penyusunan Panduan Pelaksanaan KPBU Perumahan atas Usulan Pemerintah Daerah;
12. Penyusunan Strategi Pengembangan Skema Kerja Sama Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat (KPBUM) dalam Pembangunan Rumah Susun;
13. Penyelesaian penyusunan Rapermen terkait KPR ASN, TNI, dan POLRI;
14. Pedoman pelaksanaan dan ruang lingkup baru TPP BP2BT Tahun Anggaran 2020 dengan terbitnya Permen PUPR No. 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT;
15. Penyusunan *Service Level Agreement* (SLA) untuk Proyek KPBU Bidang Perumahan;
16. Penerapan penyusunan tarif sewa pada Rumah Susun yang akan dijalankan dengan KPBU;
17. Pengembangan inovasi skema KPR Mikro, penyaluran kemudahan dan bantuan melalui Lembaga keuangan non-bank.
18. Pengawasan dilakukan oleh Manajemen Konstruksi (MK) / pengawas bersertifikat setelah SLF dihilangkan dari syarat utama pengajuan BP2BT.

Strategi yang dapat dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan antara lain terkait dengan:

5. Identifikasi Proyek KPBU;

6. Alternatif Sumber Penganggaran untuk Penyiapan Proyek KPBU;
7. Koordinasi dan Fasilitasi Bank Pelaksana, Pembiayaan Sekunder, dan Tapera;
8. Koordinasi Pendataan Pembiayaan Perumahan.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan

Penyusunan Pedoman Identifikasi Peran Masyarakat

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
24 April 2019	<i>Trilateral Meeting</i> Lanjutan Nomenklatur Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020	Jakarta
13 Juni 2019	Rapat Penyiapan Konsep Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2020 - 2024	Jakarta
5 Juli 2019	Rapat Identifikasi Potensi KPBU Perumahan di Provinsi Sumatera Selatan	Palembang
16 Oktober 2019	Usulan Target dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024	Bogor
16 Oktober 2019	Rapat Penyiapan Roadmap KPBU Bidang Perumahan Tahun 2020 - 2024	Bogor
10 Desember 2019	Rapat Pembahasan Drafy Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2020 - 2024	Tangerang Selatan



Penyusunan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Dokumentasi
4 Oktober 2019	Rapat Penyempurnaan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Tangerang Selatan	
9 Oktober 2019	Rapat Penyempurnaan Tata Kelola Penyaluran Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Jakarta	

Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Pembiayaan

a) Pemetaan Kegiatan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Sektor Pembiayaan Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
27 - 29 Maret 2019	Rapat Koordinasi Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2019	Kota Cirebon
26 April 2019	Rapat <i>Expose</i> Hasil Identifikasi Tanah BMN Kementerian PUPR untuk KPBU Perumahan	Kota Jakarta Selatan
13 Juni 2019	Rapat Penyiapan Konsep Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2020 - 2024	Kota Jakarta Selatan
5 Juli 2019	Rapat Identifikasi Potensi KPBU Perumahan di Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang

b) Pengembangan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan/atau Bantuan Perumahan bagi MBR

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
22 Februari 2019	Rapat Pembahasan Dasar Hukum Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi ASN, TNI, dan POLRI	Kota Jakarta Selatan	
25 Maret 2019	Rapat Percepatan Penyiapan Penyediaan Perumahan bagi ASN, TNI, dan POLRI	Kota Jakarta Selatan	
26 Maret 2019	Rapat Penyiapan Peraturan Perundangan Pembiayaan Perumahan bagi ASN, TNI, dan POLRI	Kota Jakarta Selatan	
20 Mei 2019	Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri PUPR tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi	Kota Jakarta Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
24 juni 2019	Sosialisasi dan Rencana Pelaksanaan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Subsidi	Kota Jakarta Selatan	
4 September 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR	Kota Jakarta Selatan	
1 Oktober 2019	Rapat Pembahasan Uang Muka KPR Bersubsidi	Kota Jakarta Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
12 November 2019	Rapat usulan Penggunaan Produk Kredit Komersial Khusus Guna Penyaluran Tambahan FLPP Tahun 2019 untuk Selanjutnya Dialihkan Menjadi Kredit FLPP pada Tahun 2020	Kota Jakarta Selatan	
14 - 15 November 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR	Kota Tangerang Selatan	
18 - 19 November 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR	Kota Tangerang Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
4 Desember 2019	Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Rumah bagi ASN, TNI, dan POLRI	Kota Jakarta Selatan	
10 - 11 Desember 2019	Rapat Tindak Lanjut Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah MBR	Kota Tangerang	
17 Desember 2019	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Rumah bagi ASN/TNI/POLRI	Kota Jakarta Selatan	

c) Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Pola Investasi Perumahan Tahun Anggaran 2020 - 2025

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
Setiap Minggu Pertama di awal bulan	Rapat Internal Kegiatan	Kota Jakarta Selatan
14 Oktober 2019	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) / Rapat Diskusi Kelompok Terbatas Identifikasi	Kota Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
	Permasalahan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	
2 Desember 2019	FGD Tantangan Dalam Pelaksanaan Investasi Perumahan	Kota Jakarta Selatan

Penyusunan Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan

a) Kajian Alternatif Penyesuaian Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
29 - 30 Agustus 2019	Rapat Ewalisasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Sentul, Bogor	
3 September 2019	Rapat Koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait pengambilan keputusan penyelesaian pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Kota Jakarta Selatan	
6 - 7 September 2019	FGD Pembahasan Penyempurnaan Kebijakan Penyaluran Subsidi Bunga	Kota Tnagerang Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
	Kredit Perumahan		
14 Oktober 2019	Rapat dengan Stakeholder dalam rangka menjaring masukan terkait pengambilan kebijakan penyelesaian pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Kota Jakarta Selatan	

b) Penyusunan Materi Teknis Peningkatan Akses MBR Informal terhadap Pembiayaan Perumahan Berbasis Ekonomi Digital

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
22 Mei 2019	Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyaluran Program BP2BT pada MBR Informal melalui Akses Ekonomi Digital	Kota Jakarta Selatan	
10 Juli 2019	Rapat Dukungan Bantuan Kemudahan Pembiayaan Perumahan dalam Perolehan Rumah bagi Pelaku Ekonomi Digital	Kota Jakarta Selatan	

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
16 Agustus 2019	Rapat Lanjutan Dukungan Kemudahan Pembiayaan Perumahan dalam Perolehan Rumah bagi Pelaku Ekonomi Digital	Kota Jakarta Selatan	
12 September 2019	Rapat Pembahasan Kerjasama Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Perolehan Rumah bagi Pelaku Ekonomi Digital	Kota Jakarta Selatan	

c) **Penyusunan Pedoman Pengadaan Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Penyiapan Kelompok Sasaran**

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
16 - 18 Mei 2019	Bimbingan Teknis TPP BP2BT	Kota Tangerang
31 Oktober - 1 November 2019	Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran BP2BT Tahun 2019	Kota Tangerang Selatan
9 Desember 2019	FGD Hasil Evaluasi Kinerja TPP BP2BT TA 2019	Kota Tangerang Selatan

Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan

a) **Penyempurnaan Skema Pembiayaan Mikro Perumahan Berbasis Tabungan**

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
14 Januari 2019	Pembahasan Draf Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR terkait BP2BT	Kota Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
15 Februari 2019	Rapat Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama	Kota Jakarta Selatan
18 Februari 2019	Rapat Lanjutan Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama Penyaluran BP2BT Tahun 2019	Kota Jakarta Selatan
26 Februari 2019	Rapat Pembahasan Pengembangan Skema BP2BT	Kota Jakarta Selatan
22 April 2019	Rapat Monitoring Pelaksanaan Program BP2BT dan Pembahasan Target Volume BP2BT	Kota Jakarta Selatan
24 April 2019	Rapat Evaluasi Kesiapan Bank Pelaksana Penyalur BP2BT TA 2019	Kota Jakarta Selatan
29 Mei 2019	Finalisasi Rancangan Keputusan Menteri PUPR dalam Pelaksanaan BP2BT TA 2019	Kota Jakarta Selatan
2 Mei 2019	Rapat Koordinasi Pelaksanaan BP2BT TA 2019	Kota Tangerang
11 Juni 2019	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri PUPR BP2BT TA 2019	Kota Jakarta Selatan
24 Juli 2019	Rapat Persiapan Sosialisasi Kepmen PUPR Nomor 587/KPTS/M/2019	Kota Jakarta Selatan
29 Juli 2019	Rapat Evaluasi Semester I Penyaluran BP2BT	Kota Jakarta Selatan
18 - 19 Oktober 2019	Workshop Bantuan Pembiayaan Mikro Perumahan Tabungan	Kota Tangerang Selatan

b) Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya secara Berkelompok

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
4 April 2019	Persiapan Penyiapan Pelaksanaan pembiayaan Rumah Swadaya Secara Berkelompok	Kota Jakarta Selatan
2 - 3 Agustus 2019	Diskusi dan Pembahasan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Tentang Rumah Swadaya Melalui BP2BT	Kota Tangerang
6 Agustus 2019	Rapat <i>review</i> Perubahan Peraturan Menteri PUPR Tentang Rumah Swadaya Melalui BP2BT	Kota Jakarta Selatan
15 Agustus 2019	Diskusi dan Pembahasan Lanjutan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Tentang Rumah Swadaya Melalui BP2BT	Kota Jakarta Selatan
12 Desember 2019	Rapat Finalisasi Pola Pembiayaan Pembangunan Rumah Swadaya Secara Berkelompok	Kota Bogor

Penyusunan Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
Setiap minggu pertama di awal bulan	Rapat Internal	Kota Jakarta Selatan	
19 Februari 2019	Diskusi Terbatas dengan Direktorat Rumah Susun dan Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tentang Pembahasan Persiapan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun.	Kota Jakarta Selatan	
27 Juni 2019	Rapat Pembahasan Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan PT. Jakarta Property Management	Kota Jakarta Selatan	
25 Juli 2019	FGD Penyusunan Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya.	Kota Surabaya	
7 Oktober 2019	Asistensi Penyusunan Rancangan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah	Kota Bandung	


Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat	Foto Kegiatan
	Susun dengan Akademisi ITB		
29 Oktober 2019	Asistensi II Penyusunan Rancangan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan Akademisi ITB	Kota Bandung	
25 November 2019	Asistensi III Penyusunan Rancangan Rumusan Rapermen Standar Pelayanan Minimal pada Pengelolaan Rumah Susun dengan Akademisi ITB	Kota Bandung	

Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Tempat
30 Agustus 2019	Rapat Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan di Batam	Kota Batam
6 September 2019	Rapat Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Perumahan di Jawa Tengah	Kota Solo
9 September 2019	Rapat Pembahasan Kick Off Fasilitasi Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan	Kota Jakarta Pusat
8 Oktober 2019	Kunjungan Kerja ke PT. Pertamina (Persero)	Kota Jakarta Selatan
17 Oktober 2019	Rapat Pembahasan Studi Pendahuluan Rumah Susun Pasar Sekanak Kota Palembang	Kota Bogor

Paket Pembiayaan Perumahan

Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Dokumentasi Kegiatan
7 Oktober 2019	Kunjungan Lapangan UPT Rusunawa Cingised	Kota Bandung	
24 Oktober 2019	Kunjungan Lapangan Jakarta Property Management	Kota Jakarta Utara	
25 Oktober 2019	Kunjungan Lapangan Asrama Mahasiswa UI	Kota Depok	
30 Oktober 2019	Kunjungan Lapangan Perum Perumnas	Kota Jakarta Timur	
18 November 2019	FGD Tata Cara Penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun Pada Proyek KPBU	Kota Jakarta Selatan	

Tanggal	Nama Kegiatan	Tempat	Dokumentasi Kegiatan
5 Desember 2019	Rapat Tindak Lanjut FGD Tata Cara Penyusunan Tarif Sewa Rumah Susun Pada Proyek KPBU	Kota Bandung	

Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Didik Sunardi**
Jabatan : Direktur Pola Pembiayaan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Khalawi AH**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

KHALAWI AH

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama

DIDIK SUNARDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
1	Materi teknis pengembangan pola pembiayaan perumahan	1) Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5 Materi Teknis
		2) Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	1 Materi Teknis 1 Rumusan NSPK
		3) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1 Materi Teknis
		4) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1 Materi Teknis
		5) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1 Materi Teknis
		6) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1 Materi Teknis
		7) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan
2	Rumusan rapermen pola pembiayaan perumahan	1) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1 Rapermen
		2) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1 Rapermen
		3) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1 Rapermen
		4) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1 Rapermen
3	Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat dan Layanan Perkantoran	1) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat	1 Laporan
		2) Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan
4	Layanan Bantuan Pembiayaan	1) Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12 Bulan Layanan

		2) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Uang Muka (BA 999.07)	345.000 Rumah Tangga
		3) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Subsidi Selisih Bunga (SSB)	225.000 Rumah Tangga

Kegiatan

1. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan (BA. 033)
2. Subsidi Bunga Kredit Perumahan (BA. 999.07)
3. Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (BA. 999.07)

Anggaran

Rp30.200.000.000,00

Rp3.452.654.265.000,00

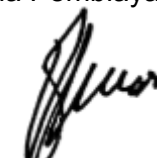
Rp948.000.000.000,00

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan



KHALAWI AH

Jakarta, Januari 2019
Direktur Pola Pembiayaan Perumahan



DIDIK SUNARDI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adang Sutara**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, 12 Februari 2019

Pihak Pertama

ADANG SUTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
1	Materi teknis pengembangan pola pembiayaan perumahan	1) Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan 2) Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan 3) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun 4) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya 5) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro 6) Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan 7) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	5 Materi Teknis/Dokumen 2 NSPK 2 Materi Teknis 1 Materi Teknis 1 Materi Teknis 1 Materi Teknis 1 Laporan
2	Rumusan rapermen pola pembiayaan perumahan	1) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun 2) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya 3) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro 4) Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1 Rapermen 1 Rapermen 1 Rapermen 1 Rapermen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Layanan bantuan pembiayaan perumahan	1) Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12 Bulan Layanan
		2) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312 Rumah Tangga
4	Layanan perkantoran	1) Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan

1. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan (BA. 033)
2. Subsidi Bunga Kredit Perumahan (BA. 999.07)
3. Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (BA. 999.07)

Anggaran

Rp30.200.000.000,00

Rp3.452.654.265.000,00

Rp948.000.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, 12 Februari 2019
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Perumahan


ADANG SUTARA



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adang Sutara**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, November 2019
Pihak Pertama


ADANG SUTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENGEMBANGAN POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1) Tingkat ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR	100%
		2) Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1 Jakstra
		3) Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Draft NSPK
		4) Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen
		5) Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Dokumen
		6) Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1 Paket Pembiayaan
		7) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan Serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2 Laporan

Kegiatan

1. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan (BA. 033)
2. Subsidi Bunga Kredit Perumahan (BA. 999.07)
3. Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (BA. 999.07)

Anggaran

Rp 59.394.086.000,00
Rp 3.452.654.265.000,00
Rp 948.000.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D HERIPOERWANTO

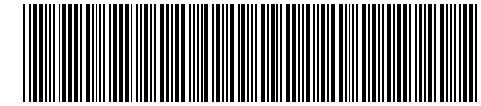
Jakarta, November 2019
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan


ADANG SUTARA

DIPA



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 033.08.1.400812/2019**



DS:7571-0399-4026-4485

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (400812) | PEMBIAYAAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 194.189.000.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- | | |
|-------|------------------------------|
| 06 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM |
| 06.01 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	179.189.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	179.189.000.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	15.000.000.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

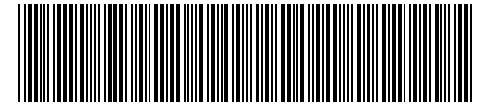
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019



DS:7571-0399-4026-4485

Satker : (400812) PEMBIAYAAN PERUMAHAN

12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Rp.	194.189.000.000
12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rp.	67.600.000.000
12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.140.000.000
12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Rp.	30.200.000.000
12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp.	15.500.000.000
12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rp.	35.379.000.000
12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp.	16.370.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Utama, BE, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan			
	09	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	24 Dokumen		22.340.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan	3	Dokumen	
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
	05	Jumlah Dokumen Data Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	
Output Kegiatan	5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	84 MoU		5.700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	79	MoU	
	02	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	5	MoU	
Output Kegiatan	5316.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			30.200.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pola Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro			
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan			
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	08	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	09	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	10	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro			
	11	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan			
	12	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN PERUMAHAN

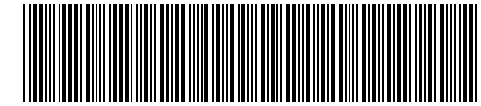
Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Utama, BE, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Bantuan Uang Muka)			
	14	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13 Materi Teknis		6.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5	Materi Teknis	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2	Materi Teknis	
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Materi Teknis	
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1	Materi Teknis	
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1	Materi Teknis	
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	
Output Kegiatan	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	4 Rapermen		2.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1	Rapermen	
	02	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Rapermen	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1	Rapermen	
	04	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1	Rapermen	
Output Kegiatan	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	312 Rumah Tangga		19.500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12	Bulan Layanan	
	02	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	
Output Kegiatan	5317.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Layanan	
Output Program	02	Lembaga Keuangan Bank, Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan	110	Lembaga	
Kegiatan	5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			15.500.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	02	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	03	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	04	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 033.08.1.400812/2019**



DS:7571-0399-4026-4485

Revisi ke 01

Tanggal : 08 Mei 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (400812) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 194.189.000.000 (SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- | | |
|-------|------------------------------|
| 06 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM |
| 06.01 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	179.189.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	15.000.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	179.189.000.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	15.000.000.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

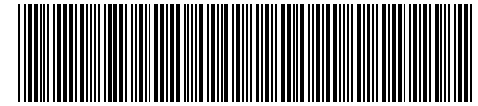
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019



DS:7571-0399-4026-4485

Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Rp.	194.189.000.000
12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rp.	67.600.000.000
12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.140.000.000
12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Rp.	30.200.000.000
12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp.	15.500.000.000
12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rp.	35.379.000.000
12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp.	16.370.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Utama, BE, S.Sos, M.Si
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan			
	09	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	24 Dokumen		22.340.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan	3	Dokumen	
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
	05	Jumlah Dokumen Data Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	
Output Kegiatan	5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	84 MoU		5.700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	79	MoU	
	02	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	5	MoU	
Output Kegiatan	5316.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			30.200.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pola Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro			
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan			
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	08	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	09	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	10	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro			
	11	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan			
	12	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

IA. INFORMASI KINERJA



DS:7571-0399-4026-4485

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

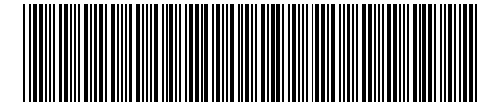
Kuasa Pengguna Anggaran : I Nyoman Utama, BE, S.Sos, M.Si
 Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
 Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Bantuan Uang Muka)			
	14	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13 Materi Teknis		6.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5	Materi Teknis	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2	Materi Teknis	
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Materi Teknis	
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1	Materi Teknis	
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1	Materi Teknis	
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	
Output Kegiatan	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	4 Rapermen		2.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1	Rapermen	
	02	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Rapermen	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1	Rapermen	
	04	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1	Rapermen	
Output Kegiatan	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	312 Rumah Tangga		19.500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12	Bulan Layanan	
	02	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	
Output Kegiatan	5317.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Layanan	
Output Program	02	Lembaga Keuangan Bank, Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan	110	Lembaga	
Kegiatan	5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			15.500.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	02	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	03	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	04	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 033.08.1.400812/2019**



DS:0456-2792-4872-0041

Revisi ke 02

Tanggal : 09 Agustus 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (400812) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 215.489.086.000 (DUA RATUS LIMA BELAS MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- | | |
|-------|------------------------------|
| 06 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM |
| 06.01 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	179.189.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	36.300.086.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	36.300.086.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	179.189.000.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	36.300.086.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

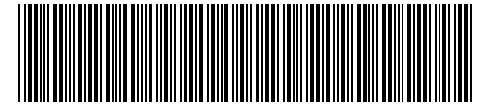
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019



DS:0456-2792-4872-0041

Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Rp.	215.489.086.000
12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rp.	67.600.000.000
12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.140.000.000
12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Rp.	60.579.086.000
12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp.	19.550.000.000
12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rp.	16.900.000.000
12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp.	21.720.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan			
	09	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	24 Dokumen		22.340.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan	3	Dokumen	
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
	05	Jumlah Dokumen Data Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	
Output Kegiatan	5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	84 MoU		5.700.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	79	MoU	
	02	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	5	MoU	
Output Kegiatan	5316.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			60.579.086.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pola Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro			
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan			
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	08	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	09	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	10	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro			
	11	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan			
	12	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0456-2792-4872-0041

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Bantuan Uang Muka)			
	14	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13	Materi Teknis	6.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5	Materi Teknis	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2	Materi Teknis	
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Materi Teknis	
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1	Materi Teknis	
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1	Materi Teknis	
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	
Output Kegiatan	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	4	Rapermen	2.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1	Rapermen	
	02	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Rapermen	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1	Rapermen	
	04	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1	Rapermen	
Output Kegiatan	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	312	Rumah Tangga	46.500.086.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12	Bulan Layanan	
	02	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	
Output Kegiatan	5317.004	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	1	JAKSTRA	859.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1	Jakstra	
	02	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
Output Kegiatan	5317.005	Pelaksanaan Investasi Perumahan	1	PAKET PEMBIAYAAN	840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5317.006	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	DRAFT NSPK	840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Draft NSPK	
Output Kegiatan	5317.007	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	LAPORAN	840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	Laporan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0456-2792-4872-0041

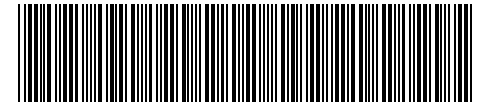
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.4

Output Kegiatan	5317.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Layanan	
Output Program	02	Lembaga Keuangan Bank, Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan	110	Lembaga	
Kegiatan	5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			19.550.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	02	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	03	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	04	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	05	Jumlah peningkatan portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, dana asuransi, Bapertarum PNS, dan TWP TNI POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan			
	06	Jumlah peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan			
	07	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan			
	08	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan			
	09	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki produk program pembiayaan swadaya masyarakat			
	10	Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan			
	11	Jumlah laporan evaluasi kinerja			
	12	Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5318.001	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya [PN]	110 Lembaga		5.200.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	35	Lembaga	
	02	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya yang memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	20	Lembaga	
	03	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Tabungan Perumahan	20	Lembaga	
	04	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Produk Program Pembiayaan Swadaya Masyarakat	10	Lembaga	
	05	Jumlah Perusahaan yang Mengalokasikan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pembiayaan Perumahan	25	Perusahaan	

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019



DS:2395-2505-3477-6025

Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Rp.	219.260.539.000
12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rp.	77.581.453.000
12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.140.000.000
12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Rp.	59.394.086.000
12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp.	18.625.000.000
12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rp.	14.000.000.000
12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp.	20.520.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan			
	09	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	24 Dokumen		20.228.062.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan	3	Dokumen	
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
	05	Jumlah Dokumen Data Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	
Output Kegiatan	5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	84 MoU		5.711.938.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	79	MoU	
	02	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	5	MoU	
Output Kegiatan	5316.003	Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2 Draft Jakstra dan NSPK		500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	Draft Jakstra dan NSPK	
Output Kegiatan	5316.004	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4 PROFIL RISIKO		1.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4	Profil Risiko	
Output Kegiatan	5316.005	Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1 DOKUMEN		300.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Dokumen	
Output Kegiatan	5316.006	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1 LAPORAN		300.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Laporan	
Output Kegiatan	5316.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			59.394.086.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pola Pembiayaan Perumahan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro			
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan			
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	08	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	09	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	10	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro			
	11	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan			
	12	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Bantuan Uang Muka)			
	14	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13	Materi Teknis	6.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5	Materi Teknis	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2	Materi Teknis	
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Materi Teknis	
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1	Materi Teknis	
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1	Materi Teknis	
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	
Output Kegiatan	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	4	Rapermen	2.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1	Rapermen	
	02	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Rapermen	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1	Rapermen	
	04	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1	Rapermen	
Output Kegiatan	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	312	Rumah Tangga	46.500.086.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12	Bulan Layanan	
	02	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2395-2505-3477-6025

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

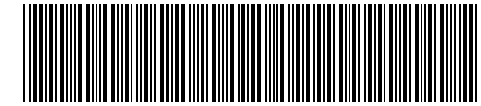
Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.4

Output Kegiatan	5317.004	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	1	JAKSTRA	434.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1	Jakstra	
	02	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
Output Kegiatan	5317.005	Pelaksanaan Investasi Perumahan	1	PAKET PEMBIAYAAN	420.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5317.006	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	DRAFT NSPK	500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Draft NSPK	
Output Kegiatan	5317.007	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	LAPORAN	840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	Laporan	
Output Kegiatan	5317.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Layanan	
Output Program	02	Lembaga Keuangan Bank, Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan	110	Lembaga	
Kegiatan	5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			18.625.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	02	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	03	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	04	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	05	Jumlah peningkatan portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, dana asuransi, Bapertarum PNS, dan TWP TNI POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan			
	06	Jumlah peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan			
	07	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan			
	08	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan			
	09	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki produk program pembiayaan swadaya masyarakat			



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 033.08.1.400812/2019**



DS:5661-0359-3295-8555

Revisi ke 04

Tanggal : 12 Desember 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (033) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (400812) | PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN |
| Sebesar | : Rp. | 417.680.539.000 (EMPAT RATUS TUJUH BELAS MILIAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- | | |
|-------|------------------------------|
| 06 | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM |
| 06.01 | PEMBANGUNAN PERUMAHAN |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	182.960.453.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	234.720.086.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	234.720.086.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	182.960.453.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	234.720.086.000

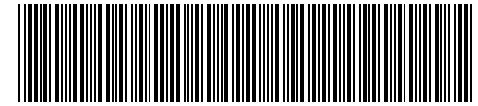
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019



DS:5661-0359-3295-8555

Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Rp.	417.680.539.000
12.5315	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Rp.	77.581.453.000
12.5316	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.140.000.000
12.5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Rp.	257.814.086.000
12.5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp.	18.625.000.000
12.5319	Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rp.	14.000.000.000
12.5320	Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp.	20.520.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019

IA. INFORMASI KINERJA



DS:5661-0359-3295-8555

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
 Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
 Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.2

Indikator Kinerja Kegiatan	08	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan			
	09	Jumlah Layanan Perkantoran			
Output Kegiatan	5316.001	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, Program dan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan [PN]	24 Dokumen		20.228.062.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	02	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Perumahan	1	Dokumen	
	03	Jumlah Dokumen Rumusan Standar dan Kriteria Bantuan dan Kemudahan	3	Dokumen	
	04	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan	4	Dokumen	
	05	Jumlah Dokumen Data Pengembangan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	6	Dokumen	
	06	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	
Output Kegiatan	5316.002	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan [PN]	84 MoU		5.711.938.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah MOU Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah	79	MoU	
	02	Jumlah MOU Kerjasama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	5	MoU	
Output Kegiatan	5316.003	Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2 Draft Jakstra dan NSPK		500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	Draft Jakstra dan NSPK	
Output Kegiatan	5316.004	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4 Profil Risiko		1.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Profil Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	4	Profil Risiko	
Output Kegiatan	5316.005	Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1 Dokumen		300.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Dokumen	
Output Kegiatan	5316.006	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1 Laporan		300.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Laporan	
Output Kegiatan	5316.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	
Kegiatan	5317	Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			257.814.086.000
Sasaran Kegiatan	01	Tersedianya Skema Pembiayaan Perumahan serta terselenggaranya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			
Indikator Kinerja Kegiatan	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			
	08	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:5661-0359-3295-8555

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	09	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	10	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro			
	11	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan			
	12	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan (Bantuan Uang Muka)			
	14	Jumlah Layanan Perkantoran			
	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan			
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pola Pembiayaan Perumahan			
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun			
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya			
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro			
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan			
Output Kegiatan	5317.001	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	13 Materi Teknis		6.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Materi Teknis, Rencana Strategi, Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	5	Materi Teknis	
	02	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pola Pembiayaan Perumahan	2	NSPK	
	03	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	2	Materi Teknis	
	04	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Materi Teknis	
	05	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Mikro	1	Materi Teknis	
	06	Jumlah Materi Teknis Pengembangan Pola Investasi Perumahan	1	Materi Teknis	
	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	
Output Kegiatan	5317.002	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan [PN]	4 Rapermen		2.800.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Tapak dan Rumah Susun	1	Rapermen	
	02	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Rumah Swadaya	1	Rapermen	
	03	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Mikro	1	Rapermen	
	04	Jumlah Rumusan Rapermen Pola Investasi Perumahan	1	Rapermen	
Output Kegiatan	5317.003	Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan [PN]	5.178 Rumah Tangga		244.920.086.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembiayaan Perumahan	12	Bulan Layanan	
	02	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	Rumah Tangga	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 033.08.1.400812/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:5661-0359-3295-8555

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (08) DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (400812) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom

Halaman : IA.4

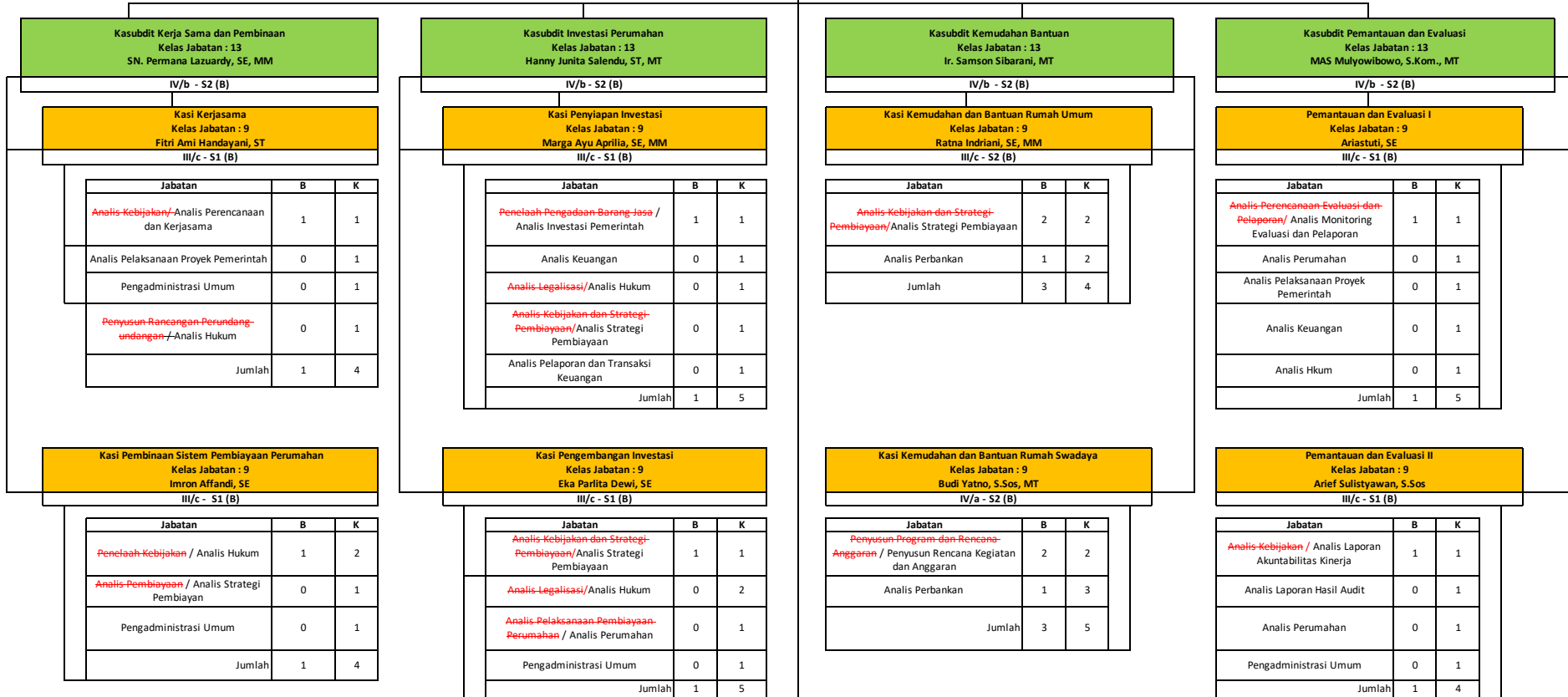
Output Kegiatan	5317.004	Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembiayaan Perumahan	1	Jakstra	434.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	1	Jakstra	
	02	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
Output Kegiatan	5317.005	Pelaksanaan Investasi Perumahan	1	Paket Pembiayaan	420.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyiapan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	0	Dokumen	
	02	Jumlah Paket Pembiayaan Perumahan	1	Paket Pembiayaan	
Output Kegiatan	5317.006	Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Draft NSPK	500.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Perumusan Kebijakan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	Draft NSPK	
Output Kegiatan	5317.007	Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	Laporan	840.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi perumahan serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	Laporan	
Output Kegiatan	5317.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.100.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Layanan Perkantoran	12	Layanan	
Output Program	02	Lembaga Keuangan Bank, Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan			
Indikator Output Program	01	Jumlah Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Perusahaan yang Berperan serta dalam Pembiayaan Perumahan	110	Lembaga	
Kegiatan	5318	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			18.625.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-Sumber Pembiayaan Perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	02	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan			
	03	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	04	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perumahan			
	05	Jumlah peningkatan portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, dana asuransi, Bapertarum PNS, dan TWP TNI POLRI untuk pembiayaan pembangunan perumahan			
	06	Jumlah peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan			
	07	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan			
	08	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perumahan			
	09	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki produk program pembiayaan swadaya masyarakat			

Peta Analisis Beban Kerja

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN		
Kelas Jabatan : 15		
Adang Sutara, SE, M.Si		
IV/c - S2 (B)		

Kasubag Tata Usaha		
Kelas Jabatan : 9		
Wiwin Nurbaenah, S.Sos		
III/c - S1 (B)		

Jabatan	B	K
Pengelola Tata Naskah	0	2
Pengadministrasi Kepegawaian	0	2
Pengadministrasi Umum	0	3
Jumlah	0	7



Keterangan		
Jabatan	B	K
JABATAN STRUKTURAL	14	14
STAF PNS dan CPNS	12	43
Jumlah	26	57



**Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**